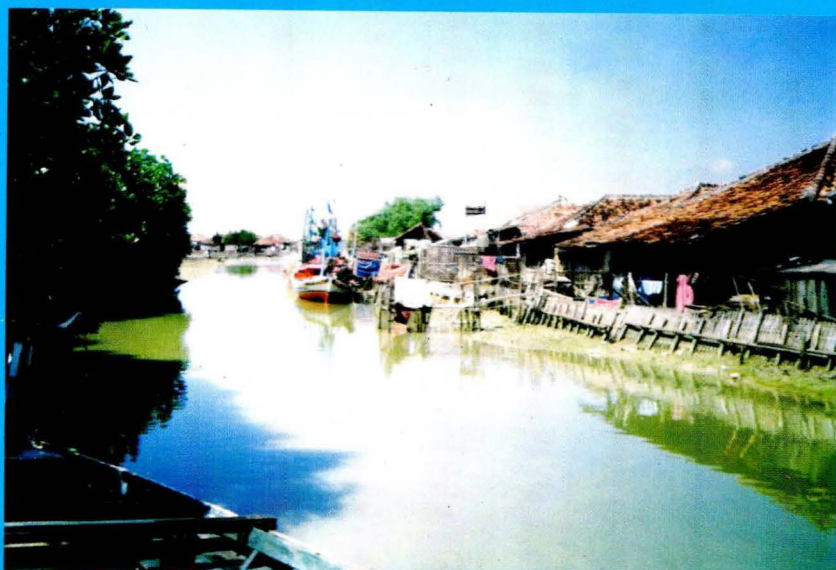


Tingkat Kesejahteraan Keluarga Nelayan

Studi tentang Tantangan,
Kendala dan Peluang Keluarga Nelayan
untuk Melepaskan Diri
dari Belenggu Kemiskinannya



rektorat
layaan

**KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
BALAI KAJIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL BANDUNG
PROYEK PEMANFAATAN KEBUDAYAAN DAERAH JAWA BARAT
2004**

3203-7074

10

Tingkat Kesejahteraan Keluarga Nelayan

Studi tentang Tantangan,
Kendala dan Peluang Keluarga Nelayan
untuk Melepaskan Diri
dari Belenggu Kemiskinannya

Oleh :

Toto Sucipto
Rosyadi
Aam Masduki
Enden Irma Rachmawaty
Endang Supriatna
Agus Heryana

Penyunting :

S. Dloyana Kusumah

**KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
BALAI KAJIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL BANDUNG
PROYEK PEMANFAATAN KEBUDAYAAN DAERAH JAWA BARAT
2004**

KATA PENGANTAR

Proyek Pemanfaatan Kebudayaan Daerah Jawa Barat, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2004 berkesempatan untuk menerbitkan buku berjudul :

1. Fungsi Keluarga dalam Penanaman Nilai-nilai Budaya pada Masyarakat Betawi di DKI Jakarta;
2. Pergerakan Pembaharuan Islam, Studi Historis tentang Eksistensi Persatuan Islam (Persis) di Kabupaten Serang Propinsi Banten;
3. Tingkat Kesejahteraan Keluarga Nelayan, Studi Tentang Tantangan Kendala dan Peluang Keluarga Nelayan untuk Melepaskan Diri dari Belenggu Kemiskinannya;
4. Potensi Wisata di Daerah Pameungpeuk Kabupaten Garut.

Naskah buku-buku tersebut merupakan hasil penelitian dan penulisan tim yang ditunjuk oleh Proyek Pemanfaatan Kebudayaan Daerah Jawa Barat. Kami menyadari bahwa hasil penelitian yang dibukukan ini masih terasa belum mencapai kesempurnaan. Kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun sangat kami harapkan sebagai dasar penyempurnaan pada penelitian selanjutnya. Dengan terwujudnya usaha ini kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak.

Akhir kata, mudah-mudahan penerbitan buku ini bermanfaat dalam usaha menggali serta melestarikan kebudayaan daerah memperkuat kebudayaan nasional serta menunjang pembangunan bangsa.

Bandung, November 2004

Pemimpin Proyek Pemanfaatan
Kebudayaan Daerah Jawa Barat,



Drs. Suwardi Alamsyah P.

NIP. 131 966 806

KATA PENGANTAR

Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional (BKSNT) adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Deputy Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan (Deputi I), Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI. Lembaga ini didirikan bukan berdasarkan **daerah administratif** melainkan **daerah kebudayaan**. Oleh karena itu, wilayah kerjanya lintas propinsi. Walaupun lembaga ini merupakan UPT Deputy Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan bukan berarti bahwa ia hanya melaksanakan sebagian tugas dari deputi tersebut, tetapi juga sebagian tugas dari Deputy Bidang Sejarah dan Purbakala, terutama yang berkenaan dengan kesejarahan, dan sebagian tugas dari Deputy Bidang Seni dan Film, terutama yang berkenaan dengan kesenian. Berdasarkan tugas-tugas tersebut maka fungsinya adalah melakukan pengamatan dan analisis kesejarahan dan kenilaitradisional (termasuk budaya spiritual), dan kesenian di wilayah kerjanya.

Di Indonesia, sampai saat ini, ada sebelas BKST yang satu dengan yang lainnya mempunyai penekanan pengkajian yang berbeda¹⁾. BKSNT Jabar, Banten, dan Lampung²⁾. Misalnya; ia mempunyai penekanan pada akulturasi, yaitu proses pencampuran dua kebudayaan atau lebih bertemu dan saling mempengaruhi (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990: 18). Ini bermakna bahwa kesejarahan dan kenilaitradisional, termasuk budaya spiritual, dan kesenian yang diamati dan atau dianalisis pada akhirnya dikaitkan dengan proses akulturasi.

Visi BKSNT Bandung adalah sebagai bank data dan informasi tentang kesejarahan dan kebudayaan, termasuk budaya spiritual dan kesenian masyarakat etnik di wilayah kerjanya. Sedangkan misinya adalah melakukan pengamatan dan analisis kesejarahan dan kebudayaan, termasuk budaya spiritual dan kesenian yang ada atau tumbuh dan berkembang di wilayah kerjanya dengan berbagai kegiatan seperti: pendataan, penelitian (pengkajian), perekaman, perlombaan, lawatan-lawatan yang berkenaan dengan kesejarahan

¹⁾ Kesebelas BKSNT itu adalah: (1) Nagroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara yang berkedudukan di Aceh penekanan pada kebudayaan Islam; (2) Sumatera Barat dan Bengkulu yang berkedudukan di Padang dengan penekanan pada kebudayaan matrilineal; (3) Riau, Jambi, dan Bangka-Belitung (Babel) yang berkedudukan di Tanjungpinang dengan penekanan pada kebudayaan Melayu; (4) Jabar, DKI Jakarta, Banten, dan Lampung yang berkedudukan di Bandung dengan penekanan pada akulturasi; (5) D.I. Yogyakarta, Jateng, dan Jatim yang berkedudukan di Yogyakarta dengan penekanan pada kebudayaan agraris; (6) Bali, NTB, dan NTT yang berkedudukan di Denpasar dengan penekanan pada pariwisata; (7) Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur yang berkedudukan di Pontianak dengan penekanan pada pembauran; (8) Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara yang berkedudukan di Makassar dengan penekanan pada kebudayaan maritime; (9) Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah yang berkedudukan di Manado dengan penekanan pada akulturasi; (10) Maluku yang berkedudukan di Ambon dengan penekanan pada kebudayaan kepulauan; dan (11) Irian Jaya yang berkedudukan di Jayapura dengan penekanan pada kebudayaan meramu dan berburu.

²⁾ BKNST ini berkedudukan di Bandung. Oleh karena itu, lebih dikenal sebagai "BKNST Bandung".

dan kebudayaan, seminar, diskusi, pendokumentasian dan sekaligus penyebarluasan data dan informasi yang berkenaan dengan kesejarahan dan kebudayaan, termasuk budaya spiritual dan kesenian yang berada di wilayah kerjanya.

Berdasarkan tugas, fungsi, serta misi yang diembannya, maka saya menyambut baik terbitnya laporan penelitian yang berjudul **“Tingkat Kesejahteraan Keluarga Nelayan: Studi tentang Tantangan dan Peluang Keluarga Nelayan untuk Melepaskan Diri Dari Belenggu Kemiskinan”**, karena ini merupakan usaha penyebarluasan dan sekaligus pelestarian nilai-nilai budaya yang mereka tumbuh kembangkan dalam rangka menggapai kehidupan yang lebih baik, sehingga kemiskinan tidak lagi menyelimutinya.

Terwujudnya buku ini adalah berkat kerjasama berbagai pihak. Sehubungan dengan itu, sudah sepantasnya jika pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung terwujudnya terbitan ini.

Kami sadar sepenuhnya bahwa naskah ini di sana-sini banyak kekurangannya, dan karenanya masih jauh dari sempurna. Untuk itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun demi sempurnanya buku ini kami terima dengan lapang dada. Walaupun demikian, kami berharap semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua.

Kepala Balai Kajian Sejarah dan,
Nilai Tradisional Bandung,



**SAMBUTAN ASDEP URUSAN TRADISI
DEPUTI BIDANG PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Pembangunan pada dasarnya adalah perubahan yang direncanakan, dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan, dengan tujuan meningkatkan taraf hidup yang lebih baik di banding waktu-waktu sebelumnya. Pembangunan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh bangsa Indonesia adalah pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya. Ini bermakna bahwa pembangunan tidak hanya ditujukan pada masyarakat perkotaan semata, tetapi juga masyarakat pedesaan yang sebagian besar hidupnya bertumpu pada pertanian dalam arti luas, termasuk di dalamnya adalah nelayan.

Masyarakat nelayan adalah masyarakat yang penghidupannya bergantung pada kemurahan laut. Oleh karena itu, pemukiman mereka berada di sekitar pantai dan atau muara. Pengetahuan mereka terhadap gejala-gejala alam, termasuk perbintangan tidak dapat diragukan. Mereka ahli dalam hal itu, sehingga tahu persis kapan dan dimana harus melaut. Sungguh pun demikian, hasil mereka yang bawa pulang seringkali pas-pasan (kalau tidak dapat dikatakan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya). Ini tentunya disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain semakin terbelitnya utang terhadap majikan (tauke), sehingga mereka menjadi tidak berdaya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak orang "mengidentikkan" dengan kemiskinan. Ini bermakna bahwa kesejahteraan mereka perlu dipulihkan.

Penelitian yang dilakukan oleh sebuah tim yang semuanya dari tenaga fungsional (peneliti) Balai Kajian sejarah dan Nilai Tradisional Bandung ini pada dasarnya bertujuan untuk memberdayakan mereka dengan melihat tantangan, kendala dan peluang dalam meningkatkan taraf hidup mereka, sehingga terlepas dari belenggu kemiskinan. Untuk itu saya menyambut baik terbitnya buku ini.

Terwujudnya buku ini adalah berkat kerjasama yang kompak antar berbagai pihak. Sehubungan dengan itu, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung ikut mendukung terwujudnya buku ini.

"Tidak ada gading yang tidak retak" barangkali ungkapan yang sesuai untuk mengomentari buku ini. Namun demikian, saya berharap semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Pendekatan Teoritis.....	7
E. Kerangka Pemikiran	10
F. Metodologi Penelitian	11
G. Waktu Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan	13
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	15
A. Letak, Tata Guna Lahan, dan Keadaan Alam	16
B. Kependudukan	20
C. Pola Permukiman	27
D. Pranata Kemasyarakatan	29
E. Sistem Teknologi	32
BAB III TINGKAT KESEJAHTERAAN KELUARGA NELAYAN	
(Hasil Penelitian dan Pembahasan)	35
A. Identitas Responden	37
B. Kehidupan Nelayan	45
C. Kondisi Perumahan	59
D. Religi dan Sistem Pengetahuan	66
E. Pola Kerja dan Pendapatan	76
F. Hambatan dan Usaha Peningkatan Kesejahteraan	86
G. Pentahapan Kesejahteraan Keluarga Nelayan Berdasarkan Instrumen Pendataan dari BKKBN	104

BAB IV KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN-SARAN	123
PENUTUP	108
DAFTAR PUSTAKA	116
DAFTAR INFORMAN	117
LAMPIRAN-LAMPIRAN	121

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Gejala kemiskinan di pedesaan (*rural poverty*) tampaknya belum sepenuhnya dapat diatasi dan masih merupakan tantangan yang paling serius saat ini. Kemiskinan yang dimaksud adalah situasi serba kekurangan dari penduduk yang terwujud dan disebabkan oleh terbatasnya modal yang dimiliki, rendahnya pengetahuan dan keterampilan, rendahnya produktivitas, rendahnya pendapatan, lemahnya nilai tukar hasil produksi orang miskin dan terbatasnya kesempatan berperan serta dalam pembangunan.

Dengan indikator yang konservatif, misalnya tingkat pendapatan ekuivalen 2.100 kalori per kapita per hari, jumlah penduduk yang tergolong miskin di Indonesia masih dalam jumlah puluhan juta jiwa ($\pm$ 27 juta jiwa). Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa gejala kemiskinan yang relatif massal dan parah sebagian besar masih terdapat di pedesaan, terutama karena umumnya sekitar 80 % penduduk Indonesia tinggal di pedesaan. Bersamaan dengan itu, masalah ketidakmerataan yang dinilai ekstrem hingga dewasa ini masih tetap disoroti secara serius oleh pakar ekonomi, sosiologi, maupun antropologi.

Meluasnya gejala kemiskinan dan ketidakmerataan bukan hanya mengindikasikan belum sehatnya kehidupan (tingkat kesejahteraan) sosial, tetapi juga sekaligus menunjukkan bahwa proses pembangunan berwawasan nasional dan berperikemanusiaan belum sepenuhnya mencapai hasil yang dapat dibanggakan. Secara teoritis, dapat saja gejala kemiskinan dan ketidakmerataan dalam suatu kehidupan sosial (khususnya di daerah pedesaan) dilihat secara terpisah. Namun dalam kajian empiris yang mengetengahkan hal tersebut, keduanya perlu diberi tempat yang lebih wajar karena terdapat keterkaitan yang erat.

Disadari atau tidak, setiap saat kesenjangan antara golongan kaya dengan golongan miskin di pedesaan semakin melebar. Teknologi baru yang telah

memungkinkan terjadinya kenaikan produksi di bidang pertanian ternyata telah cenderung dinikmati oleh petani-petani kaya. Demikian juga fasilitas kredit murah yang diberikan kepada petani agar dapat menggunakan teknologi baru yang dianjurkan, hanya dapat dimanfaatkan secara lebih efisien oleh petani-petani kaya. Hal ini tentu tidak sejalan dengan tujuan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dan kemakmuran di pedesaan secara merata (Ampang, 1984).

Uraian di atas menyiratkan bahwa secara lebih luas, penduduk yang berselimutkan kemiskinan dan serba keterbelakangan sulit mengenyam layanan-layanan dan fasilitas-fasilitas yang tersedia, bahkan mereka hidup seolah-olah makin terjepit dan tertinggal karena tidak dapat menyesuaikan dengan derasnya arus pembangunan. Permasalahan yang dihadapi menjadi bertambah kompleks karena adanya berbagai sifat yang melekat pada "golongan kecil" itu sendiri. Tingkat pendapatan mereka rendah, sehingga tidak memungkinkan untuk mengadakan investasi bagi usaha-usaha yang produktif. Kurangnya pengetahuan dan pengenalan terhadap cara-cara berusaha yang berorientasi pada teknologi yang lebih maju, menyebabkan mereka kurang mampu menerapkan pola usaha yang intensif, komersial dan memerlukan modal yang besar serta menghadapi resiko pasar yang besar pula. Selain itu, adanya watak yang kurang dinamis pada diri mereka, mengakibatkan golongan ini jauh dari jangkauan pembinaan pemerintah karena seringkali malas menghadiri pertemuan atau penyuluhan yang diprakarsai pemerintah.

Upaya untuk menurunkan jumlah penduduk miskin atau bahkan berusaha menghapus kemiskinan penduduk secara total yang dilakukan pemerintah antara lain melaksanakan pembangunan di segala bidang melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan dan pembangunan yang bercerminkan keadilan sosial (Mursito, 1981). Dengan demikian, keberhasilan upaya penanggulangan kemiskinan ini tidak dapat dipisahkan dari banyaknya program kegiatan pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka strategi pembangunan yang lebih menekankan ke arah tercapainya pemerataan bagi setiap individu, membawa konsekuensi perlunya merubah dengan segera kondisi masyarakat yang pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan ke keadaan yang lebih layak serta produktif dalam kehidupan dan penghidupannya. Tertinggalnya "golongan miskin" dalam gerakan pembangunan selama ini sehingga menimbulkan ketimpangan dalam pembangunan, akan mengakibatkan jurang pemisah yang semakin melebar antara golongan kaya dan miskin.

Biro Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa secara agregat penduduk miskin mempunyai pendidikan formal yang lebih rendah, walaupun perbedaan tersebut tidak terlalu jauh. Pada tahun 2002 pendidikan formal sebagian besar kepala rumah tangga miskin di pedesaan tidak menamatkan pendidikan dasar SD (68,37 %); sebanyak 28,75 % tamat SD; 2,13 % tamat SLTP; dan kurang dari 1,0 % tamat SLTA atau di atasnya. Secara nasional pada tahun yang sama, sebaran tingkat pendidikan tenaga kerja di pertanian sebesar 59,2 % tidak tamat SD; 32,1 % tamat SD; 5,7 % tamat SLTP dan 3,1 % yang berpendidikan SLTA dan di atasnya. Barangkali rendahnya pendidikan formal menyebabkan daya kompetitif mereka di pasar tenaga kerja menjadi rendah.

Tingkat fertilitas yang tinggi mempunyai pengaruh langsung terhadap kemiskinan. Tingkat kelahiran tinggi akan meningkatkan *dependency ratio* dan juga memungkinkan ibu berada dalam kondisi kesehatan yang buruk. Pada akhirnya, keluarga seperti itu tidak mampu memberikan asuhan bagi anak-anaknya untuk dapat membawa mereka pada kondisi yang sehat fisik dan rohani. Rumah tangga miskin, baik di pedesaan maupun di perkotaan, rata-rata mempunyai anggota keluarga yang lebih besar. Di pedesaan, perbedaan rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin dan tidak miskin cukup besar, masing-masing dengan anggota 6,1 dan 4,1 jiwa. Untuk di perkotaan jumlah anggota rumah tangga miskin sebesar 5,6 jiwa dan untuk rumah tangga tidak miskin 4,5 jiwa (BPS, 2002).

Lokasi penduduk miskin atau kantong kemiskinan pada umumnya berada di daerah dengan kualitas sumber daya alam yang rendah. Pada umumnya rumah tangga miskin tidak mampu bersaing untuk menguasai sumber daya dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. Mereka akan terdesak ke lokasi dengan sumber daya alam (lahan) yang kemampuan daya dukungnya rendah. Kemampuan mereka sangat terbatas hanya pada pemanfaatan sumber daya tersebut tanpa mampu meningkatkan kelestarian produktivitasnya. Seringkali pemanfaatan lahan tersebut dilakukan dengan sangat intensif karena dorongan kebutuhan hidup yang tinggi. Hal ini mengakibatkan sumber daya lahan yang sudah marginal akan mengalami degradasi yang pesat. Keadaan ini dalam tahap berikutnya berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup di sekitarnya.

Beberapa ciri penduduk miskin seperti terurai di atas, tampak juga apabila mengamati kehidupan nelayan secara umum. Masyarakat nelayan banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tingkat kehidupan ekonomi nelayan menurut berbagai penelitian relatif paling terbelakang jika dibandingkan dengan kelompok lain (Mubyarto *et al.*, 1987). Salah satu penyebab kemiskinan tersebut adalah jumlah penduduk yang terlalu padat, contohnya kasus nelayan di Jepara yang kepadatan

penduduknya mencapai kurang lebih 768 jiwa per km persegi. Selain itu, kemiskinan nelayan juga disebabkan oleh tingkat pendidikan serta mutu sumberdaya manusia yang rendah (*unskilled labour*) berhadapan dengan sumberdaya perikanan yang bersifat *common acces* yang mengarah kepada pengurusan sumberdaya. Menurut Koentjaraningrat (1974), aspek mental juga merupakan sumber penyebab kemiskinan karena masih banyak anggota masyarakat yang sikap mentalnya tidak sejalan dengan pembangunan dalam arti upaya untuk mencapai keadaan yang lebih baik.

Jika jalan satu-satunya untuk meningkatkan produksi adalah dengan cara modernisasi alat perlengkapan dan keterampilan nelayan, maka hal ini akan berpengaruh terhadap pengadaan tenaga kerja karena penangkapan ikan secara modern akan mengurangi tenaga manusia yang sangat banyak dibandingkan dengan cara penangkapan yang sederhana (Kartidjo, 1984).

Apabila mengamati keadaan akhir-akhir ini secara selintas, didapat asumsi bahwa pemerintah kurang memperhatikan sektor perikanan rakyat, terutama setelah adanya kebijaksanaan ekspor nonmigas. Hal tersebut didasarkan atas anggapan bahwa nelayan tradisional sudah tidak mampu lagi menghasilkan komoditas untuk ekspor. Di samping itu, perhatian pemerintah lebih ditujukan kepada ekspor ikan yang dianggap bermutu dan berukuran relatif besar seperti tuna, cakalang, udang dan mutiara.

Untuk mengatasi suasana demikian, sesungguhnya sangat diharapkan adanya kegiatan penyuluhan kenelayanan ke daerah-daerah untuk meningkatkan kualitas hidup kaum nelayan. Sebaliknya, kegiatan penyuluhan hendaknya direspon baik oleh kaum nelayan apabila mereka berkeinginan untuk mengubah tingkat kesejahteraannya ke arah yang lebih baik. Dengan kata lain, jawaban dari semua ini terletak pada diri kaum nelayan itu sendiri. Sebab, apabila diamati dengan seksama, sebenarnya pemerintah telah cukup banyak memperhatikan kehidupan kaum nelayan, seperti adanya kegiatan penyuluhan kenelayanan dan didirikannya Koperasi Unit Desa (KUD). Hal semacam itu ditempuh pemerintah agar kaum nelayan mau bekerja lebih giat dan kehidupannya akan lebih baik, menuju masyarakat adil dan makmur (Entang Sastraatmadja, 1994).

Bertitik tolak dari kenyataan-kenyataan tersebut dan menyadari bahwa masih sedemikian besarnya prosentase penduduk pedesaan yang hidup dalam belenggu kemiskinan hingga tertinggal dalam arus pembangunan, maka perhatian peneliti akan dititikberatkan pada upaya mengatasi masalah kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga nelayan.

B. Perumusan Masalah

Apabila ditelusuri lebih seksama mengenai kebijaksanaan yang sekarang dikembangkan oleh pemerintah, didapat kenyataan bahwa upaya peningkatan produksi perikanan lebih diutamakan kepada pembinaan pengusaha besar di bidang perikanan untuk mengejar ekspor nonmigas dari komoditas perikanan laut. Sejak dimulainya program-program pembangunan di segala bidang, program modernisasi melalui fasilitas perkreditan bagi perikanan rakyat telah diadakan. Tetapi kebijaksanaan itu adakalanya tidak dilanjutkan karena terjadi kemacetan dalam pengembalian kredit. Walaupun motorisasi dengan motor tempel telah digalakan, tetapi kemudian motor tempel ini dianggap kurang efisien dan kurang produktif serta menyebabkan padat rangkap di perairan pantai.

Adanya program semacam itu rupanya belum dapat meningkatkan pendapatan kaum nelayan karena biaya eksploitasi yang cukup tinggi, terutama harga BBM yang telah meningkat dan tidak sepadan lagi dengan peningkatan kesejahteraan nelayan tradisional yang umumnya tinggal di pelosok-pelosok pedesaan. Ketidakepadanan tersebut terjadi terutama ketika kebijaksanaan yang diambil hanya bertumpu pada usaha meningkatkan produksi dan modernisasi industri perikanan belaka.

Prof. Mubyarto (1987) dalam salah satu penelitiannya menyatakan bahwa adanya investor asing terutama dari Jepang ternyata bisa menghasilkan metode penangkapan yang lebih efisien dan produktif, sehingga investor di sektor ini dapat menghasilkan keuntungan yang besar serta cepat. Investor asing tentu saja tidak memikirkan masalah kelestarian sumber daya laut. Kenyataan itu semakin buruk akibat adanya kebijaksanaan pemberian kredit, pendirian Tempat Pelelangan Ikan, ataupun Pusat Pendaratan Ikan. Meskipun sarana itu sempat dinikmati oleh kaum nelayan, tetapi orientasinya lebih tertuju pada peningkatan hasil ikan. Dampak dari kebijaksanaan itu ternyata hampir semua nelayan mengeluh karena berebut ikan dengan armada penangkapan ikan luar negeri atau penanaman modal asing.

Dengan prasarana yang terbatas, nelayan tradisional cenderung menghindari apabila bertemu dengan armada-armada kapal besar milik penanam modal asing di wilayah perairan Indonesia, sehingga seringkali terlihat nelayan tradisional terpaksa menangkap ikan di laut lepas. Sedangkan kapal-kapal besar itu menangkap ikan di perairan dalam. Kondisi tersebut tentu saja menjadikan kehidupan kaum nelayan tradisional kita semakin memprihatinkan (Entang Sastraatmadja, 1994).

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa adanya modal asing tidak selamanya membawa dampak positif karena kadang-kadang juga berdampak negatif. Nelayan lokal tetap menderita dan tingkat kesejahteraan hidupnya tidak beranjak

menjadi lebih baik. Walaupun perhatian pemerintah cukup besar terhadap kaum nelayan, namun perlu juga diatur mengenai kehidupan di dunia perikanan, terutama agar tidak terjadi penindasan terhadap kaum nelayan yang membuatnya semakin terpuruk dalam belenggu kemiskinan.

Berdasarkan latar belakang penelitian dan uraian permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Usaha apa saja yang dilakukan nelayan agar dapat menambah pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya ?
2. Apa dan bagaimana tantangan yang dihadapi, kendala yang harus diatasi dan peluang yang harus dimanfaatkan oleh nelayan untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan ?
3. Apakah ada hubungan yang erat dari munculnya gejala ketidakmerataan pembangunan dengan kemiskinan di pedesaan ?

Permasalahan tersebut dikemukakan karena pembangunan di Indonesia bertujuan untuk mensejahterakan bangsa Indonesia, atau dengan kata lain untuk menanggulangi kemiskinan. Permasalahannya, selain banyak alternatif untuk melaksanakan pembangunan dan belum diketahui alternatif mana yang terbaik, gerak masyarakat juga berangkat dari titik tolak yang berbeda, karena itu memiliki kesempatan, kendala dan sumber daya yang berbeda pula. Akibatnya kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan juga berbeda-beda.

Seringkali terjadi, sebagai akibat dari karakteristik interdependensi antar individu dalam masyarakat, segolongan masyarakat meningkat kesejahteraaannya dengan cukup pesat, tetapi segolongan lain tingkat kesejahteraaannya menurun. Di sinilah letak permasalahannya, yaitu bahwa kesejahteraan (*welfare*) tidak selalu sejalan dengan pemerataan (*equality*). Di samping itu masalah kemiskinan juga sarat akan nilai-nilai lain yang sangat mendasar. Teratasinya kemiskinan berarti meningkatkan kemerdekaan (*freedom*) bagi subyek yang dibicarakan, yaitu semakin banyak kesempatan yang dapat dipilih oleh subyek tersebut. Dapat diatasi kemiskinan juga berarti bahwa, keadilan (*justice*) dan *fairness* telah berjalan, mengingat hanya dengan landasan argumen inilah kebijakan redistribusi sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dapat diterima.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Selaras dengan permasalahan yang dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tingkat kesejahteraan keluarga nelayan serta mencari upaya untuk menanggulangi kemiskinan yang selama ini membelenggu kehidupannya. Sasaran utama penelitian adalah menelaah usaha yang dilakukan

nelayan agar dapat menambah pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya, serta mengenali tantangan yang dihadapi, kendala yang harus diatasi dan peluang yang sebaiknya dimanfaatkan oleh nelayan untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinannya. Penelitian ini ditujukan pula untuk menelaah apakah ada hubungan yang erat dari munculnya gejala ketidakmerataan pembangunan dengan kemiskinan di pedesaan.

Hasil penelitian diharapkan mempunyai beberapa kegunaan, antara lain : bertambahnya referensi atau pengetahuan mengenai masyarakat dan kebudayaan nelayan sebagai bahan informasi bagi penelitian-penelitian serupa, serta merupakan informasi bagi pembuat kebijakan dalam menanggulangi kemiskinan, khususnya kemiskinan yang membelenggu nelayan. Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat diterima sebagai sumbangan pemikiran untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi penentu kebijaksanaan dalam pembangunan, khususnya pembangunan pedesaan.

D. Pendekatan Teoritis

Kemiskinan lazimnya dilukiskan sebagai keadaan tidak dapat dipenuhinya kebutuhan minimal oleh seseorang atau keluarga untuk hidup layak akibat kurangnya pendapatan yang mereka terima. Kebutuhan minimal untuk hidup yang layak ialah terpenuhinya sandang, pangan, perumahan dan kebutuhan pokok lain yang standar (Emil Salim, 1984). Keadaan ini dikenal sebagai kemiskinan absolut dan biasanya didefinisikan dalam tingkat pendapatan tertentu baik dalam nilai rupiah maupun dalam kebutuhan pangan pokok.

Ada beberapa pendekatan untuk mengukur kemiskinan, antara lain yang dikemukakan oleh Sayogyo (1977), yaitu pendekatan pendapatan per kapita per tahun yang dinyatakan dalam jumlah setara beras. Dari batasan yang diambil, dikemukakan tiga ukuran kemiskinan, yaitu : miskin, sangat miskin dan melarat dengan ukuran 420 kg, 360 kg dan 270 kg setara beras per kapita per tahun untuk daerah perkotaan, dan 320 kg, 240 kg dan 180 kg setara beras per kapita per tahun untuk daerah pedesaan. Beras dinilai berdasarkan harga pasar setempat.

Besarnya persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, selain tergantung kepada pendapatan per kapita per tahun, juga tergantung kepada corak distribusi pendapatannya. Makin tidak merata distribusinya, makin besar persentase penduduk yang pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan.

Selanjutnya menurut Ahluwalia dalam Sadono Soekirno (1982), keadaan distribusi pendapatan suatu masyarakat dapat dibedakan atas distribusi pendapatan

relatif dan distribusi pendapatan mutlak. Yang dimaksud dengan distribusi pendapatan relatif adalah perbandingan jumlah pendapatan yang diterima oleh berbagai golongan penerima pendapatan, penggolongan ini didasarkan kepada besarnya pendapatan yang mereka terima. Ahluwalia menggolongkan penerima-penerima pendapatan dalam tiga golongan, yaitu : 40 persen penduduk mempunyai pendapatan relatif rendah, 40 persen penduduk berpendapatan menengah dan 20 persen penduduk berpendapatan relatif tinggi. Tingkat ketimpangan pendapatan diukur berdasarkan besarnya bagian pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk yang menerima pendapatan paling rendah. Apabila golongan ini menerima 17 persen atau lebih dari seluruh pendapatan masyarakat maka tingkat ketimpangan pembagian pendapatan tergolong rendah, jika bagian pendapatan terletak antara 12 - 17 persen maka termasuk dalam tingkat ketimpangan pembagian pendapatan sedang, sedangkan tingkat ketimpangan pembagian pendapatan tinggi terjadi apabila seluruh pendapatan masyarakat yang diterima golongan ini kurang dari 12 persen. Adapun yang dimaksud dengan distribusi pendapatan mutlak adalah persentase jumlah penduduk yang pendapatannya mencapai suatu tingkat pendapatan tertentu atau kurang daripadanya. Keadaan distribusi pendapatan mutlak ditunjukkan oleh banyaknya jumlah penduduk yang menerima pendapatan di bawah garis kemiskinan.

Menurut Sinaga dan White yang dikutip oleh Abunawan Mintoro *dalam* Faisal Kasryno (1984), ada dua macam kemiskinan di pedesaan, yaitu kemiskinan alamiah dan kemiskinan struktural. Kemiskinan alamiah terjadi akibat langkanya sumber daya disertai pula rendahnya tingkat perkembangan teknologi hingga mengakibatkan rendahnya produktivitas. Sedangkan kemiskinan struktural terjadi karena kelembagaan yang membuat sekelompok masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas yang ada secara merata. Sebagian anggota masyarakat akan tetap miskin walaupun sebenarnya total produksi yang dihasilkan oleh masyarakat bila dibagi rata dapat membebaskan semua anggota masyarakat dari kemiskinan. Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan yang ada akan menyebabkan terjadinya kemiskinan.

Emil Salim (1984), mengemukakan bahwa mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : sedikit atau tidak memiliki faktor produksi sendiri, pendapatan rendah, tidak ada modal, tingkat pendidikan rendah, tinggal di pedesaan, dan umumnya mempunyai watak belum dinamis.

Berdasarkan ciri-ciri tersebut dapat dikatakan bahwa pada umumnya penduduk pedesaan hidup dalam belunggu kemiskinan dengan pertanian dan perikanan sebagai basis ekonomi. Dengan demikian, strategi pembangunan pedesaan selayaknya diarahkan kepada penghapusan kemiskinan absolut melalui peningkatan kehidupan ekonomi dan sosial dari kelompok miskin di pedesaan khususnya kelompok petani kecil dan nelayan.

Yaumil C. Agoes Achir *dalam* Prisma (1994 : 3 - 9), mengungkapkan bahwa sehubungan dengan penduduk miskin ini, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mengurangi jumlah penduduk miskin atau mengurangi derajat kemiskinan tadi, begitu rupa sehingga dari segi kualitas, penduduk tetap merupakan sumber daya manusia yang handal.

Keluarga akan merupakan suatu unit terkecil dalam masyarakat yang bukan hanya berfungsi sosial budaya, tetapi juga berfungsi ekonomis. Tekanan fungsi keluarga secara tradisional adalah pada fungsi reproduktif (yang dari generasi ke generasi terus menerus mengulangi fungsi yang sama), kemudian berkembang ke fungsi sosial budaya, namun belakangan ini keluarga diandalkan untuk suatu tugas yang lebih luhur yaitu sebagai wahana mencapai tujuan pembangunan. Hal ini menyebabkan keluarga perlu mempersiapkan diri dalam keterlibatannya sebagai agen pembangunan di sektor ekonomis produktif.

Dengan lahirnya undang-undang No. 10 tahun 1992 maka menjadi semakin luaslah tanggung jawab keluarga dalam mensukseskan pembangunan, baik dalam fungsi reproduktifnya, sosial-budaya, dan fungsi ekonomis produktif.

Undang-undang No. 10 tahun 1992 menyatakan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-isteri, atau suami-isteri dengan anaknya, atau ayah dengan anaknya, atau ibu dengan anaknya. Sedangkan Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Mengenai keluarga sejahtera, GBHN telah memberi petunjuk bahwa pembangunan keluarga sejahtera diarahkan pada terwujudnya kehidupan keluarga sebagai wahana persemaian nilai-nilai agama dan nilai luhur budaya bangsa guna meningkatkan kesejahteraan keluarga dan membina ketahanan keluarga agar mampu mendukung kegiatan pembangunan.

Besarnya upaya pemerintah dalam mengentaskan keluarga miskin dari ketertinggalannya dengan dimulainya Inpres Desa Tertinggal beberapa tahun yang silam, adalah peluang yang sangat berarti bagi keluarga untuk menjadi lebih sejahtera. Dimulainya pemetaan dan pendataan Keluarga Sejahtera oleh Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN pada waktu itu, telah menjadi tonggak sejarah dimulainya program pembangunan Keluarga Sejahtera di Indonesia.

Instrumen pemetaan dan pendataan Keluarga Sejahtera merupakan produk kesepakatan para pakar sosiologi (tergabung dalam Ikatan Sosiolog Indonesia) di bawah pimpinan Prof. Dr. Selo Soemardjan bersama unit terkait, yang pada tahun

1992 telah berhasil menjabarkan kriteria Keluarga Sejahtera melalui pendekatan kebutuhan. Kebutuhan keluarga dapat dikelompokkan menjadi kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis dan kebutuhan pengembangan.

Berdasarkan instrumen pemetaan dan pendataan Keluarga Sejahtera tersebut, dapat ditetapkan tingkat kesejahteraan keluarga-keluarga di Indonesia. Dari segi tahapan pencapaian tingkat kesejahteraannya, keluarga-keluarga di Indonesia dikelompokkan dalam 5 tahapan :

1. Keluarga Pra Sejahtera yaitu yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal yaitu sandang, pangan, papan dan kesehatan.
2. Keluarga Sejahtera Tahap I yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal tetapi belum memenuhi kebutuhan psikologis dan sosial.
3. Keluarga Sejahtera Tahap II yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar, psikologis dan sosial tetapi belum mampu mengembangkan keluarga itu seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi.
4. Keluarga Sejahtera Tahap III yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis dan kebutuhan pengembangannya, namun belum dapat memberikan sumbangan (kontribusi) yang maksimal terhadap masyarakat, seperti secara teratur memberikan sumbangan dalam bentuk material dan keuangan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan serta berperan serta secara aktif dengan menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan atau yayasan-yayasan sosial, keagamaan, kesenian, olah raga, pendidikan dan sebagainya.
5. Keluarga Sejahtera Tahap III Plus yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhannya, baik yang bersifat dasar, sosial psikologis maupun yang bersifat pengembangan serta telah dapat pula memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Hasil pemetaan dan pendataan keluarga sejahtera berdasarkan kriteria di atas, kemudian dapat digunakan untuk menentukan langkah-langkah mengentaskan keluarga dari ketertinggalannya sesuai dengan tahapan pencapaian tingkat kesejahteraannya.

E. Kerangka Pemikiran

Rendahnya produktivitas petani kecil dan nelayan antara lain disebabkan oleh pengetahuan/keterampilan yang rendah dan penggunaan teknologi/peralatan yang terbatas. Produktivitas yang rendah dan luas lahan garapan yang sempit,

akan menyebabkan produksi rendah dan pendapatan yang diperoleh kecil. Hal ini berarti kemungkinan untuk menanamkan investasi dan tabungan menjadi terbatas, sehingga kemungkinan untuk menguasai lahan garapan yang lebih besar serta kemampuan untuk menggunakan teknologi dan peralatan yang efisien relatif kecil. Di samping itu, kesempatan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan tidak ada, karena petani dan nelayan disibukkan dengan usaha menambah pendapatan serta ketiadaan biaya untuk pendidikan. Kondisi ini dikenal sebagai “lingkaran setan” dan keadaan akan berputar terus seperti semula, sehingga untuk meningkatkan kesejahteraan petani kecil dan nelayan harus dilakukan pendekatan terhadap masing-masing unsur di atas.

Menurut Mubyarto *et. al.* (1987), para nelayan Indonesia pada umumnya merupakan golongan terendah pendapatannya. Pendapatan yang terendah itu terutama disebabkan produksi yang dihasilkan memang rendah. Produksi yang rendah disebabkan oleh terlalu banyaknya nelayan sehingga hasil tangkapan rata-rata rendah.

Pendapatan rendah, teknologi tradisional dan peralatan terbatas, kelihatannya merupakan unsur-unsur yang tidak berdiri sendiri tetapi merupakan unsur yang kait-mengait dan memberi kesan menjadi lingkaran tidak berujung dan tidak berpangkal dalam bentuk diagram lingkaran kemiskinan di negara-negara sedang berkembang yang identik dengan masalah-masalah yang sedang dihadapi nelayan miskin.

Produktivitas tenaga kerja keluarga yang rendah antara lain disebabkan usaha perikanan tangkapan dipengaruhi oleh cuaca dan musim yang selanjutnya menimbulkan pengangguran musiman. Kecilnya usaha perikanan tangkapan menimbulkan pengangguran tidak kentara. Terbatasnya keterampilan khusus dan peralatan yang diperlukan untuk memanfaatkan tenaga kerja keluarga pada waktu senggang, mengindikasikan produktivitas tenaga keluarga yang rendah. Akibatnya, pendapatan rumah tangga nelayan miskin akan tetap rendah (Mubyarto *et al.*, 1987).

F. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini pada dasarnya adalah untuk memperoleh data yang lengkap dan menyeluruh, yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan terintegrasi. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan tersebut di atas, maka digunakan *metode survai* yang diperlukan untuk mengungkapkan fakta-fakta berdasarkan fenomena-fenomena sosial yang timbul dalam kehidupan masyarakat yang menjadi objek penelitian, yang selanjutnya diformulasikan dan dideskripsikan. Dengan demikian, akan dapat digambarkan struktur dan dinamika sosial, khususnya yang berhubungan dengan tingkat kesejahteraan keluarga nelayan yang menjadi sasaran penelitian.

Di samping itu, sesuai dengan segi permasalahan penelitian, maka digunakan juga *metode deskriptif*, karena masalah yang diteliti adalah masalah yang sedang berlaku dalam kehidupan masyarakat dengan mencari dan mengumpulkan data seluas-luasnya dalam rangka mempelajari kondisi-kondisi sosial yang berhubungan dengan objek penelitian.

Sehubungan dengan pengambilan lokasi penelitian, dasarnya adalah *studi kasus* dengan maksud mempertahankan objek penelitian sehingga data yang diperoleh di samping utuh dan lengkap, juga akan merupakan satu kesatuan yang terintegrasi. Sampel dan lokasi penelitian ditentukan setelah mengadakan pembicaraan dengan Bappeda Propinsi Banten dan melalui pengamatan pra penelitian untuk mengetahui kantong-kantong kemiskinan. Dari hasil pembicaraan, dipilih sebuah desa yang memiliki daerah pantai, yaitu Desa Surya Bahari Kecamatan Pakuhaji Kabupatren Tangerang. Pemilihan lokasi penelitian terutama didasarkan atas pertimbangan : desa sampel merupakan desa pantai dengan usaha perikanan tangkapan sebagai usaha yang dominan, desa sampel termasuk dalam daftar desa tertinggal, di daerah tersebut masih banyak terlihat rumah tangga miskin yang ditandai oleh keadaan perumahan yang buruk dari segi kualitas maupun kuantitas, dan dianggap selaras dengan tujuan penelitian.

Responden ditentukan secara *purposif*, yaitu berdasarkan pertimbangan atau penilaian peneliti. Walaupun demikian, penilaian dan pertimbangan peneliti tidak lepas dari saran, pengetahuan, dan informasi yang diberikan tokoh-tokoh masyarakat, baik tokoh formal maupun tokoh informal. Dengan demikian, responden ditentukan dengan berantai dari responden yang ditunjuk oleh tokoh masyarakat ke responden lain yang ditunjuk oleh responden pertama yang telah diwawancarai. Cara demikian disebut *snowball sampling technique* (Bagdan & Bilken, 1986 : 66). Dengan cara tersebut, maka dipilih 50 responden dengan harapan representatif untuk populasi dan dapat memenuhi tujuan penelitian.

Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder diambil dari instansi-instansi terkait di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Selain itu data sekunder diambil juga dari pustaka-pustaka yang berkaitan dengan praktek lapangan (*studi pustaka*), dengan mempelajari arsip-arsip, statistik, literatur, dan laporan survey terdahulu yang menunjang pelaksanaan penelitian. Data primer diperoleh dari *wawancara terarah* dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan wawancara bebas yang mendalam. Untuk melengkapi data primer ini, dilakukan juga wawancara dengan berbagai informan, seperti aparat pemerintahan desa, pemuka masyarakat dan orang-orang yang dituakan. Teknik pengumpulan data lain yang digunakan adalah *observasi* terhadap faktor-faktor fisik-geografis, sosiografis, sosio-ekonomi, dan sosio-kultural yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari, pekerjaan dan tingkat penghasilan penduduk.

Data dan informasi yang diperoleh, dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan membuat tabulasi dan persentase. Dari angka-angka kuantitatif tersebut, ditunjang dengan data kualitatif yang diperoleh, kemudian ditarik kesimpulan umum dan dinyatakan secara deskriptif.

G. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan selama empat bulan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- *Tahap Pertama* : persiapan penelitian, menyusun desain penelitian, daftar pertanyaan, dan tertib administrasi.
- *Tahap Kedua* : observasi dan try-out, pengumpulan data / penelitian lapangan, dan melengkapi data lapangan.
- *Tahap Ketiga* : menyusun laporan sementara, seminar, revisi laporan, dan menyusun laporan akhir.

H. Sistematika Penulisan

Laporan penelitian disusun dengan tata urutan sebagai berikut :

Pada awal laporan diuraikan terlebih dahulu : kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Pada bab I (Pendahuluan), diuraikan : latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, pendekatan teoritis, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, waktu penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II (Gambaran Umum Daerah Penelitian), diisi dengan paparan sekilas mengenai Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang Propinsi Banten dan lokasi penelitian, yaitu Desa Surya Bahari, sebuah desa nelayan di pesisir Kabupaten Tangerang.

Bab III (Tingkat Kesejahteraan Keluarga Nelayan), merupakan hasil penelitian sekaligus dengan pembahasannya, meliputi : identitas responden, kehidupan nelayan, kondisi perumahan, religi dan sistem pengetahuan, pola kerja dan pendapatan, hambatan dan usaha peningkatan kesejahteraan, dan pentahapan kesejahteraan keluarga nelayan berdasarkan instrumen pendataan dari BKKBN.

Bab IV (Kesimpulan, Implikasi dan Saran-saran), merupakan kristalisasi hasil penelitian yang dilengkapi beberapa saran dan implikasi lebih lanjut dari hasil penelitian berupa ajuan solusi peningkatan kesejahteraan keluarga nelayan.

Akhir laporan dilengkapi dengan daftar pustaka, daftar informan, dan lampiran-lampiran.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Lokasi penelitian mengenai *Tingkat Kesejahteraan Keluarga Nelayan* ini, terletak di pesisir utara Kabupaten Tangerang, tepatnya di Desa Surya Bahari Kecamatan Pakuhaji. Kecamatan Pakuhaji merupakan salah satu di antara 26 kecamatan yang ada di wilayah pemerintahan Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten. Letaknya sekitar 16 Km dari ibukota kabupaten dengan ketinggian rata-rata 5 m di atas permukaan laut dan memiliki wilayah administratif seluas 5.861 Ha.

Jalan-jalan yang ada di kecamatan ini telah diaspal, tetapi kondisinya relatif rusak. Ketika musim kemarau, jalan-jalan tersebut berdebu dan lubang-lubang yang cukup dalam di beberapa ruas jalan sangat mengganggu kenyamanan perjalanan. Pada musim penghujan, lubang-lubang dipenuhi air dan permukaan jalan menjadi licin karena aspalnya telah mengelupas. Hal tersebut seringkali menyebabkan macet / terhambatnya arus lalu lintas karena berupaya menghindari kerusakan. Walaupun demikian, mobilitas penduduk Kecamatan Pakuhaji dapat dikatakan relatif tinggi karena didukung sarana transportasi yang relatif layak. Sarana angkutan lokal yang tersedia antara lain 5.630 sepeda motor, 2.000 sepeda, 170 perahu motor, 80 mobil pribadi, dan 54 bus umum.

Di kecamatan ini terdapat 14 desa dengan 65 lingkungan / dusun, 165 Rukun Warga (RW), 247 Rukun Tetangga (RT) dan memiliki sarana perekonomian berupa 6 koperasi (2 koperasi simpan pinjam, 4 KUD), 3 pasar umum dan 1 pasar ikan, serta 750 toko/kios/warung. Di bidang pendidikan, terdapat sarana pendukung berupa 2 Taman Kanak-kanak, 36 Sekolah Dasar Negeri, 23 Sekolah Dasar Inpres, 15 Madrasah Ibtidaiyah Negeri, 2 SMP Negeri, 2 SMTP Swasta Umum, dan 2 SMTP Swasta Islam. Di bidang kesehatan, terdapat 5 poliklinik / balai pengobatan, 1 Puskesmas, 1 Puskesmas Pembantu, seorang dokter umum, 42 dukun bayi, sebuah apotik, 2 pos / klinik KB, dan 77 Posyandu.

Penduduk Kecamatan Pakuhaji tercatat sebanyak 73.438 orang (laki-laki = 36.851 dan perempuan = 36.587) dengan 18.854 Kepala Keluarga. Sebagian besar penduduk beragama Islam (71.684 orang), 747 orang menganut agama Protestan, dan 7 warga beragama Budha. Adapun sarana / tempat ibadah yang tersedia adalah 60 mesjid dan 210 surau.

Dilihat dari mata pencahariannya, sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani. Kemudian berturut-turut dari jumlah terbesar kedua adalah pedagang, nelayan, buruh industri, peternak (kerbau, kambing, ayam dan itik), Pegawai Negeri Sipil, pengrajin / industri kecil, pensiunan, TNI, dan pengusaha berskala sedang.

Pendidikan penduduk dapat dikatakan relatif bagus. Banyak penduduk yang telah mengenyam pendidikan setingkat Perguruan Tinggi. Walaupun demikian, dari data yang tercantum pada buku *Data Monografi Kecamatan*, diperoleh kenyataan terdapatnya penduduk yang tidak sekolah / tidak tamat sekolah dan buta huruf.

Sebagian besar penduduk telah memanfaatkan fasilitas listrik PLN untuk penerangan rumahnya. Sumber air bersih yang digunakan adalah sumur gali dan pompa. Untuk MCK. Banyak juga penduduk yang memanfaatkan air sungai atau kolam. Dilihat dari kondisi bangunannya, masih banyak terdapat rumah bertipe C (non permanen), yaitu sekitar 7.434 rumah. Adapun rumah penduduk lainnya adalah 3.785 bertipe A dan 4.215 bertipe B (semi permanen).

Seperti telah diungkapkan di muka, di kecamatan ini terdapat 14 desa. Empat di antaranya merupakan desa pantai, yaitu Desa Surya Bahari, Desa Sukawali, Desa Kramat, dan Desa Kahad. Dari ke-4 desa tersebut, peneliti memilih Desa Surya Bahari sebagai lokasi penelitian.

Berikut ini akan diuraikan relatif lengkap mengenai gambaran Desa Surya Bahari, meliputi letak, tata guna lahan, dan keadaan alam; kependudukan; pola permukiman; pranata kemasyarakatan; dan sistem teknologi.

A. Letak, Tata Guna Lahan, dan Keadaan Alam

Desa Surya Bahari adalah salah satu di antara 14 desa yang terdapat di wilayah pemerintahan Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten. Desa ini terletak di bagian utara wilayah Kecamatan Pakuhaji dan berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Desa ini merupakan sebuah desa nelayan. Artinya,

desa yang sebagian besar penduduknya mengandalkan hidup dari menangkap ikan di laut atau bermata-pencaharian sebagai nelayan. Adapun batas-batas daerah Desa Surya Bahari adalah dengan Laut Jawa di sebelah utara, dengan Desa Buaran Mangga di sebelah selatan, dengan Desa Sukawali di sebelah timur, dan dengan Desa Karang Serang di sebelah barat.



Photo 2.1 Kantor Desa Surya Bahari

Jarak orbitrasi Desa Surya Bahari terhadap pusat-pusat pemerintahan adalah sebagai berikut :

- a. dengan ibukota kecamatan berjarak kurang lebih 6 kilometer,
- b. dengan ibukota kabupaten berjarak kurang lebih 30 kilometer, dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor sekitar 60 menit,
- c. dengan ibukota Propinsi Banten, Rangkasbitung, berjarak kurang lebih 60 kilometer, dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor sekitar 1,5 jam,
- d. dengan ibukota negara Indonesia, Jakarta, berjarak kurang lebih 55 kilometer, dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor sekitar 70 menit, dan
- e. dengan desa-desa sekitarnya yang berbatasan langsung berjarak antara 2 - 10 kilometer (dari pusat pemerintahan desa ke pusat pemerintahan desa).



Photo 2.2 Perahu-perahu nelayan yang terlihat di jalan menuju Desa Surya Bahari

Untuk menuju desa ini, dari kota Tangerang dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan umum berupa mobil Elf jurusan Pakuhaji. Perjalanan selanjutnya dilakukan dengan angkutan pedesaan ke pusat desa yang berjarak sekitar 6 Km dari kantor kecamatan. Jalan desa berada di pinggir Sungai Cituis. Beberapa kilometer menjelang mulut sungai / muara, terlihat kapal-kapal nelayan yang berlabuh di dermaga sepanjang pinggir sungai serta tercium bau amis karena di sisi kiri dan kanan jalan biasa dipergunakan sebagai tempat berjualan ikan oleh ibu-ibu nelayan setempat. Di samping itu, hampir di setiap sudut permukiman tampak jemuran ikan asin.



Photo 2.3 Jemuran ikan asin

Luas wilayah Desa Surya Bahari adalah 252 Ha. Penggunaan lahan lebih banyak dipergunakan sebagai lahan produksi seluas 237,3 hektar, terdiri atas tambak 23 Ha dan pesawahan 214,3 Ha. Sekitar 13,5 Ha dari luas lahan digunakan untuk permukiman atau perumahan penduduk, kuburan, lapangan olahraga dan tanah wakaf (Tabel 2.1).

Tabel 2.1
Penggunaan Lahan Di Desa Surya Bahari

No.	Penggunaan	Luas	
		Ha	%
1.	Permukiman/perumahan	13	5,27
2.	Perkantoran	0,19	0,08
3.	Lapangan olahraga	0,51	0,20
4.	Kuburan	0,3	0,12
5.	Tanah wakaf	0,4	0,16
6.	Pesawahan	214,3	85,04
7.	Tambak/empang	23	9,13
Jumlah		252	100,00

Sumber : Monografi Desa Surya Bahari, 2002

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa sebagian besar lahan di Desa Surya Bahari berupa pesawahan dan tambak. Alokasi lahan tambak seluas 23 hektar atau sekitar 9,13 % dari luas keseluruhan lahan yang ada. Luasnya lahan tambak dapat menunjukkan besarnya keuntungan yang diraih dari usaha ini. Akan tetapi usaha tambak ternyata kurang memberi sumbangan berarti bagi peningkatan taraf hidup masyarakat setempat karena tambak-tambak tersebut umumnya dimiliki orang-orang luar Desa Surya Bahari, terutama para pengusaha dari Jakarta. Keikutsertaan masyarakat setempat terbatas sebagai pekerja/kuli pada saat panen dan itupun dalam jumlah yang sangat terbatas.

Lahan pesawahan seluas 214,3 Ha atau sekitar 85,04 % dari seluruh lahan desa, terdiri atas sawah dengan irigasi teknis seluas 200,3 Ha (79,48 %), sawah dengan irigasi ½ teknis seluas 10 Ha (3,97 %), sawah dengan pengairan sederhana seluas 2 Ha (0,79 %), dan sawah tadah hujan seluas 2 Ha (0,79 %).

Desa Surya Bahari berada pada ketinggian antara setengah meter sampai lima meter di atas permukaan air laut, dengan bentuk relief permukaan tanah dataran rendah/pantai. Bagian selatan desa relatif lebih tinggi daripada bagian sebelah utara. Bagian utara desa merupakan daerah pesisir Laut Jawa dan sebagian besar dimanfaatkan menjadi tambak.

Keadaan alam pantai sangat berpengaruh terhadap keadaan cuaca, curah hujan, dan sirkulasi udara. Keadaan suhu di Desa Surya Bahari umumnya berada pada rata-rata 27° Celcius dengan kelembaban rata-rata antara 78 % - 84 %. Jumlah curah hujan rata-rata 200 mm pertahun.

B. Kependudukan

Pemerintahan Desa Surya Bahari meliputi 3 Dusun / 3 Rukun Warga (RW) yang membawahi 13 Rukun Tetangga (RT). Pada "Potensi Desa Surya Bahari Tahun 2002", penduduk Desa Surya Bahari berjumlah 4.661 jiwa, terdiri atas laki-laki sebanyak 2.456 jiwa dan perempuan sebanyak 2.005 jiwa dengan kepala keluarga berjumlah 981 orang. Setiap keluarga rata-rata terdiri atas 5 anggota termasuk kepala keluarganya. Andaikan ke-981 orang itu merupakan kepala keluarga batih dengan pasangan suami istri lengkap, maka tiap keluarga rata-rata mempunyai 4 orang anak.

Tabel 2.2 menunjukkan jumlah penduduk muda (0 - 14 tahun) relatif berjumlah besar, yaitu sekitar 24,76 % dari seluruh jumlah penduduk desa. Apabila kelompok usia muda itu dibina dan dikembangkan secara intensif, maka diharapkan akan menjadi sumber dan potensial sebagai tenaga kerja.

Berdasarkan struktur umur, penduduk Desa Surya Bahari dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu :

- a. Golongan muda atau golongan usia belum produktif (0 - 14 tahun) sebanyak 24,76 %.
- b. Golongan produktif kerja (14 - 54 tahun) sebanyak 71,01 %.
- c. Golongan tua atau golongan yang kurang/tidak produktif kerja (55 tahun ke atas) sebanyak 4,23 %.

Tabel 2.2
Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Usia
di Desa Surya Bahari

U s i a	J u m l a h	
	Orang	%
00 - 04	418	8,97
05 - 09	268	5,75
10 - 14	468	10,04
15 - 19	398	8,54
20 - 24	393	8,43
25 - 29	318	6,82
30 - 34	443	9,50
35 - 39	593	12,72
40 - 44	618	13,26
45 - 49	329	7,06
50 - 54	218	4,68
55 ke atas	197	4,23
Jumlah	4661	100,00

Sumber : Monografi Desa Surya Bahari, 2002

Golongan muda dan golongan tua adalah golongan yang tidak produktif atau golongan “tergantung”. Golongan penduduk ini secara potensi dipandang sebagai bagian penduduk yang tidak aktif secara ekonomi. Penghidupan mereka bergantung kepada penduduk produktif kerja.

Penduduk Desa Surya Bahari yang termasuk penduduk produktif terdapat sebanyak 71,01 % atau 3.310 orang. Akan tetapi, apabila penentuan usia produktif dihitung dari usia 10 sampai 56 tahun, —karena berdasarkan kenyataan yang umum terjadi pada masyarakat nelayan (pedesaan), anak usia 10 tahun telah membantu pekerjaan orang tua— maka penduduk usia produktif terdapat sebanyak 81,05 % atau 3.778 orang. Sementara itu, penduduk usia nonproduktif terdapat sebanyak 18,95 % atau 883 orang, terdiri atas penduduk muda (0 - 9 tahun) sebanyak 14,72 % atau 686 orang dan penduduk tua (55 tahun ke atas) sebanyak 4,23 % atau 197 orang.

Apabila semua penduduk usia produktif kerja, baik laki-laki maupun perempuan memiliki mata pencaharian dengan penghasilan tetap, maka secara

kasar perbandingan antara penduduk produktif kerja dengan penduduk usia nonproduktif kerja menunjukkan angka 4,28 : 1. Berarti, rata-rata 4 - 5 orang penduduk produktif kerja menanggung beban hidup diri mereka sendiri ditambah dengan satu orang yang nonproduktif kerja. Dalam kenyataan, sesuai data dari "Monografi Desa Surya Bahari, 2002", kelompok penduduk usia tua (55 tahun ke atas) juga tercatat memiliki mata pencaharian. Hanya penduduk nonproduktif muda (0 - 9 tahun) yaitu sekitar 14,72 % atau 686 jiwa yang tidak atau belum bekerja. Jika data ini benar, secara matematis tingkat ketergantungan hidup relatif kecil karena setiap 4 - 5 penduduk yang bermatapencaharian itu hanya mempunyai beban tanggungan mengurus satu orang penduduk nonproduktif muda. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa masyarakat Desa Surya Bahari dianggap mempunyai tingkat kehidupan yang relatif baik. Namun, pada kenyataannya, mereka masih berada pada tingkat perekonomian yang memprihatinkan dan termasuk dalam kelompok masyarakat miskin (keluarga pra sejahtera).

Tabel 2.2 di atas, menunjukkan jumlah penduduk tua (55 tahun ke atas) relatif besar. Hampir semua penduduk kelompok ini masih bekerja sebagai nelayan. Hal ini berpengaruh terhadap pewarisan kebudayaan yang berkaitan dengan pekerjaan nelayan. Tersirat bahwa kondisi tersebut akan menyebabkan kebudayaan nelayan dapat lestari. Golongan tua mempunyai posisi penting dalam kehidupan bermasyarakat. Pengaruh "ketuaan", yang dianggap telah banyak makan "asam garam" kehidupan, menyebabkan segala ucapan dan nasihatnya mengenai kehidupan akan dapat dipercaya dan diyakini kebenarannya. Keadaan ini ditunjang pula dengan tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah.

Pendidikan sebagai satu sarana untuk meningkatkan wawasan pengetahuan, relatif kurang dapat dilaksanakan oleh masyarakat Desa Surya Bahari. Tingkat pendidikan masyarakat hanya setingkat sekolah dasar dan bahkan banyak yang putus sekolah dasar. Hal ini akibat keadaan mereka yang miskin, sehingga seakan-akan mereka kurang perhatian terhadap pendidikan anak. Mereka lebih banyak memfokuskan kehidupan pada kegiatan yang dapat menghasilkan uang.

Menurut Kepala Desa Surya Bahari, dewasa ini kesadaran masyarakat terhadap pendidikan anak mulai meningkat seiring dengan kemajuan pembangunan, informasi, dan peningkatan tuntutan kebutuhan. Peningkatan kesadaran terhadap pendidikan tampak dari meningkatnya jumlah anak yang melanjutkan pendidikan.

Tabel 2.3
Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
Di Desa Surya Bahari

No.	Pendidikan	Jumlah	
		Orang	%
1.	Belum Sekolah	443	9,50
2.	Taman Kanak-kanak	25	15,56
3.	Tidak Tamat SD	725	0,54
4.	Sekolah Dasar	1.865	40,01
5.	SLTP	912	19,57
6.	SLTA	477	10,23
7.	Akademi	11	0,24
8.	Sarjana	3	0,06
9.	Buta Huruf	200	4,29
Jumlah		4661	100,00

Sumber : Monografi Desa Surya Bahari, 2002

Data pada tabel 2.3 menyiratkan adanya peningkatan kesadaran orang tua terhadap pendidikan anak, terbukti dengan makin banyak anak yang mengikuti pendidikan pra sekolah atau taman kanak-kanak. Pada tabel di atas, terdapat 25 anak yang mengikuti pendidikan taman kanak-kanak di Desa Surya Bahari.

Penduduk yang tidak sekolah, bukan berarti tidak mengikuti pendidikan. Sebagian penduduk menempuh pendidikan luar sekolah, seperti pesantren, madrasah, dan kursus keterampilan. Penduduk yang mengikuti pendidikan pesantren sebanyak 30 orang dan madrasah sebanyak 100 orang.



Photo 2.4 Sekolah Dasar Negeri Surya Bahari

Dalam upaya menunjang proses pendidikan anak, di Desa Surya Bahari telah tersedia sarana pendidikan berupa 3 sekolah dasar negeri, 2 madrasah ibtidaiyah, dan 1 madrasah tsanawiyah. Bagi peserta didik yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dapat bersekolah di kota Kecamatan Pakuhaji, Tangerang atau Jakarta.

Hampir seluruhnya atau sekitar 99,85 % masyarakat Desa Surya Bahari memeluk agama Islam dan sisanya sekitar 0,15 % memeluk agama Budha (Tabel 2.4). Kerukunan hidup beragama dapat terjalin baik, saling menghargai dan menghormati antara sesama pemeluk agama.

Tabel 2.4
Komposisi Penduduk Menurut Agama
Di Desa Surya Bahari

No.	Pemeluk Agama	Jumlah	
		Orang	%
1.	Islam	4.654	99,85
2.	Budha	7	0,15
	Jumlah	4.661	100,00

Sumber : Monografi Desa Surya Bahari, 2002

Dalam upaya meningkatkan kehidupan beragama di Desa Surya Bahari telah tersedia sarana peribadatan agama Islam, yaitu 2 mesjid dan 7 mushola. Sarana peribadatan bagi warga penganut agama Budha, yaitu vihara, belum tersedia. Mereka (umat Budha) umumnya melakukan peribadatan di kota kabupaten, Tangerang.



Photo 2.5 Mesjid

Masyarakat Desa Surya Bahari adalah masyarakat pedesaan pantai yang mengandalkan hidup sebagai nelayan. Laut merupakan sumber kehidupan yang dianggap dapat memberi janji kehidupan lebih baik di masa depan. Selain sebagai nelayan, sebagian penduduk bermatapencaharian sebagai petani, wiraswasta, dan pegawai negeri.

Pada tabel 2.5, tampak bahwa mata pencaharian sebagai nelayan menempati urutan teratas, yaitu sebanyak 1.768 orang atau 46,80 %. Profesi nelayan dapat dibedakan atas nelayan *bakul*, *juragan*, dan *bidak*. *Bakul* adalah nelayan yang berperan sebagai tengkulak yang meminjamkan modal (dana) untuk melaut dengan pengembalian berupa hasil tangkapan yang harus dijual kepadanya dengan harga yang telah ditentukan. *Juragan* adalah pemilik perahu dan peralatan menangkap ikan, yang kadang-kadang ikut melaut. *Bidak* adalah nelayan yang menggantungkan hidupnya pada *juragan* sebagai pemilik perahu dan *bakul* sebagai pemilik modal. Oleh karena itu, nelayan *bidak* dapat dikatakan sebagai buruh nelayan yang berpenghasilan sangat kecil, sehingga kehidupan mereka berada pada taraf memprihatinkan dan termasuk kelompok masyarakat miskin.

Tabel 2.5
Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian
Di Desa Surya Bahari (N = 3778 / penduduk produktif)

No.	Mata Pencaharian	Jumlah	
		Orang	%
1.	Pegawai Negeri Sipil	10	0,26
2.	A B R I	3	0,08
3.	Swasta	55	1,45
4.	Wiraswasta/Pedagang	225	5,95
5.	Petani dan Buruh tani	672	17,79
6.	Pertukangan	67	1,77
7.	Pensiunan	13	0,34
8.	Nelayan	1.768	46,80
9.	Jasa (ojeg, sopir, tk. cukur)	119	3,15
10.	Pengangguran	846	22,39
J u m l a h		3.778	100,00

Sumber : Monografi Desa Surya Bahari, 2002

Penduduk yang bermatapencaharian sebagai petani terdapat sebanyak 672 orang atau 14,42 % dari jumlah seluruh penduduk atau 17,79 % dari jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian. Petani dapat dibedakan atas petani pemilik dan penggarap sebanyak 170 orang serta buruh tani sebanyak 502 orang.



Photo 2.6 Toko alat-alat kenelayanan di Desa Surya Bahari

Mata pencaharian lain yang banyak dilakukan penduduk adalah berdagang atau wiraswasta. Usaha perdagangan ini sangat beragam, seperti berdagang barang kelontong, sembako, peralatan yang berhubungan dengan kegiatan di laut/kenelayanan, dan lain-lain. Sebagian penduduk; terutama kaum ibu, ikut berdagang memasarkan ikan olahan hasil para nelayan Desa Surya Bahari, seperti berdagang ikan asin atau ikan pindang.

C. Pola Permukiman

Keadaan permukiman atau perumahan penduduk dapat digunakan sebagai barometer untuk mengetahui tingkat kemakmuran atau keadaan kesehatan penduduk. Keadaan permukiman tersebut sangat tergantung dari keadaan alam atau daerah setempat.



Photo 2.7 Gerbang menuju permukiman nelayan

Permukiman di Desa Surya Bahari menunjukkan pola mengelompok dan beberapa di antaranya secara linier mengikuti jalan desa. Jarak antara rumah yang satu dengan lainnya relatif berdekatan bahkan berdempetan. Permukiman di bagian timur desa berjajar di sepanjang alur Sungai Cituis yang membatasi wilayah Desa Surya Bahari dengan Desa Sukawali dan Desa Buaran Mangga. Alur sungai ini menjadi urat nadi kehidupan para nelayan dan dipergunakan sebagai pelabuhan bagi perahu-perahu nelayan Desa Surya Bahari dan sekitarnya.

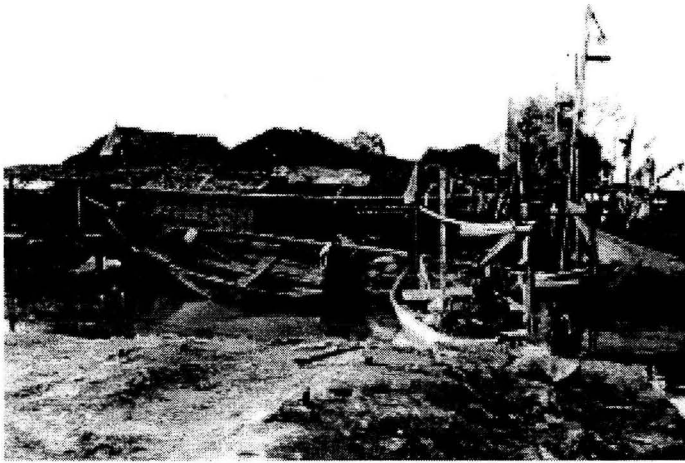


Photo 2.8 Rumah, sungai dan perahu nelayan

Kondisi rumah di daerah ini cukup bervariasi, ada yang tergolong rumah permanen, semi permanen, dan nonpermanen. Rumah permanen (45 rumah) berupa rumah dengan dinding tembok terbuat dari batu bata, beratap genting, dan berlantai semen atau tegel. Rumah semi permanen (980 rumah) berupa rumah berdinding setengah tembok dan setengah bilik (anyaman bambu), triplek, atau kayu dan beratap genting serta lantai tegel, plester semen, atau tanah. Rumah nonpermanen (50 rumah) berupa rumah dengan kerangka kayu berdinding bilik (anyaman bambu), triplek, atau kayu, beratap genting, serta lantai plester semen atau tanah.

Pada umumnya, kondisi rumah-rumah nelayan termasuk rumah sederhana berupa rumah berinding bilik bambu, berlantai tanah, dan keadaan lingkungannya sangat memprihatinkan. Meskipun demikian, sebagian dari nelayan di Desa Surya Bahari, terutama para *juragan*, telah mempunyai rumah permanen. Rumah-rumah tersebut umumnya tidak didirikan sendiri tetapi dilakukan secara gotong royong.

Bentuk dan arah hadap rumah bebas, sesuai dengan selera masing-masing. Pembagian ruangan rumah umumnya hanya terdiri atas sebuah kamar tidur, kamar dapur, kamar depan (ruang tamu), dan teras. Teras dibuat agak lebih luas agar dapat dipergunakan sebagai tempat untuk acara santai keluarga dan tempat memperbaiki berbagai peralatan melaut, terutama jala. Sebagian masyarakat menempati rumah petak yang di dalamnya tidak terdapat sekat atau pembagian ruangan. Dengan demikian, rumah petak tersebut hanyalah berupa satu ruangan besar sehingga segala kegiatan dilakukan di ruangan yang sama, baik menerima

tamu, tidur, makan, maupun masak. Peralatan rumah tangga yang dimiliki sangat sederhana, terbatas pada peralatan memasak dan alat tidur atau bahkan hanya sehelai tikar. Meskipun demikian, sebagian dari mereka telah memiliki pesawat televisi, yang dianggap sebagai media komunikasi yang dapat mengangkat prestise rumah tangga.

Sarana kelengkapan permukiman seperti pasar, lapangan sepakbola, mesjid, sekolah dasar, dan balai desa letaknya berdekatan dan berlokasi di Dusun I (Kampung Cituis).

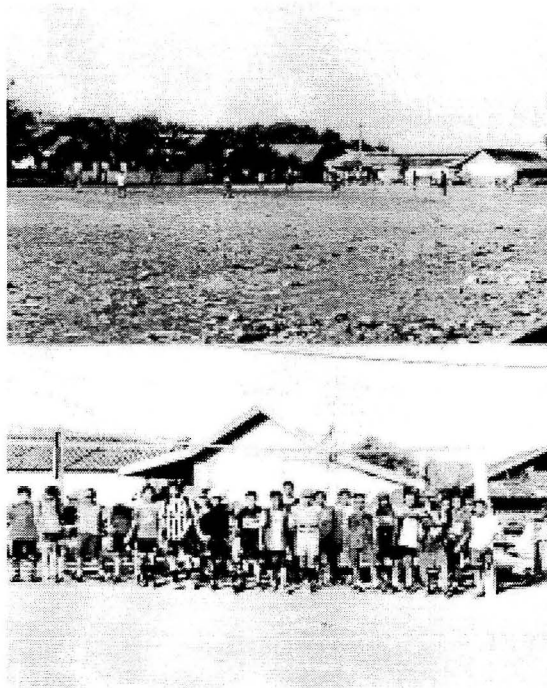


Photo 2.9 Lapangan sepakbola dan salah satu kesebelasan yang ada di Surya Bahari

D. Pranata Kemasyarakatan

Kehidupan selalu berkembang dan menuntut pemenuhan kebutuhan hidup untuk dapat survive. Masyarakat Desa Surya Bahari menyadari, untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan adanya kerja sama semua pihak terkait, baik dari pemerintah maupun masyarakat sendiri. Satu caranya adalah dengan membentuk pranata kemasyarakatan.

Pranata-pranata kemasyarakatan yang terdapat di Desa Surya Bahari dan relatif berpengaruh terhadap peningkatan kehidupan masyarakat, antara lain pranata keluarga, pranata gotong royong, organisasi PKK, KUD, dan pemerintah desa.

1. Keluarga

Keluarga adalah kelompok sosial terkecil dan paling dasar, tempat manusia pertama kalinya berinteraksi dengan manusia lain. Keluarga dapat dibedakan atas keluarga inti dan keluarga luas. Keluarga inti adalah kelompok kekerabatan terkecil dan paling dekat ikatannya yang dibentuk berdasarkan perkawinan. Keluarga inti terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak yang belum menikah. Keluarga luas adalah suatu ikatan keluarga atau kelompok kekerabatan yang didasarkan atas hubungan geneologis dan biasanya terdiri atas ayah, ibu, nenek, kakek, anak-anak yang sudah kawin, dan lain-lain. Dalam satu rumah di Desa Surya Bahari terdapat ayah, ibu dan anak, baik yang telah kawin maupun yang belum kawin. Walaupun dalam satu rumah terdapat lebih dari satu keluarga yang dibentuk melalui perkawinan, masyarakat hanya menganggap terdapat satu keluarga (hanya ada satu Kepala keluarga) karena keluarga lain dianggap hanya menumpang atau dianggap sebagai tamu.

Pembentukan keluarga dimulai dengan sistem perkawinan yang bersifat endogami maupun eksogami, artinya masyarakat Desa Surya Bahari dapat menikah dengan orang luar maupun dengan sesama warga Desa Surya Bahari sendiri.

Adat menetap setelah menikah bersifat matrilokal, artinya pasangan yang baru menikah menetap di kerabat pihak pengantin perempuan. Apabila keluarga baru telah sanggup untuk hidup sendiri, maka mereka dibebaskan untuk memilih tempat tinggalnya sendiri (neolokal).

Sebagian pembagian waris ditentukan berdasarkan ketentuan atau ajaran agama Islam, yaitu perempuan hanya mendapat setengah dari bagian laki-laki. Walaupun demikian, pada pelaksanaannya, pembagian warisan didasarkan atas persetujuan dan kesadaran semua pihak terkait.

2. Pranata Gotong Royong

Pranata gotong royong berfungsi untuk saling membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari para anggotanya. Gotong royong dilakukan terhadap warga yang sedang terkena musibah (mengalami kecelakaan atau dirundung duka kematian) dan yang sedang berbahagia (mendirikan rumah, syukuran, pesta khitanan, atau pesta perkawinan). Lebih jauh dari itu, gotong royong dilakukan pula dalam membangun dan memperbaiki sarana-sarana umum, seperti perbaikan jalan, pembuatan saluran air, kebersihan lingkungan, dan lain sebagainya.

3. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

PKK merupakan pranata sosial yang bergerak dan berorientasi pada pembinaan warga masyarakat, khususnya kaum ibu rumah tangga. Kegiatan yang dilakukan antara lain membentuk kelompok kegiatan belajar, mengadakan kursus kerajinan tangan dan menjahit, penyuluhan KB dan rumah sehat, serta kegiatan Posyandu. Kegiatan PKK di lingkup Desa Surya Bahari umumnya didukung oleh masyarakat setempat.

Manfaat yang telah dirasakan ibu-ibu rumah tangga di Desa Surya Bahari antara lain meningkatnya pengetahuan ibu-ibu mengenai keterampilan yang berhubungan dengan kewanitaan dan peningkatan pendapatan keluarga. PKK telah mendorong para ibu nelayan untuk ikut serta dalam kegiatan ekonomi, yaitu dengan cara berdagang ikan hasil tangkapan keluarganya secara mandiri. Kegiatan ini didukung penuh oleh pemerintah desa dengan adanya program UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera). Upaya ini sangat diperlukan dalam menumbuhkan semangat wirausaha yang mandiri dari masyarakat setempat, terutama dalam peningkatan pendapatan keluarga.

Dengan kegiatan Posyandu dan KB, masyarakat umumnya dan khususnya para ibu dapat memeriksakan kesehatan anak-anaknya secara rutin dan beberapa ibu rumah tangga yang telah menjadi akseptor KB.

4. Koperasi Unit Desa

Koperasi adalah bentuk usaha bersama yang berdasarkan pada asas kekeluargaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dalam upaya meningkatkan kehidupan masyarakat nelayan pedesaan, pemerintah membentuk koperasi unit desa (KUD). Di Desa Surya Bahari terdapat Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Samudra.

Pendirian KUD Mina Samudra dimaksudkan sebagai wadah yang dapat memberi bantuan kepada nelayan dalam mengembangkan kegiatannya, yaitu dalam bentuk pemberian bantuan lunak berupa kredit peralatan menangkap ikan, seperti motor tempel dan jaring. Bantuan kredit lebih diprioritaskan kepada nelayan yang kurang mampu atau miskin. Dewasa ini, keberadaan KUD Mina Samudra kurang mendapat tempat dalam kehidupan nelayan Desa Surya Bahari. Para nelayan menganggap KUD Mina Samudra tidak dapat memberikan bantuan berarti terhadap nelayan dan bahkan cenderung lebih dimanfaatkan oleh para pengurusnya untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, KUD Mina Samudra secara formal masih berdiri tetapi kegiatannya kurang mengenai sasaran.

5. Lembaga Pemerintah Desa

Desa Surya Bahari dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih oleh masyarakat secara demokratis. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa dibantu oleh seorang sekretaris desa dan beberapa kepala urusan, antara lain kepala urusan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, kesejahteraan rakyat, dan umum. Pemerintahan Desa Surya Bahari meliputi 3 dusun, yaitu Dusun I (Kampung Cituis), Dusun II (Kampung Rawasaban), dan Dusun III (Kampung Sugri). Setiap dusun dipimpin seorang kepala dusun yang disebut *jaro*. *Jaro* bertanggung jawab kepada kepala desa. Dusun identik dengan Rukun Warga (RW) yang membawahi Rukun Tetangga. Secara keseluruhan, Rukun Tetangga (RT) terdapat sebanyak 13 RT.

Kepala Desa Surya Bahari dan aparatnya, berupaya memiliki sikap kepemimpinan yang bersifat kekeluargaan, dekat dengan warga. Sikap ini telah berhasil membawa beberapa perubahan berarti. Perubahan tersebut, tampak dari adanya kesadaran ibu-ibu nelayan untuk berwiraswasta sebagai pedagang dan mulai berkurangnya sikap mental nelayan yang suka berfoya-foya walaupun secara umum, anggapan “hasil hari ini untuk hari ini,” masih kerap dijumpai, terutama ketika panen melimpah.

Kepala Desa Surya Bahari, senantiasa berusaha mengayomi dan membimbing masyarakat dalam pembangunan untuk mencapai peningkatan kehidupan masyarakat. Selain itu, kepala desa juga merupakan kepala pemerintahan yang harus menjalankan program pemerintah. Oleh karena itu, kepala desa bertanggung jawab terhadap kelangsungan pembangunan di daerahnya. Dalam posisi inilah, kepala desa berupaya mampu menjadi mediator dan fasilitator antara rakyat dengan pemerintah.

E. Sistem Teknologi

Teknologi adalah bagian dari kebudayaan yang berfungsi meringankan kehidupan manusia dan tidak dapat dipisahkan dari aktivitas kehidupan sehari-hari. Teknologi yang sederhana mencerminkan pola kebudayaan dan cara hidup yang sederhana pula. Sebaliknya, teknologi modern mencerminkan cara hidup yang relatif maju.

Masyarakat pedesaan yang umumnya merupakan masyarakat berkebudayaan sederhana mengembangkan dan menggunakan teknologi sesuai keadaan lingkungannya dan berkaitan erat dengan sistem mata pencaharian. Pada umumnya, masyarakat Desa Surya Bahari bermatapencaharian sebagai nelayan, sangat erat dengan laut, bahkan dapat dikatakan laut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem kehidupannya. Oleh karena kehidupannya relatif “tergantung” pada laut, maka mereka mengembangkan sistem teknologi kelautan.

Masyarakat nelayan Desa Surya Bahari termasuk kategori masyarakat nelayan tradisional yang tidak memiliki tingkat penguasaan teknologi maju. Teknologi yang mereka miliki umumnya teknologi sederhana warisan dari nenek moyang mereka yang diwariskan secara turun temurun.

Sistem teknologi dan pengetahuan kelautan mereka terbatas pada sistem pembuatan perahu, pembuatan jaring, dan pengetahuan mengenai perbintangan serta mengenai gejala-gejala alam yang terakumulasi dari pengalaman orang tua. Demikian pula dalam sistem pengolahan hasil, umumnya hanya terbatas pada cara pengawetan sementara dengan es, dikeringkan atau diasinkan, dan dipindang.



Photo 2.10 Pengawetan hasil tangkapan (ikan asin)

Terbatasnya teknologi peralatan penangkapan ikan dan pengetahuan kelautan telah menyebabkan kecilnya pendapatan, terutama perolehan ikan sedikit dan kalah bersaing dengan nelayan yang berteknologi tinggi. Keadaan ini diperparah dengan sistem pengawetan dan pemasaran yang kurang tepat. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu diupayakan peningkatan teknologi kelautan.

Upaya peningkatan pengetahuan teknologi telah mulai dirasakan nelayan dengan adanya upaya motorisasi perahu. Artinya, perahu-perahu yang semula digerakkan dengan memanfaatkan angin dan dayung diganti dengan mesin motor tempel. Penggunaan motor tempel ini dapat memberi kemudahan dalam

melaksanakan penangkapan ikan dan dapat menjangkau lautan yang lebih jauh, sehingga lebih membuka peluang untuk mendapat hasil tangkapan yang lebih banyak. Peningkatan hasil tangkapan berarti akan meningkatkan pendapatan nelayan yang berdampak positif terhadap kehidupan keluarga nelayan.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat telah mengenal sarana transportasi dan komunikasi modern seperti televisi, radio, dan telepon. Peralatan rumah tangga pun banyak yang telah menggunakan barang-barang buatan pabrik dari bahan plastik maupun logam, di samping masih didapati adanya *hawu* (tungku), *hihid* (kipas dari bambu), dan *centong* (cukil kayu). Dengan demikian dapat dikatakan, masyarakat telah memadukan sistem teknologi tradisional dengan sistem teknologi modern dalam mempermudah gerak kehidupannya.



Photo 2.11 Peralatan rumah tangga keluarga nelayan
di ruang tamu (atas) dan dapur (bawah)

BAB III

TINGKAT KESEJAHTERAAN KELUARGA NELAYAN

(Hasil Penelitian dan Pembahasan)

Masalah kemiskinan masih tetap menjadi persoalan global umat manusia sebagai suatu reaksi atas kenyataan bahwa perkembangan perekonomian dunia yang tak berimbang dan adanya gejala di beberapa kawasan telah menimbulkan kesenjangan sosial, ekonomi dan politik baik antarnegara, antardaerah maupun antarkelompok dalam masyarakat. Munculnya masalah kemiskinan ini juga dilatarbelakangi oleh besarnya jumlah penduduk miskin.

Di Indonesia, jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun menunjukkan jumlah yang semakin menurun. Dengan demikian, secara kuantitatif upaya pengentasan kemiskinan dapat dinilai menunjukkan kemajuan.

Selain mengurangi jumlah penduduk yang tergolong miskin, tantangan penting yang perlu pula segera diselesaikan atau ditanggulangi adalah mengurangi jumlah penduduk rentan. Penduduk rentan adalah yang dalam berbagai matryanya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya karena berbagai hambatan. Sedangkan seseorang atau keluarga disebut miskin atau tertinggal apabila pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal, antara lain meliputi pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan.

Sehubungan dengan penduduk miskin ini, permasalahan yang muncul adalah bagaimana mengurangi jumlah penduduk miskin atau mengurangi derajat kemiskinan tadi begitu rupa sehingga dari segi kualitas, penduduk tetap merupakan sumber daya manusia yang handal. Salah satu alternatif yang penting untuk dimunculkan adalah meningkatkan fungsi keluarga. Keluarga akan merupakan suatu unit terkecil dalam masyarakat yang bukan hanya berfungsi sosial budaya, tetapi juga reproduktif (yang dari generasi ke generasi terus menerus mengulangi fungsi yang sama), kemudian berkembang ke fungsi sosial budaya, namun belakangan ini keluarga diandalkan untuk suatu tugas yang lebih luhur yaitu sebagai wahana mencapai

tujuan pembangunan. Hal ini menyebabkan keluarga perlu mempersiapkan diri dalam keterlibatannya sebagai agen pembangunan di sektor ekonomi produktif.

Persoalan keluarga tampaknya telah menjadi perhatian utama, baik di tingkat nasional, maupun tingkat internasional. Kedua tatanan itu bertemu secara koincidental dalam tahu 1994. Di Sidoarjo Jawa Timur, pada 29 Juni 1994 diperingati Hari Keluarga Nasional. Sedangkan tahun 1994 telah dicanangkan oleh PBB sebagai Tahun Internasional Keluarga. Badan Dunia ini tentu punya alasan tertentu mengapa tahun 1994 diputuskan demikian, seperti halnya tahun-tahun pada dekade 70-an juga pernah diputuskan sebagai Tahun Internasional Wanita ataupun Tahun Internasional Anak. Paling tidak, terdapat kesan bahwa masalah keluarga merupakan hal penting yang perlu diberikan perhatian khusus.

Hari Keluarga Nasional tampaknya perlu dijadikan tonggak penting untuk mengukur persoalan makro keluarga besar bangsa Indonesia dan masalah keluarga kita masing-masing secara mikro. Fungsi-fungsi keluarga seperti terurai di muka, pada dasarnya perlu dilaksanakan oleh setiap keluarga di Indonesia. Yaumil C. Agoes Achir dalam Prisma (1994), mengemukakan bahwa apabila terutama ditujukan kepada keluarga-keluarga yang belum sejahtera (pra sejahtera), sejauh tertentu diharapkan dapat mendorong keluarga untuk mengentaskan dirinya dari kemiskinan atau ketertinggalannya. Bagi keluarga-keluarga lain yang beruntung telah mencapai kesejahteraan, tanggung jawab melaksanakan fungsi-fungsi tersebut tetap penting. Tujuannya adalah agar kesejahteraan keluarga terus meningkat. Di sinilah letak kaitan antara keluarga sebagai suatu institusi sosial dengan keluarga sebagai suatu institusi ekonomi.

Sejak tahun 1994, BKKBN mulai melakukan pendataan keluarga sejahtera dengan menggunakan instrumen berupa 22 indikator pengukur tahap-tahap pencapaian keluarga sejahtera. Kegiatan tersebut merupakan upaya pengembangan dari pendataan pasangan usia subur dan peserta KB, yang pada masa sebelumnya, senantiasa dikerjakan secara teratur. Apabila pada tahun 1993 ke belakang hanya tercatat data KB dan demografi saja, maka sejak tahun 1994 dikumpulkan data-data tentang KB, demografi dan keluarga sejahtera. Hal tersebut merupakan langkah maju BKKBN untuk mengumpulkan informasi baik kuantitatif maupun kualitatif tentang keadaan keluarga di Indonesia. Sebagai langkah awal memang bisa dimaklumi apabila kegiatan pendataan tersebut masih menghadapi berbagai masalah dan tantangan. Perdebatan tentang konsep keluarga sejahtera, indikator-indikator keluarga sejahtera, validitas data dan hal lain ternyata muncul ke permukaan. Tetapi silang pendapat ini adalah hal yang lumrah dan wajar terjadi untuk sesuatu yang baru (Prisma, 1994).

Dalam penelitian ini, instrumen pendataan dan pemetaan dari BKKBN mengenai tahapan pencapaian keluarga sejahtera dijadikan sebagai acuan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan keluarga nelayan. Di samping itu, digunakan juga beberapa teori yang berhubungan dengan kemiskinan atau tingkat kesejahteraan keluarga (seperti tercantum dalam Bab I mengenai Pendekatan Teoritis) untuk lebih mempertajam keakuratan pembahasan. Adapun pengertian kemiskinan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kemiskinan absolut yang dikembangkan oleh Sayogyo. Dikatakan bahwa kemiskinan adalah suatu tingkat hidup yang berada di bawah standar kebutuhan minimum, yang diterapkan berdasarkan atas kebutuhan pokok pangan/beras dan gizi, yang membuat orang cukup untuk bekerja dan hidup sehat.

Penelitian dan penulisan ini berusaha menyajikan data mengenai tingkat kesejahteraan keluarga nelayan secara deskriptif melalui analisa kuantitatif dan kualitatif. Untuk sampai pada inti permasalahan, terlebih dahulu akan ditinjau identitas responden yang diwawancarai dalam pengumpulan data. Kemudian akan dipaparkan mengenai kehidupan nelayan, kondisi perumahan, religi dan sistem pengetahuan, pola kerja dan pendapatan, serta hambatan dan usaha peningkatan kesejahteraan. Bagian akhir dari tulisan pada Bab III ini akan merupakan paparan mengenai pemenuhan 22 indikator pentahapan keluarga sejahtera (instrumen pendataan dan pemetaan dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) oleh keluarga responden. Dengan demikian, akan diketahui tahapan pencapaian kesejahteraannya; termasuk dalam keluarga pra-sejahtera atau telah menjadi keluarga sejahtera.

Responden dan informan sebagai sumber informasi primer, didapatkan setelah mengadakan pembicaraan dengan aparat pemerintahan desa dan beberapa tokoh masyarakat. Sampel dipilih secara purposif, dengan anggapan representatif untuk populasi dan bisa memenuhi tujuan penelitian, maka dipilih sebanyak 50 responden yang terdiri atas *juragan* (pemilik perahu atau modal) dan *bidak* atau *pandega* (awak perahu atau buruh nelayan) yang dianggap kelas menengah ke bawah). Selain itu, dilakukan juga wawancara dengan aparat pemerintahan desa dan tokoh-tokoh masyarakat untuk melengkapi data mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan secara umum.

A. Identitas Responden

Yang dimaksud dengan identitas adalah keadaan atau kondisi yang melekat pada individu / responden. Tentu saja, kondisi tersebut akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Identitas tersebut ditentukan sebagai variabel pengaruh yang secara langsung maupun tidak, akan mempengaruhi responden dalam mengambil

keputusan atau menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti.

Gambaran identitas responden yang akan diuraikan, meliputi usia, pekerjaan, latar belakang pendidikan, status sipil, jumlah tanggungan, daerah asal, dan pendaftaran penduduk.

Tingkat umur berpengaruh terhadap kemampuan fisik nelayan untuk turun ke laut menangkap ikan melawan ombak dan angin. Semakin tinggi umur nelayan maka diperkirakan kemampuan fisiknya untuk bekerja akan semakin menurun. Dalam sampel ini, nelayan termuda berumur 16 tahun dan tertua 57 tahun dengan umur rata-rata 35 tahun.

Tabel 3.1
Umur Responden

No.	Umur Responden (th)	F	%
1.	Muda (16 - 32)	16	32,00
2.	Sedang (33 - 50)	28	56,00
3.	Tua (50 ke atas)	6	12,00
J u m l a h		50	100,00

Sumber : Data Primer Penelitian 2003

Data di atas memperlihatkan bahwa kelompok umur 33 - 50 tahun terbanyak dengan persentase sebesar 56 %, kemudian menyusul kelompok umur 15 - 32 tahun sebesar 32 % dan sisanya 12 % berumur di atas 50 tahun.

Secara umum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penduduk yang bermatapencaharian nelayan merupakan penduduk potensial dan termasuk dalam golongan usia produktif sehingga memungkinkan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup keluarganya serta bisa melakukan tindakan-tindakan hukum.

Berdasarkan hasil pengamatan, kebanyakan nelayan yang berumur lebih dari 50 tahun adalah golongan strata *juragan*. Sedangkan yang berasal dari strata lain selain *juragan* yang berumur lebih dari 50 tahun, umumnya adalah *jermudi* atau *panto*, itu pun dalam jumlah yang sedikit. Hal itu terjadi karena pekerjaan sebagai nelayan merupakan pekerjaan sangat berat yang memerlukan ketahanan dan ketangguhan fisik yang kuat untuk dapat bertahan terhadap terpaan angin, sengatan

matahari dan dinginnya malam. Apabila sudah tua, seorang nelayan umumnya akan berhenti ke laut dan diam di rumah, melakukan pekerjaan apa saja atau menumpang pada salah seorang anaknya.

Responden yang seluruhnya bermatapencaharian sebagai nelayan, dibedakan dalam 2 strata/kategori yaitu *juragan* dan *pendega* atau *bidak*. Selain itu, secara umum pekerjaan responden dibedakan dalam dua jenis, yaitu pekerjaan pokok dan pekerjaan tambahan (sampingan).

Tabel 3.2
Pekerjaan Responden

No.	Pekerjaan	F	%
A. Pokok (Nelayan)			
1.	Juragan	10	20,00
2.	Pandega / bidak	40	80,00
B. Sampingan			
1.	Petani	2	4,00
2.	Pedagang	5	10,00
3.	Buruh / tukang	5	10,00
4.	Pengrajin / pengusaha ikan asin	6	12,00
5.	Peternak ikan	3	6,00
6.	Tidak punya pekerjaan tambahan	29	58,00
J u m l a h		50	100,00

Sumber : Data Primer Penelitian 2003

Pekerjaan responden sebagai nelayan, dibedakan dalam 2 kategori.

1. *Juragan*, yaitu nelayan pemilik kapal atau perahu. *Juragan* mempekerjakan nelayan lain sebagai ABK (Anak Buah Kapal) tanpa ia sendiri harus ikut bekerja. Tetapi kadang-kadang, masih ikut bekerja sebagai awak kapal karena hasil tangkapan/pendapatan sangat kecil atau *juragan* tersebut tidak mempunyai pekerjaan tambahan.

2. *Pandega* atau *bidak*, yaitu anak buah kapal atau nelayan yang ikut melaut. Dalam perahu, antara pemilik kapal dan *pandega* tidak dibedakan statusnya karena hanya didasarkan atas keahlian. *Pandega* terdiri atas *jermudi*, *pandega* berkeahlian rendah (*low skilled labour* seperti *panto* dan *motoris*) dan *bidak*. *Jermudi* adalah nelayan pengemudi kapal/perahu yang kadang-kadang merangkap sebagai *bidak*. *Bidak* adalah awak kapal yang tidak mempunyai keahlian khusus, bertugas menebarkan jaring atau segala sesuatu yang berkaitan dengan penangkapan ikan, disebut juga buruh nelayan. Tetapi seringkali, pada saat melaut hanya dibedakan atas *jermudi* dan *bidak* karena setiap nelayan diharapkan bisa berfungsi juga sebagai *panto* (nelayan yang mengetahui tempat-tempat kerumunan ikan dalam jumlah banyak).

Hasil penelitian yang tercantum dalam tabel di atas memperlihatkan bahwa di samping mata pencaharian pokok sebagai nelayan, responden mempunyai juga pekerjaan sampingan sebagai peternak ikan di tambak/empang (6 %), pedagang (10 %), buruh / tukang (10 %), pengrajin (10 %), dan petani / buruh tani (4 %). Sebagian besar responden (58 %) tidak mempunyai pekerjaan tambahan.

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden menggantungkan hidupnya hanya pada pekerjaan sebagai nelayan, dan responden yang tidak mempunyai pekerjaan sampingan tersebut, umumnya adalah dari strata *pandega* / *bidak*. Hal tersebut memberi indikasi lebih lanjut bahwa *pandega* kurang memiliki waktu yang cukup untuk berusaha mencari tambahan penghasilan dari bidang lain, bahkan anggota keluarga yang lain pun jarang yang berusaha mencari tambahan penghasilan karena tidak adanya modal.

Pendidikan mempunyai peranan yang penting bagi nelayan dalam mengadopsi teknologi, keterampilan dan manajemen dalam mengolah usahanya. Semakin tinggi tingkat pendidikan (formal dan non formal) diharapkan pola berpikir akan semakin rasional dan tingkat keterampilan (*skill*) akan semakin tinggi pula. Dengan demikian, kemampuan nelayan untuk memilih pekerjaan dan usaha dalam bidang perikanan akan semakin baik.

Sebagian besar responden mempunyai latar belakang pendidikan yang relatif rendah, juga hanya sedikit yang telah menamatkan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. Lebih dari setengahnya hanya berpendidikan Sekolah Dasar, bahkan ada yang tidak bersekolah sama sekali.

Tabel 3.3
Latar Belakang Pendidikan Responden

No.	Pendidikan	F	%
1.	Tidak Tamat SD	8	16,00
2.	Tamat SD	28	56,00
3.	Tamat SLTP	7	14,00
4.	Tamat SLTA	2	4,00
5.	Tamat Akademi / PT	-	-
6.	Tidak sekolah	5	10,00
J u m l a h		50	100,00

Sumber : Data Primer Penelitian 2003

Berbagai studi mengenai kehidupan masyarakat, menunjukkan betapa besar pengaruh tingkat pendidikan dalam pembangunan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Tingginya tingkat pendidikan, memungkinkan daya serap/respon terhadap teknologi baru cenderung tinggi sehingga produk-tivitas usaha secara keseluruhan, juga tinggi. Dengan demikian tingkat pendidikan sangat besar pengaruhnya terhadap pengentasan kemiskinan.

Dari tabel 3.3, dapat diketahui bahwa pendidikan formal yang dicapai responden antara lain 56 % lulus SD, 16 % tidak tamat SD, 14 % lulus SLTP, 4 % lulus SLTA dan 10 % tidak sekolah. Banyaknya responden yang tidak tamat SD dan tidak sekolah disebabkan antara lain oleh ketidakmampuan mereka untuk meneruskan sekolah, dan tradisi orang tua yang menginginkan seorang anak terampil bekerja sebagai nelayan daripada meneruskan sekolah, bahkan keterampilan dan kemampuannya sebagai nelayan diharapkan lebih baik dari orangtuanya.

Rendahnya tingkat pendidikan mereka, tidak diimbangi dengan keikutsertaannya dalam pendidikan non formal seperti kursus-kursus. Hal ini berarti bahwa para responden sebagai tenaga kerja potensial, dihadapkan pada kesulitan mendapatkan lapangan kerja karena terbatasnya lapangan kerja yang tersedia bagi yang berpendidikan setingkat mereka. Oleh karena itu, keterampilan yang dijadikan

bekal untuk bekerja hanyalah keterampilan warisan berdasarkan tradisi turun temurun yang didupatkannya dari orang tua atau lingkungan tempat tinggalnya, yaitu sebagai nelayan. Walaupun berlatar belakang pendidikan relatif rendah, mereka dapat melaksanakan usahanya dengan baik karena tuntutan dan motivasi yang relatif besar untuk dapat survive.

Dilihat dari statusnya, sebagian besar responden yang seluruhnya berjenis kelamin laki-laki ini, sudah berkeluarga (76 %).

Tabel 3.4
Status Sipil

No.	S t a t u s	F	%
1.	Belum kawin	9	18,00
2.	Duda	3	6,00
3.	Sudah kawin	38	76,00
J u m l a h		50	100,00

Sumber : Data Primer Penelitian 2003

Walaupun belum berkeluarga, responden tetap menyumbangkan penghasilannya untuk orang tua atau saudaranya. Apalagi apabila responden merupakan satu-satunya anggota keluarga yang bekerja dan bertanggung jawab atas kehidupan keluarga / orang tua atau saudaranya, maka seluruh pendapatannya digunakan untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan kata lain, seluruh anggota keluarga yang tinggal bersama responden, merupakan tanggung jawab responden.

Jumlah anggota keluarga dapat mempengaruhi kesejahteraan sebuah rumah tangga. Hal tersebut berkaitan erat dengan ratio antara jumlah anggota keluarga bekerja dengan jumlah keseluruhan anggota keluarga. Dengan demikian, Jumlah anggota keluarga yang besar belum tentu dapat meyebabkan rumah tangga tersebut sejahtera karena tergantung dari besarnya jumlah anggota keluarga yang bekerja.

Tabel 3.5
Jumlah Tanggungan termasuk Responden

No.	Jumlah Tanggungan	F	%
1.	1 - 3 orang	9	18,00
2.	4 - 6 orang	27	54,00
3.	≥ 7 orang	14	28,00
J u m l a h		50	100,00

Sumber : Data Primer Penelitian 2003

Tanggungan rumah tangga yang dimaksud pada pada tabel 3.5 bukan hanya bapak, ibu dan anak yang masih menjadi tanggungan, akan tetapi dapat juga anggota dari sanak famili yang kebetulan tinggal dan menjadi tanggungan dari yang ditumpangi.

Tabel 3.5 memperlihatkan bahwa hanya 18 % responden mempunyai tanggungan 1 - 3 orang, dan 28 % mempunyai tanggungan 7 orang atau lebih. Lebih dari setengah responden (54 %) menyatakan mempunyai tanggungan antara 4 - 6 orang. Data di atas menyiratkan bahwa keluarga batih responden, sebagian besar mempunyai anggota rumah tangga 5 orang termasuk kepala keluarga, yang umumnya terdiri atas ayah (kepala keluarga), ibu dan 3 anak. Walaupun demikian, dalam satu rumah bisa terdiri atas 5 - 8 anggota keluarga dan bisa disebut keluarga luas karena terdiri atas keluarga batih dengan tambahan anggota keluarga dari kerabat atau teman yang ikut menginap, atau terdapat 2 keluarga batih atau lebih. Tingginya rata-rata besar rumah tangga tersebut diperkirakan karena kurangnya rumah sebagai tempat tinggal, serta banyaknya pendatang untuk mencari kerja (sebagai buruh nelayan) yang juga memerlukan rumah sebagai tempat tinggal.

Untuk dapat melihat lebih jauh tentang strata etnis dari responden di lokasi penelitian, terutama untuk mengetahui persentase penduduk asli dan pendatang, di bawah ini dikemukakan data daerah asalnya.

Tabel 3.6
Daerah Asal responden

No.	Daerah Asal	F	%
1.	Penduduk asli	26	52,00
2.	Luar kecamatan	10	20,00
3.	Luar kabupaten	5	10,00
4.	Luar propinsi	9	18,00
J u m l a h		50	100,00

Sumber : Data Primer Penelitian 2003

Data mengenai daerah asal responden dianggap penting karena nelayan cenderung melakukan mobilitas, menyesuaikan diri dengan kondisi alam, terutama musim-musim *paila* atau *paceklik* (musim sedikit hasil tangkapan/pendapatan). Walaupun sebagian besar nelayan akan kembali ke daerah asalnya, tetapi kadang-kadang ada yang menetap karena cocok dengan kultur masyarakat setempat atau menikah dengan penduduk tempat persinggahannya. Dari tabel 3.6 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden berasal dari satu propinsi (Banten). Hanya 18 % responden yang berasal dari luar Propinsi Banten. Responden tersebut berasal dari Subang, Karawang, Cirebon, dan Indramayu (Popinsi Jawa Barat), serta Brebes, Tegal dan Pekalongan (Propinsi Jawa Tengah). Adapun responden dari luar Kabupaten Tangerang, umumnya berasal dari Kabupaten Serang.

Tabel 3.7
Pendaftaran Penduduk (KTP)

No.	K T P	F	%
1.	Kabupaten Tangerang	42	84,00
2.	Luar Kab. Tangerang	8	16,00
J u m l a h		50	100,00

Sumber : Data Primer Penelitian 2003

Tabel 3.7 di atas menunjukkan bahwa walaupun mereka berasal dari daerah yang berlainan, tetapi hampir seluruhnya terdaftar sebagai penduduk di Kabupaten Tangerang atau mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Tangerang, yaitu sebanyak 84 %. Adapun sisanya (16 %) mempunyai KTP dari luar Kabupaten Tangerang.

B. Kehidupan Nelayan

Uraian mengenai kehidupan nelayan Desa Surya Bahari akan dibatasi pada kehidupan mereka di dalam rumah. Dalam hal ini, kehidupan keluargalah yang akan menjadi sorotan utama. Sebelum sampai pada uraian tersebut, akan dijelaskan sedikit tentang apa yang dimaksud dengan keluarga secara konseptual.

Keluarga merupakan kelompok sosial yang paling dasar, tempat manusia untuk pertama kalinya berinteraksi dengan manusia lain. Di dalam keluarga pula seseorang untuk pertama kalinya belajar berperilaku, berkenalan dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku. Proses di mana individu menginternalisasi nilai-nilai tersebut dapat disebut sebagai pembentukan kepribadian menurut kebudayaan suatu kelompok masyarakat, atau sering disebut sebagai proses sosialisasi (Soerjono Soekanto, 1982 : 182).

Demikian pentingnya peranan keluarga dalam sosialisasi anak, maka kedudukan orang tua bersifat sangat menentukan. Oleh karena itu, nilai budaya yang dimiliki orang tua, betapa pun kecilnya akan turut mewarnai kepribadian anak yang bersangkutan. Bahkan dalam kaitannya dengan kebudayaan kemiskinan, Oscar Lewis menyatakan bahwa kebudayaan kemiskinan pada suatu kelompok masyarakat cenderung melanggengkan dirinya dari generasi ke generasi melalui pengaruhnya terhadap anak-anak (Parsudi Suparlan, 1984 : 32). Selain dari orang tua, pewarisan nilai-nilai budaya atau sosialisasi ini dipengaruhi juga oleh lingkungan tempat anak atau keluarga yang bersangkutan tinggal.

Keluarga sebagai suatu satuan sosial terkecil mempunyai satuan tempat tinggal yang disebut rumah. Sebuah keluarga, umumnya terdiri atas seorang laki-laki dan seorang perempuan (yang terikat oleh perkawinan) ditambah dengan anak-anak mereka yang biasanya tinggal dalam satu rumah yang sama. Bentuk seperti itu dikenal sebagai keluarga inti atau *keluarga batih*. Apabila pada satu keluarga batih ada tambahan orang lain, baik yang sekerabat maupun tidak, dan secara bersama-sama hidup dalam satu rumah tangga, maka keluarga tersebut disebut *keluarga luas*. Berdasarkan pengertian tentang keluarga tersebut, berarti jumlah anggota keluarga luas lebih besar dibandingkan dengan keluarga batih karena adanya tambahan anggota.

Menurut Masri Singarimbun (1982), rumah tangga merupakan kesatuan sosial ekonomi dan anggotanya berdiam dalam satu rumah atau bagian dari rumah. Anggota rumah tangga mempunyai ikatan kekeluargaan melalui ikatan perkawinan, keturunan, dan adopsi. Namun anggota-anggota rumah tangga tidak selamanya mempunyai ikatan kekeluargaan (misalnya pembantu, orang yang ikut tinggal / *mondok*, atau

yang menyewa / kontrak kamar).

Rata-rata besarnya rumah tangga nelayan di lokasi penelitian dari 50 responden yang terdiri atas 28 keluarga batih dan 22 keluarga luas, adalah 5 orang anggota untuk setiap keluarga batih dan 8 orang anggota untuk keluarga luas. Besarnya rumah tangga ini lebih besar dibandingkan dengan besarnya rumah tangga di Indonesia (berdasarkan sensus penduduk tahun 2000, yakni hanya 4,9 orang). Tingginya rata-rata besar rumah tangga tersebut diperkirakan karena kurangnya rumah sebagai tempat tinggal, serta banyaknya pendatang yang juga memerlukan rumah sebagai tempat tinggal.

Rincian jumlah anggota setiap keluarga, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8
Jumlah Anggota Rumah Tangga

No.	Jumlah Anggota (orang)	Keluarga Batih		Keluarga Luas	
		F	%	F	%
1.	1 - 3	7	25,00	3	13,64
2.	4 - 6	18	64,29	6	27,27
3.	≥ 7	3	10,71	13	59,09
J u m l a h		28	100,00	22	100,00

Sumber : Data Primer Penelitian 2003

Terbentuknya keluarga luas di lokasi penelitian dapat terjadi melalui berbagai proses. Pertama, keluarga batih mendapat tambahan anggota keluarga dari kerabat lain, seperti orang tua, mertua dan kerabat lainnya seperti adik dan kemenakan. Kedua, keluarga batih telah menjadi keluarga luas karena adanya poligami. Ketiga, keluarga luas dapat terjadi dengan adanya keluarga batih senior dan keluarga batih junior yang tinggal dalam satu rumah. Pada masyarakat di lokasi penelitian, terdapat kebiasaan setelah menikah, pasangan pengantin tinggal satu rumah dengan keluarga pengantin perempuan. Padahal orang tua perempuan ini seringkali masih mempunyai anak yang belum menikah. Setelah pasangan pengantin ini mempunyai anak (menjadi keluarga batih junior), kadang-kadang masih tetap tinggal serumah dengan orang tua. Dengan demikian, terdapat keluarga batih senior (keluarga orang tua) dan keluarga batih junior (pasangan pengantin yang telah punya anak) dalam satu rumah, dan keluarga demikian disebut keluarga luas.

Struktur keluarga yang ada bercorak keluarga bilateral, baik keluarga batih maupun keluarga luas. Struktur dan bentuk keluarga, akan mempengaruhi kedudukan

setiap individu dalam keluarga tersebut. Selain itu, juga akan mempengaruhi hubungan antar kerabat, baik di dalam maupun di luar rumah tangga, dan sosialisasi anak.

Anak memang menjadi bagian integral dari sebuah keluarga. Dia kelak akan menjadi harapan keluarga, masyarakat, bahkan negara. Oleh karena itu, dia harus dibekali berbagai hal agar dapat *survive*, baik di lingkungan sosial kecil maupun besar. Untuk kepentingan inilah, dalam keluarga berjalan satu fungsi yang dinamakan fungsi pendidikan. Lebih khusus lagi di sana berlangsung proses sosialisasi dan enkulturasi, yakni proses pembelajaran seseorang sesuai dengan lingkungan sosial dan budayanya. Proses tersebut teraktualisasikan dalam pola pengasuhan anak seperti terurai berikut.

Lingkungan sosial tempat keluarga nelayan tinggal tentu saja merupakan lingkungan nelayan. Keluarga nelayan dipandang memiliki karakter yang khas. Mereka tinggal di pinggir pantai agar berdekatan dengan tempat mereka mencari nafkah. Laut dan berbagai aktivitas di seputar itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan mereka, bahkan juga turut mewarnai berbagai aspek kehidupan mereka. Termasuk dalam hal ini adalah menjadi referensi utama dalam proses sosialisasi dan enkulturasi, yang teraktualisasikan dalam pola pengasuhan anak.

Keluarga nelayan yang tinggal di Desa Surya Bahari, ternyata tidak semuanya penduduk asli. Ada juga di antaranya pendatang dari daerah lain, seperti Indramayu, Karawang, Brebes, Subang, Tegal, dan Pekalongan. Mereka datang ke tempat itu dengan pekerjaan sebelumnya sebagai nelayan juga. Mereka pun datang membawa budaya asal yang sudah terekam dalam ingatannya. Tentu saja tidak mudah menggantikannya dengan budaya baru di tempat tinggalnya sekarang. Oleh karena itu, mereka juga akan menggunakan budaya daerah asalnya sebagai acuan dalam mengasuh anak-anaknya. Dengan demikian, ada dua budaya yang menjadi referensi mereka. Kedua acuan tersebut adalah budaya daerah asal dan budaya di tempat tinggalnya sekarang. Bagaimana prosentasinya, paling tidak bergantung pada lama tinggal di tempat baru dan keterikatan mereka terhadap daerah asalnya. Contohnya, ada yang menjadikan bahasa daerah asal sebagai bahasa komunikasi dalam keluarga.

Satu hal lagi yang cukup penting dalam pola pengasuhan anak adalah jenis kelamin anak itu sendiri. Pada dasarnya, anak laki-laki atau anak perempuan sama saja, mereka tetap seorang anak yang harus diasuh sebaik mungkin oleh orang tuanya. Meskipun demikian, tetap ada perbedaan dalam pelaksanaannya. Bagaimanapun juga lingkungan sosial budaya di tempat tersebut telah memberikan koridor, apa yang pantas dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. Tentu saja perbedaan tersebut tidak diatur secara tegas namun teraktualisasikan dalam

kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan masyarakat maupun keluarga.

Keluarga memang merupakan lingkungan sosial pertama tempat berlangsungnya proses pengasuhan anak. Di sanalah seorang individu akan mendapatkan cinta dan kasih sayang, serta pendidikan secara informal, di antaranya meliputi pemberian nasihat, bimbingan, contoh perilaku, pengawasan, penghargaan, bahkan mungkin juga hukuman jika melakukan kesalahan. Dengan demikian, dalam keluargalah terbentuk karakter dan kepribadian seseorang sesuai dengan lingkungan sosial dan budaya orang tuanya. Semua itu akan menjadi bekal kelak ketika anak melangkah ke lingkungan sosial yang lebih besar.

Dalam keluarga tentu ada orang-orang yang berperan dalam proses pengasuhan anak. Yang pertama adalah orang tua. Mereka memiliki kewajiban untuk mengasuh anak-anaknya, juga bertanggung jawab terhadap kelangsungan pola pengasuhan anak di dalam keluarga. Selain itu, anggota keluarga lainnya juga turut ambil bagian di dalamnya. Peran anggota keluarga dalam proses tersebut bergantung pada status mereka dalam keluarga tersebut.

Seorang ayah merupakan penanggung jawab utama dalam proses pengasuhan anak. Meskipun demikian, tidak berarti dia harus selalu berada dekat dengan anak-anaknya. Sebagai seorang ayah, dia harus bekerja menafkahi keluarganya. Pekerjaan sebagai nelayan mengharuskan dia pergi melaut dalam waktu yang bisa berhari-hari lamanya. Konsekuensi logis dari itu, dia tidak bisa setiap saat mengasuh anak-anaknya. Dia menyerahkan sebagian kewajiban untuk mengasuh anak-anaknya kepada orang-orang yang ada di rumah, terutama ibunya.



Photo 3.1 Salah satu kegiatan menambah pendapatan keluarga : membuka warung makanan secara kecil-kecilan

Melihat kenyataan tersebut, tugas mengasuh anak terlihat lebih dominan dilakukan oleh seorang ibu. Di Desa Surya Bahari, para istri nelayan umumnya tidak bekerja. Dengan demikian, mereka lebih banyak berada di rumah. Mereka bisa dengan leluasa mengasuh anak-anaknya. Jika ada di antara mereka yang bekerja, biasanya pekerjaan itu masih erat kaitannya dengan kehidupan nelayan.

Pekerjaan yang dilakukan istri nelayan antara lain sebagai *bakul*, penjual ikan, dan mengeringkan ikan serta mengolahnya menjadi ikan asin. Di samping itu, ada juga yang mengisi waktu mereka dengan membuka warung di rumahnya. Komoditi yang dijual berupa barang-barang kebutuhan rumah tangga. Pekerjaan seperti itu tidak mengharuskan mereka meninggalkan rumah dan keluarga berlama-lama, bahkan ada yang bisa dikerjakan di rumah. Dengan demikian, anak-anak pun masih tetap dalam pengawasan mereka.

Anggota keluarga lainnya yang juga berperan dalam proses pengasuhan anak adalah anak yang berstatus sebagai kakak di dalam keluarga tersebut. Orang tua biasanya menjadikan mereka sebagai model atau contoh bagi adik-adiknya. Tidak tertutup kemungkinan bagi mereka untuk terlibat langsung mengasuh adik-adiknya, mengajak bermain misalnya. Kalau kebetulan kakaknya sudah berumah tangga, dia juga bisa berperan sebagaimana layaknya orang tua. Dia bisa menasihati, memberi contoh, mengawasi, dan lain-lain. Tentu saja, hal itu tetap berada di bawah kendali orang tuanya sebagai penanggung jawab di dalam keluarga tersebut. Keadaan yang disebutkan terakhir biasanya terjadi dalam keluarga luas.

Seperti orang tua pada umumnya, orang tua dalam keluarga nelayan juga berharap anak-anaknya bisa tumbuh sehat, pintar, dan menjadi orang yang baik. Oleh karena itu, mereka berupaya mengasuh anak sebaik mungkin sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Siapa tahu, kelak anak-anaknya bisa menjadi kebanggaan orang tua, keluarga, masyarakat, atau bangsa.

Upaya yang dilakukan orang tua agar anaknya tumbuh sehat di antaranya memenuhi kebutuhan tumbuh-kembangnya secara fisik. Dalam hal ini, mereka sedapat mungkin memberi makanan dan minuman dengan gizi yang baik. Tentu saja hal itu tetap disesuaikan dengan kondisi keuangan mereka.

Menjaga kesehatan anak juga tidak cukup dengan memperhatikan kebutuhan fisik saja. Ada hal lain juga yang harus diperhatikan oleh mereka, salah satunya membiasakan anak agar hidup teratur. Beberapa contoh di antaranya, teratur dalam makan, tidur, mandi, dan berpakaian. Bagaimana mereka mengajari anak agar teratur dalam beberapa hal tadi, dapat dilihat penjelasannya pada uraian berikut.

Teratur dalam makan dipandang penting oleh para orang tua. Oleh karena itu, mereka senantiasa menekankan hal tersebut kepada anak-anaknya. Teratur dalam

makan berarti teratur pada waktu makan. Mereka membiasakan anak-anaknya makan minimal dua kali dalam sehari. Pertama, dilakukan pagi hari; dan kedua dilakukan pada siang hari. Ada kalanya anak makan lebih dari itu, bisa tiga sampai empat kali. Hal itu tidak menjadi masalah selama anaknya mau dan makanannya masih tersedia.

Kebiasaan seperti itu akan terbawa ketika kelak anak laki-lakinya menjadi nelayan. Mereka biasanya makan di rumah sekali, dan di di laut minimal satu kali, atau bisa juga lebih. Hal yang sama juga dilakukan jika mereka melaut selama sehari-hari. Mereka tetap berusaha untuk makan minimal dua kali sehari. Bagaimanapun juga, pekerjaan mereka memerlukan kekuatan fisik yang prima. Berhari-hari berada di laut tentu sangat riskan jika tidak diimbangi dengan fisik yang kuat.

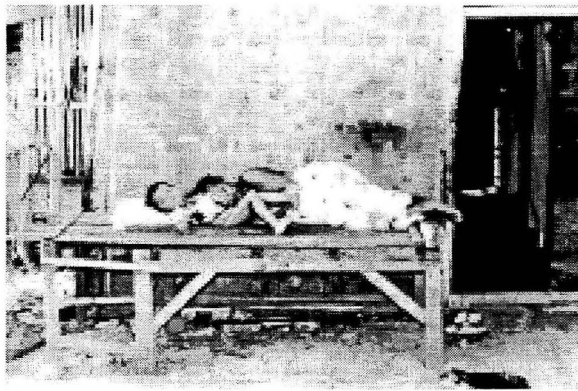


Photo 3.2 Mengajar anak untuk tidur siang secara teratur

Teratur dalam tidur juga menjadi bagian penting untuk menjaga kesehatan seseorang, terutama anak-anak. Bagaimana jadinya kalau anak-anak kekurangan tidur. Tentu dia akan tampak lemas, loyo, dan mudah sakit. Oleh karena itu, orang tua mengajari anak-anaknya agar tidur dengan teratur. Mereka membiasakan anak-anaknya tidur tidak terlalu malam, apalagi kalau sampai bergadang. Dengan demikian, keesokan harinya anak-anak akan merasa segar. Adapun untuk tidur siang, mereka tidak mengharuskannya. Itu bergantung pada kebutuhan anak sendiri. Kalau anak merasa perlu untuk tidur siang, karena lelah atau ngantuk, itu tidak akan dilarang.

Mereka juga membiasakan anak-anaknya agar mandi secara teratur. Sedikitnya anak-anak mandi dua kali dalam sehari, yakni pagi dan sore. Mandi begitu penting untuk menjaga kebersihan badan, apalagi setelah seharian

beraktivitas. Selain itu, mandi juga membuat anak menjadi segar dan terhindar dari berbagai kuman penyakit.

Di samping diajar tentang mandi, anak mendapat didikan bagaimana harus menghargai air tawar yang cukup sulit didapat. Anak-anak tidak dibenarkan mandi atau mencuci dengan air tawar yang ada di rumah. Kepada anak juga dianjurkan bagaimana cara mengambil air dari sumur bor / artesis dan menampung air bila hujan. Semua itu pada akhirnya menyadarkan bagaimana pentingnya air dalam hidup mereka dan bagaimana sukarnya untuk mendapatkan sumber air itu. Dalam rumah tangga inilah berlangsung proses penerusan pengetahuan kepada anak tentang pemanfaatan air bagi keperluan hidup mereka sehari-hari.

Hal yang sama juga berlaku dalam berpakaian. Beberapa keluarga responden, terutama keluarga *juragan*, membiasakan anak untuk berpakaian sesuai dengan kondisi yang dihadapinya. Ada pakaian untuk ke sekolah, yakni seragam yang telah ditentukan oleh sekolah masing-masing; Ada pakaian untuk acara-acara khusus, seperti ke undangan. Untuk acara tersebut biasanya dipilih pakaian yang paling bagus; ada pakaian untuk sehari-hari, untuk di rumah, bermain, maupun bekerja sebagai nelayan. Kondisi pakaian ini biasanya di bawah kondisi baju untuk ke undangan.

Lain halnya dengan kebiasaan pada keluarga *bidak / pandega*; karena tuntutan keadaan, hampir sebagian besar keluarga responden belum bisa menggunakan pakaian sesuai dengan fungsinya. Sepotong pakaian bisa digunakan dalam beberapa situasi, tidak ada kekhususan fungsi pakaian : untuk tidur, bekerja, sekolah, pesta atau bepergian.



Photo 3.3 Anak-anak nelayan sedang bermain di halaman sekolah

Pengenalan dan pengetahuan di atas diperoleh anak secara informal melalui kehidupan sehari-hari dalam keluarga serta bermain dengan temannya. Pengetahuan ini makin mendalam bersama dengan bertambahnya usia anak.

Ketika mulai bermain dengan temannya, anak itu pun mulai memperoleh keterampilan yang berkaitan dengan hamparan air, seperti menggunakan potongan kayu untuk mengapung, berenang, dan menyelam. Pengetahuan dan keterampilan ini mengantarkan mereka pada pengenalan terhadap *jukung* (perahu kecil), serta mulai menaiki dan menjalankannya bersama-sama teman-temannya. Keterampilan menggunakan *jukung*, memperdalam kesadaran tentang pentingnya prasarana dan sarana produksi serta transportasi air di lingkungan permukiman mereka.

Selanjutnya, sumber daya alam baik berupa hamparan air maupun makhluk yang hidup di dalamnya diketahui anak antara lain dari teman sepermainannya, yakni ketika belajar, memancing, menjaring ikan, atau *nawu* (mengeringkan selokan yang airnya agak sedikit, kemudian diambil ikannya). Kemudian, pengetahuan tentang jenis-jenis ikan dan alat-alat penangkap ikan, jenis perahu, tempat para nelayan baru pulang melaut dan memasarkan hasil tangkapannya, sekaligus pengetahuan tentang sifat-sifat laut seperti angin ribut dan ombak besar, serta saat-saat *miang* (melaut) dan mendarat.

Peranan teman bermain itu penting sekali karena anak sejak kecil sudah belajar berkomunikasi dengan orang lain selain anggota keluarganya, juga mengenal lingkungan dengan segala permasalahannya, terutama yang berhubungan dengan dunia anak-anak. Masalah yang cukup merawankan adalah tempat anak-anak bermain. Rumah tempat tinggal mereka umumnya tidak mempunyai halaman yang memadai maka yang terbanyak dijadikan tempat bermain adalah jalanan di depan rumah, sungai, atau di rumah tetangga yang berukuran cukup besar. Oleh karena terbatasnya tempat bermain itu, maka pola permainan yang dilakukan tidak berkembang dengan baik dan hal tersebut bisa mempengaruhi perkembangan jiwa anak yang mungkin saja bisa menyebabkan anak kurang kreatif atau menerima keadaan apa adanya.

Anak bisa tumbuh sehat memang harapan semua orang tua. Ada kalanya mereka tidak dapat menjaga anak-anaknya agar senantiasa sehat selamanya. Sese kali, anak juga mengalami sakit, apalagi pada masa balita. Mereka tidak bisa menghindari hal itu. Maklum, penyebabnya bisa berasal dari dalam dan luar rumah mereka. Jika anak sakit, terlebih dulu akan diobati dengan obat-obatan yang dijual bebas di warung. Jika sakitnya berkepanjangan dan semakin parah, dia akan dibawa ke mantri atau dokter di Puskesmas.

Berbicara masalah kesehatan, memang bukan hanya tanggung jawab orang tua di dalam sebuah keluarga. Pihak lain, terutama kalangan dari pemerintahan

desa, juga turut memperhatikan masalah kesehatan mereka. Hal ini terbukti dengan adanya penyuluhan dari aparat desa kepada keluarga nelayan tentang cara hidup sehat. Penyuluhan tersebut memang tidak diberikan secara khusus, melainkan disisipkan pada acara pengajian di lingkungan setempat.

Seperti telah disebutkan sebelumnya, dalam proses pengasuhan anak, mereka juga memperhatikan jenis kelamin anak, apakah laki-laki atau perempuan. Dalam hal-hal tertentu, mereka mengarahkan anak-anaknya agar berperilaku sesuai dengan jenis kelaminnya. Hal itu terlihat di antaranya dalam permainan anak, pemisahan tempat tidur, cara berpakaian, belajar kenelayanan, dan usia masuk sekolah.

Masa anak-anak lebih banyak diwarnai oleh aktivitas bermain. Oleh karena itu, para orang tua memberi ruang yang leluasa agar anak-anaknya bisa bermain. Mereka bisa bermain dengan saudaranya di dalam rumah; atau bermain dengan teman sebayanya di lingkungan sekitar rumah mereka, di sekolah, atau di pinggir pantai. Berbicara mengenai permainan anak, ada perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki di antaranya lebih senang bermain sepak bola, kelereng, layangan, dan bermain di pinggir pantai. Ada yang bermain di atas perahu yang sedang merapat; bermain di seputar tempat pelelangan ikan; atau memang sengaja bermain air. Sementara itu, anak perempuan lebih menyukai permainan sondah, lompat tali, loncat tinggi, atau main boneka.

Perbedaan jenis kelamin juga menjadi pertimbangan dalam pengaturan tempat tidur. Ketika anak-anak masih kecil, tidak ada masalah kalau anak laki-laki dan anak perempuan tidur bersama. Akan lain ceritanya jika mereka telah beranjak remaja. Orang tua biasanya akan memisahkan tempat tidur mereka, dengan alasan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Anak laki-laki biasanya tidur dengan anak laki-laki lagi. Sama halnya juga dengan anak perempuan.

Satu hal yang tidak kurang pentingnya dalam pengasuhan anak adalah melibatkan dia dalam pekerjaan orang tuanya. Pekerjaan tersebut ada yang sifatnya umum, dan ada pula yang khusus. Contoh pekerjaan yang sifatnya umum di antaranya pekerjaan yang biasa dilakukan seorang ibu pada umumnya, yakni mengurus rumah tangga seperti mencuci, menyapu, dan membersihkan rumah. Sementara itu, pekerjaan yang sifatnya khusus berkaitan dengan profesi orang tuanya, dalam hal ini adalah kenelayanan atau aktivitas lain di seputar kenelayanan.

Dalam masalah ini, tampak sekali perbedaan jenis kelamin menjadi pertimbangan mereka. Anak perempuan biasanya akan dilibatkan ibunya dalam pekerjaan mengurus rumah tangga, seperti membantu mencuci, memasak, mengepel, dan menyapu. Jika kebetulan ibunya juga menjadi pengolah ikan atau

penjual ikan, anak perempuannya pun biasanya ikut membantu sesuai dengan kemampuannya. Misalnya, anak diminta membantu membersihkan ikan atau menjajakan ikan yang sudah diolah.



Photo 3.4 Istri nelayan sedang mengolah ikan untuk diawetkan.

Tampak anak-anak perempuan yang diharapkan membantu mereka kelak.

Anak wanita turut dalam banyak kegiatan yang mengarahkan atau menyiapkannya menjadi wanita dewasa dalam kegiatan rumah tangga. Kegiatan itu adalah mengikutsertakan anak dalam menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga di dapur, seperti memasak, mencuci, dan mengasuh adik. Kemudian mengikutsertakan anak wanita untuk sama-sama mencari kayu ke hutan bakau. Di samping itu, ibu juga sering mengajari anak wanitanya tentang cara menjahit jaring yang koyak. Pendidikan anak wanita (pendidikan formal), nampaknya kurang begitu diperhatikan karena di samping kondisi ekonomi yang rendah dan kurang mampu, masih terdapat anggapan bahwa walau bagaimanapun, wanita tetap akan ke dapur juga. Oleh karena itu, anak wanita sebaiknya belajar mengurus rumah tangga saja, tidak usah terlalu memikirkan pendidikan formal melalui sekolah.

Adapun anak laki-laki biasanya dilibatkan dalam pekerjaan yang biasa dilakukan oleh ayahnya, termasuk sebagai nelayan di dalamnya. Pada saat-saat tertentu, seorang anak laki-laki yang berusia di atas 6 tahun dibawa oleh orang tuanya untuk turun ke laut. Anak lelaki dibawa melaut apabila kebetulan orang tuanya tidak mempunyai teman karena suatu halangan, atau tenaga anak tersebut memang cukup membantu. Anak yang dibawa orang tuanya ke laut untuk menangkap ikan itu, secara langsung telah diikutsertakan dalam kegiatan berpola yakni hidup sebagai nelayan.

Dalam kegiatan ini, anak mulai ikut dengan pola hidup sebagai nelayan di laut luas. Pada pagi subuh jam 05.00, anak telah dibangunkan oleh orang tuanya, kemudian membantu membawa alat-alat penangkap ikan dan peralatan lainnya untuk dimasukkan ke perahu. Ketika mesin mulai dihidupkan, anak membantu menimba air yang masuk ke dalam perahu.

Selama berada di laut, anak itu mendapat banyak pengetahuan yang berhubungan dengan sumber produksi, lebih banyak dari yang didapatkan dari teman di desanya karena mengalami sendiri. Ia mulai mengetahui lokasi penangkapan ikan yang menghasilkan jenis ikan tertentu, serta tanda-tanda atau tempat yang banyak ikannya. Semua itu merupakan pengetahuan yang telah dimiliki orang tuanya melalui sosialisasi seperti yang sedang dialaminya.

Anak juga mulai belajar tentang cara menggunakan alat penangkap ikan yang dibawa, di lokasi mana alat tertentu diturunkan dan lokasi mana tidak boleh, serta bagaimana cara menariknya dan memasukkannya ke dalam perahu. Lebih dari itu, anak juga mendapat pengetahuan tentang tanda-tanda bahaya di laut, seperti munculnya angin ribut, ombak besar, serta kepercayaan tentang penguasa laut. Semakin sering anak dibawa oleh orang tuanya dalam kegiatan berpola di laut, semakin banyak dan mantap pengetahuan anak itu. Semua pengetahuan itu merupakan modal yang sangat berharga bagi seorang anak bila sewaktu-waktu tenaganya diperlukan karena ayahnya sakit atau berhalangan.

Pada pukul 14.00, ketika nelayan kembali ke darat, anak dibekali pengetahuan tentang cara-cara memisahkan hasil tangkapan (yang berharga mahal dan murah), menjual hasil tangkapan, dan pembagian hasil yang didapat. Setelah di darat, dipelajari juga cara membersihkan alat penangkap ikan, membetulkan jaring yang koyak, dan mempersiapkan peralatan untuk dipakai kembali esok hari.

Yang perlu diperhatikan adalah dalam diri setiap nelayan terdapat rasa bangga dengan profesinya dan rasa kebanggaan itu diwariskan kepada anaknya, ditanamkan sejak anak masih kecil. Oleh karena itu, sebagian besar anak nelayan bercita-cita ingin mempunyai keterampilan sebagai nelayan yang lebih baik dari orang tuanya. Mereka merasa bangga menjadi nelayan karena bisa meneruskan tradisi warisan leluhur yang terkenal dengan sebutan *bangsa bahari*. Demikian juga, mereka merasa bangga telah bisa bersahabat dengan laut yang terkenal dengan keganasannya dan banyak menyimpan misteri yang jarang terungkap.

Mendidik dan membimbing anak di seputar aktivitas kenelayanan memang tidak selalu harus terjun langsung dalam pekerjaan tersebut. Ada kalanya juga berupa penuturan cerita pengalaman mereka selama menangkap ikan di laut. Cerita ini biasanya akan menimbulkan ketertarikan anak untuk ikut melaut jika sudah besar nanti. Cara lain yang biasa dilakukan oleh mereka adalah mengajaknya ikut

ambil bagian kegiatan pesta laut.

Di lingkungan masyarakat nelayan Desa Surya Bahari, masih berlangsung upacara tradisional atau pesta laut yang disebut *nadran*. Ini juga merupakan momen yang baik untuk mengenalkan tradisi masyarakat nelayan kepada anak-anak. Partisipasi anak bisa dalam berbagai bentuk, seperti membantu orang tuanya menyiapkan berbagai perlengkapan upacara; atau hanya menjadi penonton ketika kemeriahan pesta laut itu berlangsung. Sekecil apapun keterlibatan anak dalam upacara nadran, tetap kondusif bagi upaya penanaman nilai-nilai budaya kenelayanan kepada anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan.

Upaya orang tua dalam mentransfer budaya nelayan tampaknya membuahkan hasil. Terbukti dalam setiap keluarga nelayan ada anak laki-lakinya yang menjadi nelayan juga. Pola pengasuhan anak dalam keluarga nelayan sepertinya mengarah pada pemindahan profesi nelayan dari ayah kepada anaknya. Walaupun tidak menjadi nelayan, anak-anak mereka akan bekerja di bidang yang masih ada kaitannya dengan kenelayanan.

Jenis kelamin juga terjadi ketika mereka akan memasukkan anaknya ke sekolah dasar. Usia masuk sekolah untuk anak perempuan biasanya lebih muda dari anak laki-laki. Dasar petimbangannya adalah kematangan atau kedewasaan anak itu sendiri. Dalam usia yang sama, anak perempuan akan tampak lebih dewasa jika dibandingkan dengan anak laki-laki. Umumnya usia anak masuk sekolah antara 6 - 7 tahun.

Jika melihat latar belakang pendidikan formal mereka, umumnya mereka hanya mengenyam pendidikan sampai tingkat sekolah dasar, pesantren, bahkan ada yang tidak pernah sekolah sama sekali. Setiap keluarga nelayan menginginkan agar anaknya kelak mendapat kehidupan yang lebih baik dibandingkan dengan dirinya. Mereka menyadari arti pentingnya pendidikan (formal). Namun karena keadaan, misalnya pendapatan yang rendah, realita pendidikan belum seperti yang diimpikan. Mereka rela “mengorbankan” pendidikan anaknya apabila pendapatan mereka tidak mencukupi untuk itu. Yang lebih parah lagi adalah adanya sikap kepasrahan dari mereka, “*anak orang kecil toh akan jadi orang kecil juga*”. Suatu kepasrahan yang tidak dapat disalahkan, mengingat kemampuan mereka dalam membiayai anaknya bersekolah. Tetapi kalau pendapatannya cukup, mungkin pandangan mereka akan lain. Mereka masih memikirkan perutnya, belum sampai memikirkan yang lain-lain, demikian pendapat seorang tokoh masyarakat.

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa tampaknya pendidikan formal memang merupakan alternatif kebutuhan terakhir untuk dipikirkan atau dimasukkan ke dalam urutan konsep kebutuhan pokok. Kenyataan ini semakin memperkuat

dugaan bahwa sebagian besar nelayan tidak mampu membebaskan diri dari profesi nelayan. Turun-temurun mereka adalah nelayan, lengkap dengan pewarisan taraf kehidupannya yang berada di sekitar garis kemiskinan atau bahkan mungkin semakin turun di bawah garis kemiskinan karena tingkat pendidikan serta sumber daya manusia yang rendah (*unskilled labour*) yang dimiliki oleh nelayan, tidak berkembang sedangkan jumlah nelayan semakin bertambah. Dengan demikian, cepat atau lambat akan semakin mengurangi tingkat pendapatan. Hal ini berarti bahwa jika masyarakat nelayan tidak dapat tersalurkan ke bidang lain atau ke bidang yang berkaitan dengan usaha perikanan, maka akan menimbulkan kemiskinan yang semakin memprihatinkan.

Sebagian besar responden mengakui bahwa mereka sangat jarang memenuhi undangan pertemuan yang diadakan di Balai Desa karena pelaksanaannya kadang-kadang bentrok dengan pola kerja nelayan yang sebagian besar waktunya dihabiskan di laut. Mereka seringkali mewakilkannya kepada isteri, anaknya yang cukup dewasa, atau kerabatnya. Tidak setiap hasil keputusan pertemuan akan mereka terima dengan tangan terbuka, terutama yang berkaitan dengan masalah pengalokasian dana. Alasan sulitnya nelayan mengeluarkan dana antara lain karena mereka merasa pendapatan yang diperoleh hanya cukup untuk hidup hari itu juga, bahkan cenderung kurang. Mereka merasa belum mempunyai kelebihan uang untuk disumbangkan demi pembangunan desanya.

Tokoh-tokoh masyarakat seringkali mendatangi rumah-rumah penduduk. Mereka membimbing masyarakat dalam berbagai hal karena tokoh masyarakat ini pada umumnya merupakan orang-orang tua di desa yang dianggap bijaksana dan memiliki pengetahuan luas di pelbagai bidang. Mereka melaksanakan kegiatan secara sukarela dengan menggunakan pendekatan secara kekeluargaan. Warga masyarakat tidak merasa digurui atau diperintah karena bimbingan dilakukan sambil ngobrol / anjang sono baik di rumah, warung, jalan maupun di perahu. Masalah-masalah yang dikemukakan dalam bimbingan ini antara lain pentingnya hidup sehat dan terencana, mengajak menjauhi hal-hal yang bisa merusak fisik dan mental seperti minum minuman keras, serta masalah-masalah sosial lainnya.

Beberapa informan menuturkan bahwa ajakan para tokoh masyarakat dan aparat desa untuk hidup sehat dan menjauhi kebiasaan hidup boros, bukannya tidak dituruti. Ajakan untuk hidup sehat sulit dilakukan karena kondisi perumahan yang berdesakan dalam lokasi permukiman yang sempit. Mereka pun berusaha untuk selalu membersihkan diri, berpakaian bersih atau memakan hidangan yang tercuci bersih dan dimasak. Tetapi, oleh karena sumber air bersih yang tersedia relatif kurang dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk, maka kadang-kadang

mereka enggan antri untuk mandi atau mencuci pakaiannya di sumur bor / artesis. Mereka merasa lebih praktis mandi di sungai / menggunakan air sungai atau di tambak. Walaupun demikian, untuk minum dan memasak, mereka berusaha untuk selalu menggunakan air bersih dari sumur bor / artesis.

Demikian juga perumahan mereka, walaupun berusaha untuk selalu dibersihkan atau dirapikan sesuai anjuran tokoh masyarakat, tetapi kelihatannya selalu berantakan dan kumuh. Peralatan rumah tangga dan peralatan produksi (untuk menangkap ikan), seringkali tampak menumpuk di mana saja di setiap sudut rumah. Oleh karena kondisi seperti itu, mereka menjadi malas untuk membersihkan atau merapkannya kembali. Jelas, dengan kondisi seperti itu, hidup sehat nampaknya sulit untuk diwujudkan.

Demikian juga apabila ada anggota keluarga yang sakit, umumnya cukup diobati dengan obat yang tersedia dan dapat dibeli di warung terdekat. Apalagi apabila hanya gejala sakit atau sakitnya tidak terlalu parah, mereka akan membiarkannya dengan anggapan kelak akan sembuh sendiri.

Sebagian besar keluarga nelayan menyatakan belum menjadi akseptor KB walaupun aparat desa sering meminta dan kadang-kadang dengan paksaan, untuk menjadi akseptor KB kepada setiap PUS (Pasangan Usia Subur). Di kalangan nelayan masih ada anggapan, "*banyak anak banyak rejeki*", terutama mereka menginginkan anak laki-laki karena setelah besar nanti diharapkan ikut membantu ekonomi orang tuanya (dengan menjadi nelayan juga). Dengan demikian hidup terencana menurut mereka, anak dididik untuk terampil bekerja sehingga kelak bisa membantu ekonomi atau meningkatkan taraf hidup orang tua/keluarganya.

Mengenai kebiasaan hidup boros pada beberapa nelayan, erat hubungannya dengan anggapan mereka bahwa "*hasil hari ini untuk hidup hari ini*", karena untuk esok mereka bisa ke laut lagi yang merupakan "*ladang*" tinggal memanen, tidak harus menunggu seperti pada usaha pertanian. Oleh karena itu, penghasilan yang didapat kadang-kadang dihaburkan sampai habis hari itu juga karena beranggapan keesokan harinya akan memegang uang kembali. Penghamburan tersebut umumnya terjadi ketika hasil tangkapan melimpah.

Beberapa tokoh masyarakat dan aparat desa menyatakan bahwa sulit untuk merubah kebiasaan hidup boros pada masyarakat nelayan karena kuatnya anggapan dan telah tersosialisasi dari generasi ke generasi. Mungkin, diperlukan cara yang khusus untuk bisa merubah anggapan bahwa laut selalu siap memberi kekayaannya untuk para nelayan karena suatu saat sumber produksi alamiah tersebut akan berkurang kandungannya.

C. Kondisi Perumahan

Pada umumnya denyut jantung kehidupan masyarakat di suatu wilayah terletak di perkampungan atau perumahan, karena di sanalah tempatnya berbagai aktivitas kehidupan sosial berlangsung. Keberadaan arena sosial tersebut, tentu saja didukung berbagai sarana fisik yang sengaja dibuat untuk menjamin terlaksananya berbagai hubungan kemasyarakatan.

Seperti telah diungkap pada bab II, pola permukiman masyarakat nelayan di Desa Surya Bahari menunjukkan pola mengelompok dan beberapa di antaranya secara linier mengikuti jalan desa. Sarana kelengkapan permukiman seperti pasar, lapangan sepakbola, mesjid, sekolah dasar, dan jantor kepala desa letaknya berdekatan dan berlokasi di Dusun I (Kampung Cituis).

Salah satu komponen permukiman yang paling penting adalah rumah. Rumah dalam bahasa Sunda disebut *imah*, kata lemes (halus) untuk *imah* adalah bumi. Menurut pendapat salah seorang tokoh masyarakat di Desa Surya Bahari, rumah bukan hanya merupakan tempat tinggal, tempat berlindung dari terik matahari, binatang buas, dan hujan, tetapi memiliki fungsi sosial, ekonomi dan kultural. Oleh karena itu, tempat tinggal atau rumah dapat menjadi indikator keadaan tingkat sosial-ekonomi bagi penghuninya, atau dapat digunakan sebagai barometer untuk mengetahui tingkat kemakmuran dan keadaan kesehatan penduduk. Rumah yang layak dari segi kualitas fisik serta lingkungan yang menyenangkan merupakan kebutuhan dasar manusia. Namun apabila rumah yang ditempati kurang memenuhi syarat, maka dapat diduga bahwa penghuninya belum mampu memenuhi kebutuhan dasar lainnya seperti sandang dan pangan.

Di Desa Surya Bahari terdapat tiga dusun dan ketiganya merupakan kawasan padat dengan rumah-rumah nelayan, terutama Dusun I (Cituis). Tingginya tingkat kepadatan permukiman di kawasan pinggiran pantai tersebut disebabkan para nelayan berebut tempat yang paling dekat dan cepat untuk bisa akses ke pantai. Dengan lokasi rumah yang dekat pantai atau Sungai Cituis, nelayan tidak membutuhkan waktu yang lama atau tenaga yang banyak menuju perahu yang akan berangkat kerja atau kalau pulang dari melaut mereka akan segera sampai di rumah.



Photo 3.5 Gang / ruas jalan di antara rumah penduduk
yang telah diperkeras dengan adukan semen

Jalan dan gang-gang sempit merupakan sarana yang memudahkan akses penduduk keluar masuk permukimannya. Kondisi jalan yang membelah dusun kurang baik, sebagian diperkeras dengan adukan semen, sebagian lagi hanya berupa jalan tanah. Akibatnya, jika hujan tiba kondisinya sangat becek.

Rumah-rumah penduduk menghadap jalan-jalan utama desa dan gang-gang yang sempit. Kadang-kadang, jalan dan gang sempit berubah fungsi menjadi halaman rumah karena jarak antar rumah saling berhimpitan. Rumah-rumah yang ada di pinggir jalan utama desa rata-rata kondisinya cukup baik. Beberapa rumah permanen dengan kondisi yang relatif baik, juga terdapat di dalam kampung. Akan tetapi, kondisi rumah yang sangat sederhana, sebagian besar mewarnai kampung-kampung nelayan. Komposisi rumah yang padat dengan jarak minimal (hampir berdempetan), mengurangi ruang terbuka yang memungkinkan udara bisa masuk dengan leluasa. Akibatnya, kondisi kampung menjadi terasa pengap.

Oleh karena rumah-rumah atau permukiman nelayan Desa Surya Bahari terletak agak jauh dari pantai ($\pm$ 500 meter) dan terhalang hutan bakau, permukiman penduduk cukup bebas dari banjir yang diakibatkan meluapnya air laut atau ombak laut yang besar karena hujan dan angin pada musim penghujan. Walaupun demikian, Sungai Cituis kadang-kadang airnya meluap dan menggenangi sebagian permukiman sehingga menyebabkan tanah pekarangan menjadi becek.

Berdasarkan kondisi fisiknya, rumah-rumah di Desa Surya Bahari dibagi dalam tiga kategori (N = 1.075) :

1. Rumah *permanen* (memenuhi syarat kesehatan) berjumlah 45 buah (4,19 %).
2. Rumah *semipermanen* (cukup memenuhi syarat kesehatan) 980 buah (91,16 %).
3. Rumah *nonpermanen* (kurang atau tidak memenuhi syarat kesehatan) 50 rumah atau sekitar 4,65 %.

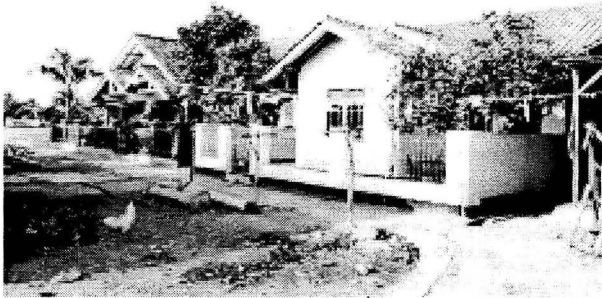


Photo 3.6 Rumah permanen

Jenis rumah tersebut dapat dipakai untuk mengidentifikasi status sosial-ekonomi pemiliknya. Rumah permanen dimiliki oleh penduduk yang mampu secara sosial-ekonomi, seperti petani berlahan luas, pemilik perahu, dan pedagang ikan berskala besar. Sebagian besar rumah-rumah semipermanen dan nonpermanen dimiliki oleh *pandega* atau buruh nelayan.



Photo 3.7 Rumah semipermanen

Bentuk arsitektur rumah bergantung pada kategori rumahnya. Rumah-rumah permanen dibangun dengan gaya arsitektur modern, sedangkan rumah-rumah semipermanen dan nonpermanen bersifat tradisional.

Menyimak kondisi perumahan nelayan, terutama yang bersifat semipermanen dan nonpermanen, nampaknya tidak terlalu diperhatikan keluarga nelayan. Kalau tidak rusak sama sekali, menurut sebagian besar responden, mereka enggan mengeluarkan uang untuk memperbaiki rumahnya. Hal seperti itulah yang nampaknya membuat permukiman nelayan seperti tidak terurus, kotor, dan berdesakan dalam daerah yang sempit.



Photo 3.8 Rumah nonpermanen

Berdasarkan hasil pengamatan, diperoleh gambaran bahwa kondisi rumah tempat tinggal sebagian besar keluarga nelayan dalam kondisi buruk. Tidak jarang, rumah tangga nelayan hanya memiliki rumah terdiri atas ruang berukuran 2,5 X 2,5 meter persegi, yang digunakan untuk memasak setiap hari, tidur, menerima tamu, istirahat dan kegiatan-kegiatan keluarga lainnya. Setiap tamu diterima di tempat tidur mereka yang terbuat dari balai-balai kecil, atau di tikar karena tidak mempunyai kursi satupun. Bahan-bahan bangunan yang dipergunakan membuat rumah, juga sederhana dan murah bahkan banyak di antaranya dibeli dari bahan-bahan bekas atau sisa dan dindingnya banyak ditemplei kertas koran untuk menutupi lobang-lobang.

Sebuah rumah, walaupun kondisinya memprihatinkan dengan ukuran tidak terlalu besar dan hampir tidak ada penyekat antarruangan, dihuni oleh beberapa orang anggota keluarga. Mereka rela berdesakan di ruang sempit, bahkan apabila

ada tambahan anggota keluarga baik kerabat maupun teman yang kenal dekat, yang ikut menginap atau bahkan kemudian menetap, akan diterima dan tinggal bersama sampai bisa berdiri sendiri. Tabel 3.9 di bawah ini menunjukkan banyaknya responden yang belum memiliki rumah sendiri, mereka masih menumpang di rumah kerabat, teman dekat, orang tua, atau menyewa rumah / kamar.

Tabel 3.9
Status Rumah Tinggal Responden

No.	Status Rumah Tinggal	F	%
1.	Milik sendiri	19	38,00
2.	Menumpang di rumah kerabat / saudara	11	22,00
3.	Menumpang di rumah teman dekat	4	8,00
4.	Menumpang di rumah orang tua	14	28,00
5.	Menyewa/kontrak rumah	2	4,00
J u m l a h		50	100,00

Sumber : Data Primer Penelitian 2003

Data di atas menunjukkan bahwa 38 % responden menyatakan memiliki dan tinggal di rumah sendiri, selebihnya menyatakan belum memiliki rumah sendiri dan masih menumpang di rumah kerabat/saudara, menumpang di rumah teman dekat, menumpang di rumah orang tua, dan menyewa/kontrak kamar/rumah. Data ini menyiratkan masih kuatnya perasaan, ikatan dan sifat kekeluargaan di antara para nelayan. Lebih lanjut jika melihat banyaknya anggota keluarga dalam sebuah rumah, dapat dikatakan bahwa keluarga nelayan cenderung merupakan keluarga luas yang sebagian besar terdiri atas lebih dari satu keluarga batih.

Sebagian besar rumah penduduk dibuat dari bahan (kerangka) kayu dengan atap sirap atau rumbia. Kondisi ini menyebabkan mudah terjadi kebakaran, terutama pada waktu musim kemarau. Apalagi bila dilihat dari letak rumah yang tidak teratur dan berhimpitan dalam gubuk-gubuk kecil di sekitar daerah yang relatif sempit, terutama di sepanjang tepi sungai dan tambak. Jika ditinjau dari jumlah penduduk, maka fasilitas perumahan bagi penduduk adalah 4 berbanding 1, berarti 1 rumah rata-rata dihuni oleh 4 orang. Pada kenyataannya, banyak sekali rumah penduduk yang dihuni oleh lebih dari 6 anggota keluarga.

Di samping ukuran rumah yang kecil dibanding dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, tata letak bangunan juga tidak menentu dan jarak antar rumah hampir

tidak ada. Lingkungan di sekitar rumah mereka juga kurang memenuhi syarat kesehatan. Di beberapa sudut kampung, memang telah dibangun sumur bor / artesis dan sumur pompa. Tetapi jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah penduduk yang ada, juga tidak dilengkapi dengan WC sehingga penduduk tetap terbiasa melepaskan hajat di sekitar tambak atau sungai. Di tepi-tepi sungai atau tambak, jamban-jamban darurat dibangun dalam bentuk panggung kecil yang menjorok ke sungai atau tambak. Tiang penyangga dan jembatan kecil untuk mencapai tempat itu terbuat dari bambu dengan sekedar penutup tanpa atap untuk melindungi dari penglihatan orang. Cara demikian, lebih memperkotor lagi tepi sungai yang sebelumnya telah dipenuhi sampah dan berjejanya perahu. Sebagian lagi melaksanakan hajat di tambak-tambak yang kebanyakan tidak jauh dari rumah mereka.



Photo 3.9 Rumah semipermanen dengan saluran air (got) di sampingnya

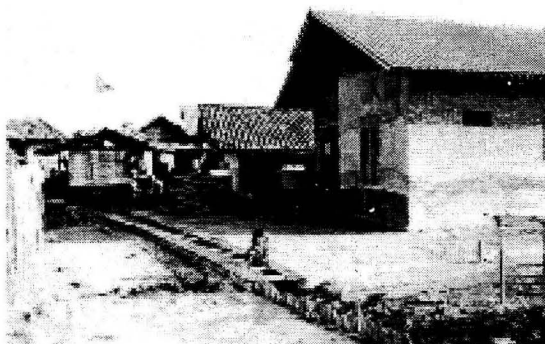


Photo 3.10 Salah satu sudut permukiman. Tampak saluran air (got) yang kurang layak, dipakai anak nelayan untuk buang hajat

Sebagian penduduk terlihat membuat sumur di pekarangannya, terutama untuk keperluan mandi dan cuci. Karena kondisi tanahnya yang lembek dan rawa, air sumur kurang bersih sehingga kurang memenuhi syarat bagi pemenuhan kebutuhan air bersih keluarga. Oleh karena itu, mereka merasa lebih baik antri ke sumur pompa / artesis yang jumlahnya hanya beberapa buah daripada menggunakan air sumur yang agak asin.



Photo 3.11 Sumur air tawar yang hanya digunakan untuk mencuci ikan

Penerangan rumah-rumah penduduk menggunakan listrik PLN bagi yang mampu, atau menggunakan lampu minyak tanah bagi yang kurang mampu. Sebagian besar rumah tangga *pandega* menggunakan lampu minyak tanah karena tidak memiliki kemampuan untuk memasang listrik sendiri. Ada pula rumah tangga nelayan yang dialiri listrik dari tetangganya yang memasang listrik PLN. Setiap 5 - 10 watt dikenai biaya Rp. 2.000 - Rp. 2.500 per bulan.

Apabila disimak lebih seksama, kampung-kampung nelayan yang padat ternyata tidak hanya membatasi keleluasaan gerak penduduknya, tetapi juga menyumbang terhadap pemeliharaan keamanan kampung dari gangguan pencuri. Di desa ini, tindak kriminal pencurian atau penjarahan harta benda penduduk hampir tidak pernah terjadi. Siapa pun orang luar yang masuk ke kampung-kampung nelayan, baik siang hari maupun malam hari, akan mudah dikenali, dan jika gerak-geriknya mencurigakan akan mudah diawasi. Kondisi demikian ditunjang oleh hubungan kekerabatan antarpenduduk kampung yang sangat kental.

Di samping itu, kepadatan kampung memudahkan penyebaran informasi apa pun di kalangan penduduk. Pertengkaran pada sebuah keluarga (antara suami dan isteri) akan mudah diketahui oleh orang lain. Demikian pula jika ada sebuah perahu memperoleh hasil tangkapan ikan yang banyak, dengan mudah akan menyebar dan diketahui oleh seluruh penduduk. Di kampung nelayan, sangat sulit menyimpan rahasia pribadi atau rumah tangga karena yang ada hanyalah rahasia umum, *plus* beraneka ragam gosip. Gosip-gosip negatif tentang kehidupan rumah tangga orang-orang tertentu merupakan cerita yang mudah diperoleh oleh penduduk.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa kesehatan masyarakat nelayan pada umumnya belum memuaskan. Hal itu terjadi karena keadaan permukimannya belum teratur dan tingkat pendidikan yang masih rendah memungkinkan mereka kurang menyadari arti penting kesehatan. Keadaan perumahan serta pembuangan sampah dan kotoran manusia belum mendapat perhatian yang serius bagi mereka karena setiap harinya sibuk untuk mencari penghasilan untuk bisa melanjutkan kehidupan (tetap *survive*).

D. Religi dan Sistem Pengetahuan

Kegiatan nelayan adalah kegiatan yang beresiko tinggi karena tidak hanya menyangkut besarnya modal yang dipertaruhkan dan pencarian keuntungan yang spekulatif, tetapi juga berkaitan dengan keselamatan jiwa. Gangguan alam yang datang setiap saat, seperti ombak dan angin yang besar, adalah hal-hal yang dapat mengancam keselamatan nelayan. Dengan demikian, ada dua hal yang selalu menjadi pusat perhatian nelayan ketika perahu sedang beroperasi atau melaut, yaitu masalah keselamatan jiwa dan perolehan rezeki atau keberuntungan. Mereka berharap keselamatan dan keberuntungan berpihak kepada dirinya sekaligus.

Untuk memperoleh keselamatan dan keberuntungan, masyarakat nelayan mengembangkan religi dan sistem pengetahuannya. Religi yang dimiliki oleh para nelayan sangat dipengaruhi oleh sistem pengetahuannya. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, membuat mereka selalu menyandarkan segala keputusan atau sikapnya berdasarkan pengalaman atau perkataan orang-orang yang lebih tua. Mereka sangat menghormati para *mantan* nelayan yang telah berusia tua. Segala sesuatu yang kurang dimengerti, akan didiskusikan dengan para orang tua mantan nelayan tersebut. Terutama untuk hal-hal yang berhubungan dengan kepercayaan akan hal-hal yang gaib atau aturan-aturan religius yang harus ditaati, dan pengetahuan yang berhubungan dengan mata pencaharian sebagai nelayan seperti tempat-tempat yang baik untuk menebarkan jaring, hari atau waktu yang baik untuk melaut, jenis ikan, dan pengenalan musim.

Sebagian besar masyarakat nelayan Desa Surya Bahari, memeluk agama Islam. Namun demikian, pola kepercayaan lama masih tampak membaur dalam perilaku kepercayaan masyarakat pada umumnya. Bentuk-bentuk kepercayaan terhadap makhluk gaib dan mitos tertentu masih tampak dianut oleh masyarakat, gejalanya tampak seperti : (1) Adanya anggapan terhadap tempat-tempat tertentu yang bersifat keramat (seperti di makam, jalan, hutan, sungai, dan lain-lain); (2) Adanya anggapan tertentu terhadap kesaktian dari sesuatu benda sebagai pembawa rejeki dan penangkal bahaya atau kecelakaan (misalnya keris, jimat, permata, dan lain-lain); (3) Adanya anggapan mengenai penyakit tertentu yang disebabkan oleh makhluk halus (seperti penyakit kronis yang tidak dapat disembuhkan dengan cara pengobatan medis); (4) Adanya hari-hari tertentu yang dianggap baik atau pantang untuk melakukan suatu pekerjaan (seperti melaut, bepergian jauh, mendirikan rumah, melangsungkan perkawinan, dan lain-lain); dan (5) Adanya hewan atau burung serta benda-benda tertentu yang kadang-kadang memperlihatkan gerak atau memperdengarkan suara tertentu yang keadaannya tidak seperti biasanya, yang dianggap sebagai simbol akan datangnya keberuntungan atau kemalangan.

Menurut informan, pada tahun 1960-an, kepercayaan-kepercayaan serupa itu sangat ketat dan banyak mempengaruhi pola sikap dan tindakan penduduk. Dengan perantara dukun, mereka mempersembahkan sajian-sajian kepada makhluk halus atau benda-benda dan pada tempat-tempat yang dianggap keramat. Sajian-sajian dapat berupa makanan, korban hewan, atau barang-barang tertentu. Tujuannya adalah supaya terhindar dari bahaya dan murah rejeki. Sekarang, kegiatan-kegiatan seperti itu relatif berkurang. Pertimbangannya adalah upacara-upacara atau kegiatan tersebut memerlukan biaya tidak sedikit, sedangkan pada masa sekarang sebagian besar nelayan memiliki pendapatan yang sangat kecil dibandingkan zaman dahulu pada saat jumlah nelayan tidak sebanyak sekarang.

Kegiatan dalam rangka upacara-upacara keagamaan yang selalu diperingati dengan penuh khidmat oleh seluruh masyarakat Desa Surya Bahari adalah hari-hari besar Islam seperti Hari Idul Fitri dan Hari Raya Haji (Hari Idul Adha). Pada Hari Idul Fitri masyarakat berusaha untuk berkumpul dengan keluarga dan kerabatnya. Mereka saling mengunjungi antar kerabat, tetangga atau handai taulan yang lainnya. Pada saat hari raya ini, mereka berusaha bergembira dan seolah melupakan kepahitan hidup. Setiap keluarga menyiapkan hidangan yang agak berbeda dengan hari biasa. Bagi anak-anak, hari itu mendatangkan kebanggaan tersendiri karena mereka menggunakan pakaian baru, dan orang tua mereka pun berusaha memakai pakaian terbaru atau paling tidak yang terbersih.

Dalam rangka menyambut hari raya ini, para nelayan telah melakukan persiapan jauh sebelum hari raya tiba. Mereka berusaha menabung dengan menyisihkan sebagian kecil penghasilan untuk keperluan hari raya. Anggota keluarga

yang berperan melakukan ini adalah istri, karena umumnya keuangan keluarga dikelola oleh istri mereka. Biaya untuk keperluan hari raya ini relatif besar menurut ukuran nelayan dengan penghasilan paspasan. Meskipun demikian, mereka berusaha untuk selalu menyediakannya dan terkesan memaksakan diri, meskipun harus berhutang. Tidak jarang, mereka merelakan harta-harta milik mereka untuk dijual atau digadaikan. Bagi mereka, yang penting dapat bergembira dan berkumpul bersama keluarga pada hari raya Idul Fitri.

Peringatan hari raya Idul Adha atau hari raya Qurban tidak semeriah hari raya Idul Fitri, walaupun tetap dianggap sebagai hari istimewa. Pada hari ini, sebagian masyarakat terutama orang yang mampu atau tergolong kaya mengadakan Qurban atau menyembelih hewan Qurban, seperti kambing dan sapi. Daging hewan Qurban dibagikan kepada masyarakat setempat yang umumnya termasuk masyarakat tidak mampu.

Hari besar lainnya yang diperingati adalah Maulid Nabi dan Isro Miradj atau sering disebut juga *Rajaban* karena dirayakan pada bulan Rajab. Kedua hari besar ini diperingati dengan mengadakan syukuran yang diisi ceramah keagamaan atau tablig akbar. Mubaligh atau penceramah biasanya didatangkan dari luar Desa Surya Bahari.

Upaya mendatangkan penceramah dari luar desa dimaksudkan untuk lebih meningkatkan keimanan dan dapat menarik minat masyarakat Desa Surya Bahari dan sekitarnya untuk mengikuti acara tersebut. Beberapa informan, menyatakan bahwa upaya ini cukup berhasil dengan baik.

Dana yang dipergunakan dalam penyelenggaraan peringatan hari-hari besar keagamaan diperoleh dari kas desa dan sumbangan dari masyarakat, terutama masyarakat yang tergolong mampu. Biasanya, dana dari masyarakat relatif cukup besar. Hal ini menunjukkan masih adanya perhatian yang baik dari masyarakat terhadap acara-acara keagamaan.

Berdasarkan gambaran tersebut, dapat dikatakan bahwa ajaran agama masih tetap menjadi acuan penting dalam kehidupan masyarakat Desa Surya Bahari. Dengan segala keterbatasan dan di tengah kesibukannya mencari nafkah, mereka masih tetap berusaha untuk melaksanakan ajaran agamanya, seperti terlihat pada kegiatan di atas. Hal tersebut juga sekaligus mencerminkan bahwa masyarakat berupaya untuk taat dalam melaksanakan ajaran agamanya.

Di samping melaksanakan upacara-upacara keagamaan, mereka juga masih melakukan upacara-upacara tradisional walaupun dalam skala kecil (baik pelaksanaannya maupun biayanya), yang pada intinya mengakui kekuatan-kekuatan gaib yang ada di sekitar permukiman mereka, terutama yang menyangkut sumber produksi (sungai dan laut).

Jenis upacara yang dilakukan warga adalah upacara selamatn, upacara lepas nazar, dan upacara syukuran. Upacara selamatn dilaksanakan pada awal kegiatan atau sebelum melakukan suatu kegiatan. Upacara syukuran dilaksanakan setelah selesai melakukan suatu kegiatan. Upacara lepas nazar dilaksanakan apabila seseorang melakukan nazar atau janji terhadap sesuatu, seperti jika sembuh dari penyakitnya, jika memperoleh rejeki yang melimpah, dan lain-lain.

Upacara selamatn biasa dilakukan secara rutin pada saat nelayan akan melaut dan setelah pulang melaut. Upacara ini dilakukan dengan cara berdoa bersama. Upacara selamatn yang lebih besar adalah saat peluncuran perahu baru ke laut. Upacara ini melibatkan beberapa kelompok nelayan, kerabat, dan sahabat yang sengaja diundang. Upacara dipimpin oleh penghulu agama atau *sesepuh* (orang yang dituakan), bertempat di rumah pemilik perahu atau di atas perahu yang akan diluncurkan. Upacara diiringi dengan doa bersama bagi keselamatan pengguna perahu tersebut. Makanan yang dihidangkan biasanya merupakan makanan istimewa yang jarang bahkan tidak pernah mereka santap setiap hari, seperti nasi kuning atau nasi tumpeng dengan panggang ayam. Seperangkat daun sirih-pinang diletakkan pada pusat perahu sebagai simbol penghormatan terhadap arwah nenek moyang. Keesokan harinya, perahu baru tersebut dilepaskan ke laut untuk melakukan pelayaran pertama menangkap ikan bersama-sama perahu lainnya.

Upacara syukuran diadakan di rumah untuk mensyukuri rejeki melimpah yang telah dihasilkan selama musim banyak ikan. Cara upacaranya sama dengan upacara selamatn; beberapa hidangan dibawa dan dilabuhkan di tengah laut. Sumber rejeki dari laut, maka harus pula dipulangkan ke laut, itulah persepsi nelayan yang melatarbelakangi adanya makanan yang dilepaskan di tengah laut.

Upacara lepas nazar dilakukan apabila seseorang berjanji akan melakukan upacara, misalnya karena mendapatkan berkah memperoleh hasil (ikan) yang banyak sekali atau sembuh dari penyakit. Pelaksanaan upacara dilakukan di rumah, tengah laut, kuburan, tempat keramat atau sesuai dengan nazar dimaksud. Sesaji yang dipersiapkan adalah sebutir telur ayam kampung, nasi, cerutu, dan bunga rampai. Setelah berdoa yang dipimpin oleh seorang penghulu atau *sesepuh*, sesaji tersebut dibuang ke laut atau di tempat yang telah ditentukan.

Upacara-upacara tersebut umumnya dilakukan oleh para *juragan* yang memiliki modal / uang relatif lebih banyak daripada nelayan biasa. Walaupun demikian, setiap nelayan akan berusaha untuk melakukan upacara-upacara tersebut meskipun dengan pelaksanaan yang sederhana dan cukup dihadiri oleh anggota keluarga dekat.

Upacara syukuran dengan skala yang relatif besar, dalam arti melibatkan hampir seluruh keluarga nelayan adalah pesta laut yang disebut *nadran*. Upacara

tradisional ini pada dasarnya merupakan ungkapan syukur nelayan atas kemurahan Yang Mahakuasa, yang telah memberi sumber penghidupan dan kehidupan berupa laut dengan segala isinya. Biaya penyelenggaraan berasal dari para nelayan sendiri yang dipotong secara langsung oleh KUD ketika menjual hasil melautnya di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Oleh karena dipotong langsung, biaya penyelenggaraan yang umumnya mencapai puluhan juta rupiah, menjadi tidak terasa lagi sebagai beban bagi para nelayan.

Pesta laut yang merupakan pesta para nelayan, diselenggarakan selama satu minggu. Berbagai keramaian seperti pertunjukan kesenian, pasar kaget, lomba dan festival, menyemarakkan suasana pesta. Para *juragan* menghias perahu dengan berbagai ornamen dan asesoris.

Puncak acara, yang umumnya berlangsung antara bulan Juli - September ini, adalah melabuhkan/melarung sesajian ke tengah laut. Perahu nelayan yang warna-warni ikut mengiringi perahu yang berisi sesajian sampai di tempat tertentu di tengah laut. Setelah melarung sesajian, nelayan kembali ke darat dan makan bersama.

Selain upacara tersebut, dilakukan pula upacara-upacara yang berkaitan dengan siklus hidup manusia atau "*life cycle arrangement*" seperti upacara tujuh bulan, kelahiran, perkawinan, khitanan, dan kematian. Upacara-upacara tersebut dilakukan secara sederhana sesuai kemampuan penyelenggara upacara. Umumnya, upacara dilakukan di rumah, tanpa prosesi yang rumit, dihadiri oleh para kerabat dan tetangga dekat, dengan cara berdoa bersama dan ditutup dengan makan bersama. Pada upacara perkawinan, selain berdoa bersama, diadakan juga pentas kesenian. Umumnya setelah pengantin *dirapalan* (akad nikah), jika tidak mengundang (menyewa) grup kesenian, cukup dengan memutar kaset melalui pengeras suara sampai larut malam. Bagi yang mampu, pesta nikah diramaikan dengan *organ tunggal*, yaitu pentas kesenian yang menghadirkan satu orang pemain organ dan beberapa penyanyi yang umumnya membawakan lagu-lagu dangdut.

Penyelenggaraan khitanan lebih sederhana lagi dibandingkan dengan upacara perkawinan. Kadang-kadang penyelenggara hajat tidak mengundang tamu tetapi cukup memberitahu tetangga dekat dan kerabat saja, dengan hidangan yang disajikan sederhana berupa tumpeng dan panggang ayam (*bakakak*) untuk anak yang dikhitani.

Pada upacara kematian, perlakuan terhadap mayat menggunakan cara-cara ajaran agama Islam, yaitu mayat dimandikan, dikafani, dishalatkan, dan dikuburkan. Pada saat mayat diturunkan ke liang lahat dibacakan adzan. Selesai dikuburkan, diselenggarakan doa di atas pusara. Beberapa penduduk menyelenggarakan *tahlilan*

di rumah yang meninggal mulai malam pertama sampai ketujuh, dan selanjutnya hari setiap malam Jumat sampai hari keempatpuluh, keseratus dan keseribu.

Selain mempercayai adanya alam gaib dan makhluk halus, yang dimanifestasikan dengan persembahan-persembahan pada upacara tradisional di atas, mereka pun mempercayai adanya makhluk gaib dan mitos yang tampak pada tempat keramat, benda keramat, penyakit tertentu, binatang keramat, dan hari baik - hari buruk.

Tempat yang dianggap keramat oleh masyarakat Desa Surya Bahari adalah Makam Keramat Wali Riman yang meninggal pada tahun 1940-an di Dusun III (Kampung Sugri). Wali Riman dianggap sebagai leluhur atau nenek moyang masyarakat setempat dan dipercaya sebagai salah seorang pendiri Desa Surya Bahari. Pada masa hidupnya, Wali Riman dianggap orang yang sakti mandraguna. Salah satu kesaktiannya adalah apabila beliau lewat, ikan yang mati pada hidup lagi. Oleh karena itu, sebagian masyarakat sering berziarah ke makam Wali Riman, terutama setiap malam Jum'at Kliwon dan bulan Maulud. Mereka percaya dan yakin bahwa arwah Wali Riman dapat mendengarkan dan masih melindungi kehidupan dan penghidupan di Desa Surya Bahari.

Selain tempat keramat, masyarakat pun mempercayai benda-benda keramat yang merupakan peninggalan para leluhur, seperti keris, mahkota, dan bokor mas. Benda-benda tersebut dipercaya dan diyakini dapat mendatangkan rejeki dan menolak bahaya (tolak bala) jika diurus dan dirawat dengan baik. Sebaliknya, jika ditelantarkan akan mendatangkan malapetaka.

Selain itu, masyarakat mempercayai adanya penyakit akibat gangguan makhluk gaib, seperti penyakit *kesurupan* dan *kesambet*. *Kesurupan* adalah sakit yang disebabkan jasad kasar (badan) seseorang dimasuki oleh roh orang yang telah meninggal, biasanya leluhur atau nenek moyangnya. Orang yang *kesurupan* tidak sadar diri. Dia bertingkah laku dan berkata dengan suara yang sama dengan orang atau leluhurnya yang rohnya sedang masuk ke badan orang *kesurupan* tersebut. Biasanya roh tersebut akan mengatakan pesan-pesan atau ancaman-ancaman bagi orang lain. Untuk mengobati orang *kesurupan* dilakukan dengan cara spiritual, yaitu dengan membacakan mantra-mantra atau ayat-ayat suci Al Quran. Hal ini dilakukan karena penyakit *kesurupan* bukan penyakit badan yang dapat diobati dengan cara medis. *Kesambet* adalah sakit yang disebabkan oleh makhluk gaib yang merasa terganggu atau diganggu oleh manusia. Orang yang *kesambet* biasanya menderita sakit yang parah dengan badan kejang-kejang dan mata melotot. Penyakit ini termasuk sakit non medis, sehingga harus diobati secara spiritual oleh orang-orang tertentu, yaitu *orang pintar*. *Orang pintar* ini akan dapat menyembuhkannya dengan

cara mendamaikan antara makhluk gaib pengganggu dengan roh orang yang *kesambet*. Sarana untuk mendamaikan ini digunakan bacaan-bacaan yang berasal dari ayat-ayat suci Al Quran.

Sementara itu, kepercayaan tentang hari baik dan hari buruk pada masyarakat nelayan Desa Surya Bahari sudah hampir hilang. Pada saat ini, masyarakat menganggap semua hari baik untuk beraktivitas, termasuk melaut. Menurut mereka yang penting adalah niat baik.

Pada masa lalu, orang tua mereka dan leluhurnya mempercayai adanya hari baik dan hari buruk, seperti hari Jumat dan malam Jumat Kliwon. Mereka sangat percaya bahwa hari Jumat merupakan hari naas sehingga tidak boleh melaut. Apabila melaut pada hari Jumat, tidak akan memperoleh ikan atau akan mengalami musibah. Malam Jumat Kliwon dianggap banyak berkeliaran hantu dan sejenisnya. Pada malam tersebut mereka tidak berani keluar rumah apalagi sampai larut malam, sebab takut bertemu hantu. Biasanya pada malam itu, masyarakat membuat sesaji berupa bunga rampai dan membakar kemenyan. Bunga rampai dimaksudkan sebagai persembahan untuk para roh agar tidak mengganggu kehidupan mereka. Acara ini dikenal dengan upacara *Kliwonan*. Pada saat ini, upacara *Kliwonan* jarang dilakukan dan jika ada terbatas pada orang-orang tertentu saja.

Pelaksanaan beberapa upacara, terutama yang bersifat tradisional, semakin hari semakin memudar. Menurut informan, semakin menghilangnya pelaksanaan upacara-upacara tradisional umumnya karena berkaitan dengan biaya upacara. Walaupun setiap upacara dilakukan secara sederhana, untuk menyelenggarakannya diperlukan biaya ekstra yang harus disisihkan dari pendapatan sehari-hari. Seringkali, dari pada menyisihkan penghasilan untuk menabung, mereka malah menyisihkan uang untuk membayar utang. Ini berarti untuk melakukan sebuah upacara mereka harus berhutang dulu, baru kemudian menyisihkan pendapatan untuk mencicil utang tersebut. Dengan demikian, pendapatan sehari-hari yang jumlahnya tidak begitu besar. Akan semakin berkurang karena digunakan untuk membayar utang.

Pengetahuan masyarakat nelayan Desa Surya Bahari tidak hanya terbatas pada masalah yang berhubungan dengan yang gaib semata, mereka pun mempunyai pengetahuan yang berhubungan dengan mata pencaharian, seperti pengetahuan tentang musim, tempat-tempat ikan, dan alat penangkap ikan.

1. Pengetahuan tentang Musim

Masyarakat nelayan mendasarkan pengetahuannya kepada gejala-gejala alam, seperti musim dan kondisi geografis. Oleh karena itu, mereka dapat memperkirakan musim yang baik untuk mencari ikan, dan musim yang kurang menguntungkan untuk melaut. Prakiraan ini sekaligus dapat mengatur strategi dalam mencari ikan, termasuk di dalamnya alat-alat yang harus dipersiapkan untuk mencari ikan pada musim-musim tertentu.

Musim-musim yang dikenal oleh para nelayan Surya Bahari adalah musim timur dan musim barat. Musim timur berkisar antara bulan April sampai Oktober. Musim ini terjadi pada saat kemarau. Pada saat tersebut, laut relatif tenang sehingga para nelayan tidak terlalu beresiko untuk melaut. Nelayan dapat berlayar jauh ke tengah laut dan dapat lebih lama mencari ikan. Situasi laut yang tenang, menyebabkan ikan banyak berkumpul pada tempat-tempat tertentu. Pada musim timur ini ikan mudah ditangkap dalam jumlah besar. Oleh karena itu, musim timur dianggap sebagai saat panen ikan bagi para nelayan.

Pada musim barat atau musim penghujan, yang berlangsung antara bulan Oktober sampai April, air laut pasang disertai badai, puncak gelombang tinggi. Selama musim barat ini ikan laut tidak muncul, mereka berlindung di dalam karang atau di dasar laut yang dalam. Para nelayan pun takut untuk melaut, mengingat situasi laut beresiko tinggi serta mendatangkan bahaya setiap saat. Hal ini menyebabkan frekuensi melaut jarang, dan perolehan ikan pun sangat minim. Oleh karena hasil tangkapan pada musim barat sangat minim, banyak para nelayan yang semakin terpuruk dalam pengadaan biaya kehidupan. Para nelayan menyebut musim barat ini musim "*paila*" atau musim *paceklik*, yaitu musim yang serba kesulitan.

2. Pengetahuan tentang Tempat-tempat Ikan

Pengetahuan nelayan mengenai tempat-tempat yang diperkirakan tempat berkumpul ikan diperoleh secara turun-temurun dari para nelayan pendahulunya serta pengetahuan-pengetahuan yang didasarkan pada kebiasaan dan pengalaman. Pengetahuan yang menggunakan arah tiupan angin serta posisi bintang dalam menentukan tempat berkumpul ikan sudah jarang digunakan, mengingat pedoman-pedoman ini sulit digunakan dan hasilnya tidak selamanya tepat.

Tempat-tempat yang biasanya dijadikan tempat konsentrasi ikan tidak dapat diamati dengan mata telanjang dari atas permukaan air laut. Menurut pengalaman para nelayan, tempat berkumpulnya ikan biasanya di karang-karang dan rumpun.

Rumpon-rumpon ini biasanya merupakan reruntuhan kapal yang kandas dan terkubur di dalam air. Dalam pencarian ikan ini, para nelayan akan menuju tempat-tempat yang banyak ditumbuhi karang laut. Jika selesai di daerah yang berkarang, dan perolehan belum dirasakan cukup maka mereka akan menuju tempat yang berupa rumpon. Jika di tempat ini tidak memperoleh ikan dalam jumlah cukup, barulah mereka pergi ke laut lepas.

Palung laut juga merupakan tempat berkumpulnya ikan. Para nelayan tradisional tidak mampu untuk menjangkau palung yang berupa retakan atau celah yang cukup dalam di dasar laut. Untuk mengambil ikan di palung diperlukan jaring yang cukup panjang, dan pengetahuan mengenai tempat palung berada, serta teknik-teknik khusus yang dapat menebarkan jaring tepat pada sasarannya (palung), hanya dimiliki oleh beberapa nelayan saja

Petunjuk lain tentang adanya kerumunan ikan yang berada di bawah permukaan air adalah burung camar atau burung elang. Kedua burung tersebut adalah pemangsa ikan yang cekatan dan memiliki penglihatan tajam. Jadi, jika terdapat burung camar atau burung elang di atas permukaan air laut, berarti mereka sedang memangsa ikan-ikan yang muncul ke permukaan air. Jika terdapat ikan yang muncul ke permukaan air, berarti akan terdapat koloni-koloni lain dalam jumlah besar berada di bawah permukaannya. Dengan perpedoman pada keberadaan burung tersebut, maka nelayan akan mengarahkan perburuannya ke arah di sekitar burung camar atau burung elang yang terbang berputar-putar.

Dalam rangka memelihara tempat-tempat kumpulan ikan, pihak berwenang, termasuk para aparat desa serta para nelayan sendiri sangat menentang setiap nelayan yang menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak. Penggunaan bahan peledak akan mengakibatkan rusaknya terumbu-terumbu karang dan matinya semua ikan, baik anak-anak ikan yang masih kecil maupun ikan-ikan yang tidak memiliki nilai ekonomis. Sikap pelarangan ini dijalankan dengan kontinyu dan konsekuen. Tidak jarang, para nelayan yang memiliki sikap baik ini, mengejar atau mengadili nelayan-nelayan yang “membandel”. Jika sikap ini tidak ditegakkan, tentu saja pihak yang paling merasakan kerugiannya adalah para nelayan sendiri, lebih jauh dari itu akan membawa dampak kesengsaraan bagi keluarga para nelayan.

3. Pengetahuan tentang Alat Penangkap Ikan

Penguasaan pengetahuan tentang musim dan tempat-tempat berkumpul ikan, perlu ditunjang pula oleh pengetahuan akan perangkat alat penangkap ikan. Jenis-jenis peralatan yang digunakan menangkap ikan, baik perahu atau jaring dan pancing berbeda-beda antara satu jenis ikan dengan jenis ikan lainnya. Dalam prakteknya

peralatan untuk menangkap satu jenis ikan tidak dapat digunakan untuk menangkap ikan lainnya, jika hal ini dipaksakan maka perolehan ikan tidak maksimal bahkan tidak memperoleh ikan sama sekali.

Para nelayan Surya Bahari telah mengenal penerapan teknologi modern pada peralatan penangkap ikan, misalnya penggunaan mesin-mesin motor pada perahu-perahu penangkap ikan. Mesin-mesin motor penggerak perahu yang digunakan antara lain merek Yanmar, Kubota, Mitsubishi buatan Jepang, Thames buatan Inggris, serta Shanghai dan Cakra buatan Cina. Tidak semua perahu menggunakan mesin motor, terdapat juga perahu kecil yang tidak mungkin ditemplei mesin motor seperti *jukung* yang daerah operasinya di pesisir pantai. Meskipun demikian, perahu-perahu yang menggunakan motor tempel pun tetap memiliki cadangan layar, dengan pertimbangan untuk menghemat bahan bakar, dan sebagai cadangan jika terjadi kemacetan pada motor tempel di tengah laut.

Jenis perahu yang bisa dijumpai antara lain perahu-perahu jenis *dogol / gardan*, *mayang / rampus*, dan *pancing*. Daya jelajah / melaut setiap jenis perahu berbeda-beda tergantung ukurannya, dari pesisir pantai sampai antarpulau, bahkan sampai jauh ke pulau lain seperti Kalimantan.

Perahu *dogol / gardan* memiliki lebar 4 meter dengan panjang 15 meter, berawak 12 orang. Perahu lainnya yang lebih kecil lagi yaitu perahu *mayang / rampus* memiliki lebar 2 sampai 2,5 meter dengan panjang 8 - 10 meter berawak 4 - 6 orang. Perahu lainnya yaitu perahu *pancing* dengan ukuran lebar 1,75 - 2 meter, ukuran panjang 6 - 8 meter berawak 3 - 4 orang. Semua perahu menggunakan motor tempel berkekuatan antara 10 PK. Kecuali perahu *dogol / gardan* menggunakan mesin diessel yang biasa digunakan pada mesin truk 120 PS. Perahu ini disebut dengan perahu *gardan* karena untuk menebar dan menarik jaring menggunakan alat *gardan* dan digerakkan oleh tenaga diesel seperti pada mobil truk.

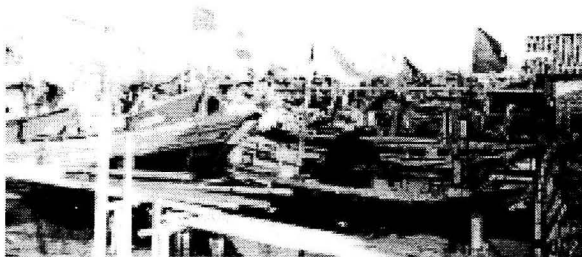


Photo 3.12 Berbagai jenis perahu nelayan

Jenis-jenis jaring yang digunakan nelayan Surya Bahari adalah jaring jenis *gardan / dogol*, *rampus*, *kantong* dan jaring *mayang*. Jenis jaring ini membedakan jenis perahu yang menggunakannya, seperti jenis perahu *gardan* menggunakan jenis jaring *gardan / dogol*, jenis perahu *rampus* biasanya dilengkapi dengan jaring jenis *rampus*, dan sebagainya.

Jaring *gardan/dogol* yaitu jaring berukuran panjang dan digunakan pada perahu *gardan/dogol* dan untuk menangkap segala jenis ikan. Jaring *rampus* digunakan untuk menangkap segala jenis ikan, tetapi jaring ini lebih kecil dari jaring *gardan*. Jaring *kantong* digunakan untuk menangkap segala jenis udang. Jaring *mayang* digunakan untuk menangkap berbagai ikan terutama ikan bawal, kembung, dan tenggiri.

Jenis ikan yang ditangkap oleh para nelayan Surya Bahari antara lain : layang, kakap, tongkol, tenggiri, selar, bawal, kembung, belanak, tembang, mayung, cumi-cumi, cucut, pari, dan udang.

Lama pencarian ikan di laut sebenarnya lebih ditentukan oleh daya angkut perahu dan jenis ikan yang ditangkap serta kemampuan mempersiapkan bekal selama melaut. Perahu yang berukuran besar dapat membawa bahan bakar, dan lauk pauk yang banyak sehingga diharapkan akan dapat memperoleh ikan banyak dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Sebagian besar perahu milik nelayan Desa Surya Bahari berukuran kecil. Oleh karena itu, umumnya hanya melaut secara pulang-pergi dalam sehari. Kalaupun dijumpai perahu-perahu berukuran besar, umumnya milik nelayan luar Surya Bahari yang singgah atau pemiliknya orang luar Surya Bahari tetapi diusahakan / dijalankan oleh nelayan-nelayan Surya Bahari.

Teknologi yang digunakan untuk menghindari pembusukan ikan atau hasil tangkapan selama melaut adalah dengan cara membawa es balok sebagai pengawet / pendingin. Jumlah es balok yang dibawa nelayan tergantung kepada jenis perahu, lamanya waktu melaut, kondisi palka, jumlah ikan yang diperkirakan akan tertangkap dan keadaan cuaca di laut. Misalnya jenis perahu *gardan* biasanya membawa es kurang lebih 20 balok, sedangkan jenis perahu *rampus* biasanya hanya membawa 10 balok es. Pada perahu berukuran kecil dan melaut hanya dalam waktu 7 - 12 jam sehari, teknologi pengawetan ikan dengan es ini jarang digunakan.

E. Pola Kerja dan Pendapatan

Yang dimaksud dengan pola kerja di sini ialah sistem jaringan kerja yang terbentuk karena kebiasaan dan pengalaman. Pola kerja di dalamnya memuat

pranata dan tindakan-tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang tetap. Adanya pranata-pranata inilah yang mengatur mekanisme serta organisasi kerja di antara komponen-komponen sistem tersebut, walaupun aturan-aturan ini tidak sengaja diciptakan, melainkan terbentuk karena kebiasaan dan pengalaman. Sungguhpun aturan-aturan ini tidak tertulis, bahkan tidak pernah dinyatakan dalam ucapan, namun peraturan ini berjalan efektif. Setiap komponen dan anggota dalam sistem kerja tersebut menyadari posisi, hak, tanggung jawab, serta kewajibannya masing-masing. Kesadaran ini pun timbul tidak melalui tekanan-tekanan, akan tetapi karena masing-masing merasakan perlunya ada pengaturan dalam kelangsungan proses kerja yang dilakukan.

Adapun yang dimaksud dengan pendapatan adalah perolehan yang didapat sebagai hasil kerja dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Satuan pendapatan ini dikonversikan dengan nilai rupiah. Hal ini mengingat sistem perekonomian yang berlaku di kalangan masyarakat setempat adalah sistem ekonomi pasar yang menggunakan nilai tukar rupiah, dengan kata lain tidak berlaku sistem barter.

Pendapatan di sini bisa berupa dua macam; pertama, bila sumber pendapatan ini diperoleh dari pekerjaan pokok, maka ini disebut sebagai pendapatan pokok, sedangkan bila pendapatan ini bersumber dari pekerjaan lain di luar pekerjaan pokok, maka disebut sebagai pendapatan sampingan.

Pekerjaan sebagai nelayan adalah alternatif pertama dan utama yang dipilih oleh penduduk di lokasi penelitian. Hampir semua penduduk di lokasi penelitian bermatapencarian sebagai nelayan. Itu pula sebabnya kelompok masyarakat di sini mendapat predikat sebagai masyarakat nelayan. Sebagaimana lazimnya masyarakat nelayan, mereka hidup di pinggiran pantai yang merupakan lahan utama bagi mereka untuk memperoleh pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kendatipun lingkungan tempat tinggal mereka tidak terlalu jauh dari pusat-pusat keramaian kota, akan tetapi mereka lebih memilih bekerja sebagai nelayan pencari ikan di tengah lautan ketimbang sektor pekerjaan lainnya.

Keadaan ini berkaitan dengan kemampuan dan tingkat pendidikan mereka yang umumnya masih rendah, sehingga mereka tidak memiliki keterampilan dan keahlian lain selain bidang kenelayanan. Betapapun berat tantangan yang harus mereka hadapi dalam menjalankan pekerjaan sebagai nelayan di tengah lautan, bidang ini tetap mereka tekuni, dan bahkan bagi mereka pekerjaan ini memiliki keasyikan dan kenikmatan tersendiri. Apalagi bila mereka telah meraup hasil tangkapan ikan yang cukup banyak, rasa lelah pun segera dapat terobati.

Alasan lain kenapa mereka lebih memilih menekuni sektor pekerjaan

kenelayanan adalah karena faktor keturunan. Yang dimaksud faktor keturunan di sini bukanlah faktor genetis, melainkan persoalan sosialisasi. Semenjak kecil mereka hidup di tengah-tengah perkampungan nelayan, bahkan orang tua mereka pun hampir semuanya adalah juga nelayan. Dengan sendirinya semenjak dini mereka telah disosialisasikan dengan pola-pola dan cara hidup nelayan. Mereka pun telah mulai belajar teknik dan cara-cara menangkap ikan semenjak mereka masih kecil, bahkan tidak jarang mereka pun diajak ikut ke tengah laut bersama orang tua atau saudara-saudara mereka. Sementara itu transformasi sektor-sektor lainnya di luar kenelayanan jarang sekali mereka terima. Itu pula sebabnya pengetahuan mereka tentang dunia lain sangat miskin. Kondisi semacam itu dapat dilihat pada tabel 3.10.

Tabel 3.10 menunjukkan bahwa hampir semua responden untuk pertama kalinya mendapatkan pengetahuan dan teknik-teknik kenelayanan dari orang tua mereka (76 %). Mereka yang menyatakan belajar sendiri (14 %) maksudnya adalah bahwa mereka tidak diberi petunjuk secara khusus oleh orang tua maupun saudara mereka, akan tetapi mereka hanya ikut-ikutan sampai akhirnya mereka sendiri mengetahui dan bisa melakukannya sendiri. Adapun yang dimaksud dengan lainnya (4 %) menurut keterangan mereka adalah teman-teman dan tetangga dekat mereka.

Tabel 3.10
Sumber Pengetahuan dan Teknik-teknik Kenelayanan
yang Didapat Responden

No.	Alternatif Jawaban	F	%
1.	Orang tua	38	76,00
2.	Saudara	3	6,00
3.	Belajar sendiri	7	14,00
4.	Lainnya (sebutkan)	2	4,00
J u m l a h		50	100,00

Sumber : Data Primer Penelitian 2003

Sebagian besar penduduk di lokasi penelitian termasuk ke dalam kelompok angkatan kerja berusia muda dengan tingkat pendidikan yang rendah. Beberapa responden yang diwawancarai bahkan menyatakan tidak tamat Sekolah Dasar

bahkan ada juga yang tidak pernah mengenyam bangku pendidikan formal. Namun demikian mereka menyatakan bahwa untuk sekedar membaca bacaan-bacaan yang enteng mereka menyatakan bisa membacanya. Demikian pula dalam hal menulis dan menghitung mereka menyatakan sedikit-sedikit bisa melakukannya. Itu pula sebabnya mereka tidak memiliki alternatif lain dalam memilih pekerjaan selain bidang kenelayanan yang telah mereka tekuni semenjak kecil.

Kebiasaan mereka melaut dan interaksi mereka dengan lingkungan alam sekeliling beserta isi laut, dalam hal ini ikan, telah menumbuhkan pengetahuan yang mendalam tentang musim dan karakteristik kehidupan ikan di laut. Selanjutnya sistem pengetahuan ini membentuk pola kerja yang disesuaikan dengan irama pergantian musim. Dalam hal ini mereka telah memiliki perhitungan musim kapan mereka harus melaut agar mendapatkan hasil tangkapan ikan yang banyak atau musim panen, dan kapan waktunya musim paceklik. Dari mana mereka mengetahui dan mempelajari gejala-gejala alam ini, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.11
Sumber Pengetahuan tentang Gejala-gejala Alam
yang Diperoleh Responden

No.	Alternatif Jawaban	F	%
1.	Orang tua	14	28,00
2.	Teman sesama nelayan	7	14,00
3.	Pengalaman sendiri	26	52,00
4.	Lainnya (sebutkan)	3	6,00
J u m l a h		50	100,00

Sumber : Data Primer Penelitian 2003

Sebagian besar responden (52%) mengatakan bahwa mereka memperoleh pengetahuan tentang gejala-gejala alam adalah dari pengalaman mereka sendiri. Ada juga di antaranya yang mendapatkan pengetahuan ini dari orang tuanya (28 %) yaitu ketika mereka masih kecil dan sering diajak oleh orang tua mereka untuk melaut. Pertukaran pengetahuan di antara sesama nelayan sendiri juga menjadi salah satu sumber bagi para nelayan dalam mendapatkan pengetahuan tentang gejala-gejala alam ini (14 %), dan 6 % di antara para responden tidak memberikan jawaban atas pertanyaan ini.

Dalam sistem pengetahuan mereka, dalam satu tahun terdapat dua musim yaitu *musim timur* dan *musim barat*. Perputaran musim ini dikaitkan dengan arah darimana datangnya angin bertiup. Masing-masing musim memiliki karakteristik

sendiri yang membawa serta nasib peruntungan mereka dalam hal mencari ikan. Pada *musim timur* yang jatuh antara bulan April sampai dengan Oktober angin bertiup dari arah timur dalam kecepatan yang tidak terlalu kencang dan ombak mengalun tenang, sehingga nelayan bisa pergi melaut dengan tenang. Pada musim ini, ikan pun banyak berkeliaran dan mudah mereka tangkap. Sebaliknya pada *musim barat* yang jatuh antara bulan November sampai dengan Maret, angin bertiup dari arah barat dengan kecepatan kencang disertai dengan guyuran hujan yang lebat. Pada saat demikian, para nelayan enggan untuk melaut, dan ikan-ikan pun enggan muncul ke permukaan, sehingga sukar untuk ditangkap oleh nelayan. *Musin barat* ini biasa disebut dengan *musim paceklik*. Tiga bulan terakhir menjelang datangnya *musim timur* adalah merupakan persiapan di mana ikan-ikan akan mulai keluar. Pada saat ini para nelayan sudah mulai lagi aktivitas kenelayanan mereka walaupun hasil yang diperolehnya tidak terlalu banyak.

Pada *musim timur* para nelayan mulai pergi melaut pada tengah malam. Mereka melaut menempuh jarak yang cukup jauh sampai ke daerah perairan Merak dan Lampung. Satu minggu kemudian mereka baru pulang untuk menjual hasil tangkapan mereka di Tempat Pelelangan Ikan setempat. Selama di tengah lautan, mereka mengawetkan ikan di perahu mereka dengan menggunakan es balok. Setelah pulang, mereka beristirahat selama satu minggu. Saat beristirahat ini biasanya mereka pergunakan untuk memperbaiki jaring dan peralatan melaut lainnya serta mempersiapkan segala kebutuhan selama mereka di laut. Istilah yang dipergunakan oleh masyarakat setempat untuk pergi melaut menempuh jarak yang jauh adalah "*babang*".



Photo 3.13 Membetulkan peralatan untuk melaut



Photo 3.14 Memperbaiki jaring selepas melaut

Pada *musim barat* cuaca tidak begitu bersahabat. Pada masa ini biasanya hujan turun lebat dan ombak pun bergelombang sehingga terlalu beresiko bagi para nelayan untuk pergi melaut dalam jarak yang cukup jauh. Oleh sebab itu, pada *musim barat* mereka hanya menangkap ikan di perairan yang jaraknya tidak terlalu jauh. Dini hari sekitar pukul 04.00 mereka mulai berangkat melaut. Setelah menebar jaring beberapa kali, menjelang tengah hari mereka kembali mendarat. Dengan sendirinya hasil tangkapannya pun tidaklah sebanyak bila mereka pergi “mbabang”. Pada musim barat ini, mereka mulai turun ke laut pada dini hari sekitar pukul 04.00 pagi, dan pada tengah hari mereka sudah kembali untuk langsung menjual hasil tangkapan ikannya di TPI.

Para nelayan yang menggunakan perahu kecil, tidak melakukan pelayaran yang jauh mengingat kemampuan perahunya. Sungguhpun begitu, pada *musim timur* mereka pun bisa meraup hasil tangkapan yang cukup lumayan. Lain halnya bila tiba *musim barat* yang merupakan masa *paceklik*, hasil tangkapan mereka biasanya sedikit.

Pola kerja mereka relatif tetap, yaitu berangkat pada dini hari sekitar pukul 04.00 dan menjelang tengah hari mereka baru mendarat. Kadang-kadang pada sore hari mereka pergi melaut lagi untuk sekedar mencari tambahan, dan saat magrib mereka baru mendarat dan langsung menjual ikan hasil tangkapannya kepada para *bakul* atau ke warung-warung dengan harga yang miring. Untuk tambahan ini mereka tidak bisa menjualnya ke TPI karena TPI hanya buka dari pukul 12.00 hingga pukul 17.00. Rata-rata mereka berada di perairan sekitar 8 jam dalam satu hari.

Bila tidak “mbabang”, dalam satu minggu mereka berangkat melaut antara 5 – 6 hari, dan 1 atau dua hari mereka beristirahat. Waktu istirahat mereka biasanya digunakan untuk memperbaiki peralatan menangkap ikan yang rusak, seperti memperbaiki jala, mesin motor, perahu, dan lain-lain.

Lain halnya bila mereka pergi “mbabang”, mereka berangkat melaut untuk waktu 1 minggu. Bila melakukan “mbabang”, tengah malam mereka sudah mulai berangkat. Satu minggu kemudian baru mereka pulang ke kampungnya untuk membongkar ikan hasil tangkapannya dan menjualnya di TPI setempat. Selama berada di tengah lautan, ikan-ikan hasil tangkapannya mereka awetkan dengan balokan-balokan es. Satu minggu mereka di darat, beristirahat sambil membetulkan segala peralatan yang rusak serta menyiapkan bahan-bahan perlengkapan untuk pelayaran selanjutnya. Hari berikutnya, kembali mereka berangkat melaut untuk waktu satu minggu kemudian. Jadi dalam satu bulan mereka melakukan 2 kali melaut. Apabila di laut 15 hari, dalam sebulan rata-rata hanya sekali melaut.

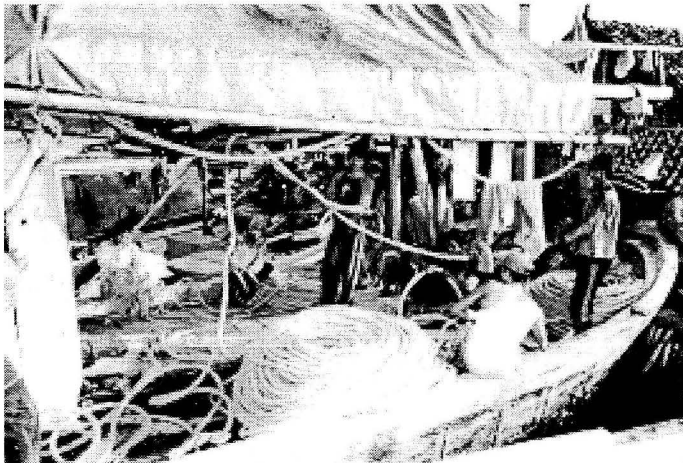


Photo 3.15 Menyiapkan peralatan sebelum melaut

Ketika pergi melaut, mereka biasanya melakukannya secara berkelompok. Untuk pelayaran yang sifatnya “tulak” (pulang pergi atau tidak bermalam di laut) jumlah awak perahu rata-rata 3 – 4 orang setiap kelompoknya. Sedangkan bila pergi “mbabang” (bermalam di laut) dengan perahu yang berukuran cukup besar, kelompok mereka biasanya beranggotakan 5 – 7 orang. Dalam hal ini, tidak ada

ketentuan atau ikatan-ikatan yang mengharuskan siapa pergi dengan siapa, akan tetapi biasanya mereka pergi melaut dengan orang-orang yang tetap, kecuali bila salah seorang dari mereka mendapat halangan, misalnya sakit, maka orang itu untuk sementara digantikan oleh orang lain, atau mereka tetap pergi melaut dengan anggota berkurang satu orang.

Tabel berikut menunjukkan jaringan kerjasama di antara sesama nelayan.

Tabel 3.12
Teman Melaut

No.	Alternatif Jawaban	F	%
1.	Dgn orang yang sama	29	58,00
2.	Kadang-kadang dengan orang yang sama	18	16,00
3.	Tidak dengan orang yang sama	3	6,00
J u m l a h		50	100,00

Sumber : Data Primer Penelitian 2003

Sebagian besar dari mereka (58 %) setiap pergi melaut dengan anggota atau orang-orang yang sama. Sebagian lagi (36 %) mengatakan kadang-kadang, artinya bahwa mereka biasa pergi dengan orang-orang yang sama, akan tetapi bila salah seorang dari mereka mendapat halangan, maka bisa saja mereka menggantikan orang yang berhalangan tersebut dengan orang lainnya. Sedangkan yang menyatakan bisa pergi dengan siapa saja hanya 6 %.

Mengenai apa yang menjadi pertimbangan dalam memilih anggota kelompok, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.13
Alasan Responden Memilih Teman Untuk Melaut

No.	Alternatif Jawaban	F	%
1.	Karena masih saudara	-	-
2.	Karena teman dekat	-	-
3.	Karena kejujurannya	15	30,00
4.	Karena mau bekerja keras	24	48,00
5.	Lainnya (sebutkan)	11	22,00
J u m l a h		50	100,00

Sumber : Data Primer Penelitian 2003

Ikatan persaudaraan atau kekerabatan maupun pertemanan ternyata tidak menjadi bahan pertimbangan bagi mereka dalam melakukan pekerjaan kenelayanan. Artinya, dalam memilih teman atau anggota kelompok dalam melakukan pekerjaan melaut yang dipentingkan bukanlah ikatan-ikatan kekerabatan, melainkan kemauan untuk bekerja keras (48 %) dan kejujuran (30 %).

Jenis-jenis perahu yang dimiliki oleh para nelayan di Desa Pakuhaji adalah perahu-perahu berukuran kecil dan sedang. Tidak ada nelayan setempat yang memiliki perahu berukuran besar. Yang dimaksud dengan perahu besar adalah perahu dengan ukuran sekitar 6 x 16 meter yang dilengkapi dengan mesin / motor jenis Fuso 6 sylinder. Menurut beberapa orang informan, jenis perahu ini harganya sangat mahal bisa mencapai Rp. 200 juta. Adapun jenis perahu sedang adalah yang berukuran 4 x 13 meter dengan mesin berkekuatan 20 - 30 PK; dan perahu kecil berukuran 2,5 x 12 meter dengan mesin / motor tempel berkekuatan 10 – 16 PK. Harga satu unit perahu berukuran sedang adalah sekitar Rp. 40 juta, sedangkan 1 unit perahu berukuran kecil harganya sekitar Rp. 20 juta. Untuk bisa membeli dan memiliki satu unit perahu berukuran kecil sekalipun, dirasakan oleh mereka sangat mahal. Bagi mereka yang bercita-cita ingin memiliki perahu, maka mereka menyisihkan sebagian dari pendapatannya untuk ditabung, dan sisanya mereka meminjam dari KUD setempat yang pengembaliannya dilakukan dengan cara dicicil. Tidak jarang pula di antara mereka yang meminta bantuan kepada saudara-saudaranya yang berada di kampung halamannya.

Bila seseorang telah mampu memiliki sebuah perahu, maka statusnya berubah menjadi seorang *juragan*. Menjadi *juragan* perahu bukan berarti dia harus onggang-onggang kaki menunggu setoran. Hampir semua *juragan* perahu di lokasi penelitian ikut pula terjun ke laut bersama-sama dengan para awak kapal. Yang membedakan antara *juragan* perahu dengan para awak kapal lainnya adalah dalam hal pembagian hasil. Di kalangan masyarakat setempat, rumus yang digunakan dalam hal bagi hasil antara juragan perahu dengan para awak kapalnya ialah 4 : 1, yaitu juragan perahu mendapatkan 4 bagian dari hasil yang diperoleh, sedangkan yang lainnya mendapatkan satu bagian. Pembagian ini dilakukan setelah pemotongan biaya operasional.

Rata-rata hasil yang diperoleh dari "mbabang" selama 1 minggu adalah Rp. 4 juta, dengan biaya operasional (resiko) sekitar Rp. 1.750.000,-. Termasuk ke dalam biaya operasional ini antara lain biaya makan/minum, gula kopi, rokok, es balok, dan bahan bakar. Perhitungan bagi hasilnya adalah sebagai berikut :

Pendapatan kotor	Rp. 4.000.000,-
Resiko / Biaya operasional	<u>Rp. 1.750.000,-</u> -
Sisa	Rp. 2.250.000,-

Pendapatan bersih yang berjumlah Rp. 2.250.000,- dibagi 10 bagian, yaitu untuk : biaya pemeliharaan mesin (1 bagian), sewa perahu (1 bagian), sewa peralatan / jala, dan lain-lain (1 bagian), dan 7 orang awak kapal (masing-masing 1 bagian). Jadi masing-masing bagian mendapatkan Rp. 225.000,-. Jatah untuk juragan adalah 4 bagian, yaitu $4 \times \text{Rp. 225.000,-} = \text{Rp. 900.000,-}$. Keempat bagian yang diperoleh oleh juragan adalah untuk : biaya sewa perahu, biaya pemeliharaan / perbaikan mesin, biaya sewa peralatan menangkap ikan (jaring/jala, dan lain-lain), dan bagian dia sendiri sebagai awak kapal. Bila juragan perahu itu tidak memiliki peralatan (jaring) sendiri, maka ia harus menyewanya dari orang lain, sehingga jatah yang satu bagian diserahkan kepada pemilik jaring/jala. Sedangkan awak lainnya mendapatkan 1 bagian yaitu Rp. 225.000,-. Pendapatan ini dipotong lagi dengan biaya pemotongan dari TPI yang dikelola oleh KUD sebesar 6% atau Rp. 13.500,-. Jadi, seorang awak kapal mendapat penghasilan bersih sekitar Rp. 211.500,-

Perhitungan ini adalah pendapatan untuk satu kali “mbabang” yang memakan waktu 1 minggu. Dalam satu bulan, mereka pergi “mbabang” rata-rata 2 kali. Dengan demikian, maka pendapatan bersih mereka (awak kapal) dalam satu bulan adalah : $2 \times \text{Rp. 211.500,-} = \text{Rp. 423.000,-}$ Sedangkan pendapatan juragan dalam 1 bulan adalah : $2 \times \text{Rp. 900.000,-} = \text{Rp. 1.800.000,-}$ dipotong KUD 6 % dari penghasilan sebagai awak kapal ($\text{Rp. 13.500} \times 2 = \text{Rp. 26.000,-}$) = Rp. 1.774.000,-

Pendapatan sebesar itu diperoleh nelayan ketika *musim timur*. Adapun pada *musim barat*, sekali melaut rata-rata mendapat Rp. 2.000.000,- dikurangi resiko sebesar Rp. 1.750.000,- = Rp. 250.000,-. Pendapatan sebesar itu dibagi 10 bagian, maka setiap nelayan mendapat penghasilan bersih setelah dipotong KUD 6 % (Rp. 1.500,-) sekitar Rp. 23.500,- Untuk dua kali *mbabang* selama sebulan, maka pendapatan bersihnya sekitar Rp. 47.000,- Sedangkan pendapatan juragan dalam 1 bulan adalah : $2 \times \text{Rp. 100.000,-} = \text{Rp. 200.000,-}$ dipotong KUD 6 % untuk penghasilannya sebagai awak kapal ($\text{Rp. 1.500} \times 2 = \text{Rp. 3.000,-}$) = Rp. 197.000,-

Apabila dalam satu musim terdapat enam bulan, maka penghasilan nelayan dari usaha melaut dalam setahun :

Musim Timur	: 6 X Rp. 211.500,-	= Rp. 1.269.000,-
Musim Barat	: 6 X Rp. 47.000,-	= <u>Rp. 282.000,-</u>
Jumlah		= Rp. 1.551.000,-

Apabila dirata-ratakan, maka penghasilan perbulannya Rp. 129.250,-. Penghasilan tersebut dianggap maksimal karena tambahan dari usaha sampingan yang umumnya diupayakan oleh anggota keluarga lain, sangat kecil. Selain itu, sebagian besar anggota keluarga tidak mempunyai pekerjaan yang produktif.

Rata-rata keluarga nelayan mempunyai jumlah anggota sebanyak 6 orang. Maka pendapatan perkapita pertahunnya terbilang sebesar : Rp. 129.250 : 6 = Rp. 33.292,- X 12 bulan = Rp. 399.504,- setara dengan 199,8 kg beras (1 kg beras = Rp. 2.000,-).

Dengan mengacu pada perhitungan Sayogyo bahwa nelayan dikatakan miskin apabila tingkat pendapatan per kapita per tahunnya kurang dari 320 kg setara beras untuk daerah pedesaan, maka nelayan Desa Legonwetan bisa dikategorikan penduduk miskin karena berada di bawah garis kemiskinan dengan pendapatan $\pm$ 199,8 kg per kapita per tahun.

Dari uraian mengenai pendapatan nelayan seperti di atas, secara umum dapat dikatakan bahwa strata / golongan *juragan* mempunyai pendapatan lebih besar karena mereka menguasai kapital walaupun resiko kerugian yang mesti ditanggung juga relatif besar. Sedangkan golongan *bidak* memiliki pendapatan lebih kecil karena tidak mempunyai modal walaupun tidak menanggung resiko kerugian selain tenaga.

Secara keseluruhan dapat terlihat bahwa makin tinggi status seorang nelayan, maka makin besar peluang mereka pada tingkat golongan tidak miskin. Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan yang terjadi, yaitu makin tinggi status nelayan, maka jumlah mereka yang berada di atas garis kemiskinan juga semakin besar.

Berdasarkan hasil pengamatan, dapat dikatakan bahwa rata-rata *bidak* atau *pandega* tidak mempunyai pekerjaan lain selain sebagai nelayan walaupun mereka menganggur pada saat musim *paceklik*. Kenyataan ini menyebabkan mereka sukar melepaskan diri dari belenggu kemiskinan, berbeda dengan golongan *juragan* yang mempunyai berbagai pekerjaan lain selain sebagai nelayan.

F. Hambatan dan Usaha Peningkatan Kesejahteraan

Suatu hal yang perlu ditelaah dalam mengkaji tingkat pendapatan nelayan adalah sistem pemasaran hasil perikanan. Hal ini disebabkan besarnya penerimaan nelayan sangat dipengaruhi oleh sistem pemasaran yang menghubungkan nelayan dengan konsumen. Sistem pemasaran yang efisien adalah sistem pemasaran yang dapat dengan baik menterjemahkan permintaan konsumen kepada nelayan produsen, sehingga dengan demikian nelayan dapat menyesuaikan produksi, dan untuk itu nelayan memperoleh tingkat harga yang layak.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pada umumnya nelayan di lokasi penelitian menjual hasil produksinya melalui *langgan/langganan* dan *bakul*. Hanya beberapa orang yang menjualnya melalui TPI. Terdapat juga nelayan yang menjual hasil tangkapannya di pelelangan liar atau langsung kepada pembeli eceran.

Beberapa nelayan mengungkapkan alasan menjual melalui TPI karena terikat sebagai anggota KUD. Sedangkan yang menjualnya langsung kepada pembeli eceran atau kepada *langgan / langganan / bakul*, antara lain karena terlibat hutang piutang, ketidakpastian harga di TPI, dan keraguan nelayan terhadap juru lelang. Keraguan tersebut muncul karena juru lelang sering tidak memihak kepada nelayan dan sering terdapat hubungan kerja sama antara juru lelang dengan pedagang sehingga harga ikan bisa ditekan oleh kaum pedagang.

Pemerintah berusaha melepas ketergantungan nelayan dari kaum pelepas uang dengan memberikan bantuan kredit. Tetapi hal itu tidak sepenuhnya berhasil karena peranan kaum pelepas uang tetap dominan. *Langgan / langganan* ialah kaum pelepas uang yang menguasai sarana produksi hingga pemasaran. Usaha yang dilakukan *langgan / langganan* antara lain memberi jaring kepada nelayan dengan imbalan nelayan harus menjual hasil tangkapannya kepada *langgan / langganan*, atau memberi sejumlah uang kepada nelayan misalnya untuk biaya operasional dan ongkos perbaikan perahu, dan sebagai imbalannya ikan-ikan hasil tangkapan nelayan tersebut dilelang di pelelangan liar dan dipotong 10 % untuk *langgan*.

Nelayan yang berhutang kepada *langgan / langganan* menyatakan bahwa hubungan dengan *langgan / langganan* memberi rasa aman terutama apabila memerlukan pertolongan di musim *paceklik*. Alasan lainnya adalah karena *juragan* tidak memberikan biaya operasi atau uang biaya perbaikan kerusakan perahu.

Di Desa Surya Bahari, *juragan* mengawali hubungan dengan memberi sejumlah uang ikatan kepada *bidak / pandega*. *Pandega* biasanya menerima antara Rp. 200.000,00 - Rp. 300.000,00, sedangkan *jurumudi* antara Rp. 350.000,00 - Rp. 500.000,00. Apabila terjadi perpindahan tempat bekerja, *juragan baru* biasanya membayar lebih besar dari hutang *pandega* kepada *juragan lama*. Selain sistem ikatan, terdapat juga sistem *menyimbat* atau tidak terikat yang disebabkan *juragan* tidak mempunyai cukup modal atau *pandega* sendiri yang tidak mau terikat.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa adakalanya para nelayan tidak dalam posisi yang menguntungkan, tidak memiliki *bargaining power* karena terjepit oleh utang terhadap pihak tertentu. Dalam keadaan demikian, harga hasil tangkapan nelayan dipermainkan sekenaknya dan nelayan hanya membawa beberapa rupiah saja untuk *disetorkan* ke keluarganya. Pendapatannya yang kecil tidak seimbang dengan tenaga yang dikeluarkan, bahkan mungkin tidak seimbang dengan jumlah rupiah yang harus dibayarkannya ke beberapa "lubang" yang digunakan untuk menutupi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Kemiskinan pada masyarakat nelayan di Desa Surya Bahari dilukiskan

sebagai keadaan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup minimal seseorang atau keluarga untuk hidup layak. Hidup layak yang dimaksud adalah terpenuhinya kebutuhan pokok yang meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan (Soemitro Djojohadikusumo dalam Ampang, 1984). Dilihat dari kehidupan masyarakat nelayan di Desa Surya Bahari, hampir sebagian besar hidup dalam kesederhanaan bahkan kekurangan. Sandang, pangan dan papan sangat seadanya, sedangkan pendidikan dan kesehatan kurang diperhatikan. Beberapa anak nelayan putus sekolah SD, mereka hanya sampai kelas V dan hanya sedikit yang menamatkan SD. Alasan mereka tidak melanjutkan sekolah adalah orang tuanya tidak mempunyai dana dan mereka selalu disuruh membantu mencari ikan (melaut). Ada anggapan di kalangan para nelayan bahwa anak-anaknya tidak perlu melanjutkan sekolah, cukup sampai SD asal bisa baca tulis. Anggapan ini tampaknya membuat anak nelayan banyak yang putus sekolah, tidak pernah mengenyam pendidikan tinggi.

Selain pendidikan, kesehatan juga kurang diperhatikan oleh para nelayan. Banyak anak nelayan yang kekurangan gizi dan terserang penyakit kulit (gatal-gatal, eksim). Mereka beranggapan ini merupakan penyakit lumrah atau sesuatu hal yang biasa, bisa sembuh sendiri tanpa diobati. Kalaupun diobati paling hanya beli obat pasaran di warung atau toko obat, tidak pernah pergi ke dokter atau puskesmas. Selain penyakit kulit, kesehatan rambut juga tidak diperhatikan. Hampir semua anak nelayan berambut merah, karena sering mandi di laut pada saat terik matahari.

Kemiskinan masyarakat nelayan di Desa Surya Bahari tidak dapat dilepaskan dari berbagai kondisi penyebab yang terdapat dalam masyarakat nelayan itu sendiri. Beberapa faktor penyebab kemiskinan antara lain faktor sosial, ekonomi, budaya bahkan warisan masa lalu. Menurut Koentjaraningrat (1974), faktor mental nelayan merupakan salah satu sumber penyebab kemiskinan karena masih banyak anggota masyarakat yang sikap mentalnya tidak sejalan dengan pembangunan dalam upaya untuk mencapai keadaan yang lebih baik.

Bertitik tolak dari kenyataan tersebut, berikut ini akan dipaparkan beberapa faktor penyebab kemiskinan pada masyarakat nelayan di Desa Surya Bahari.

1. Tingkat Pendapatan Nelayan Rendah

Tingkat pendapatan rumah tangga nelayan di Desa Surya Bahari cukup rendah. Hal ini bisa dilihat dari pendapatan per kapita per tahun yang kurang dari 320 kg setara beras. Bila mengacu pada tulisan Prof. Dr. Sayogyo tentang "garis kemiskinan dan kebutuhan minimum pangan" (Yogyakarta: Aditya Media, 1996), maka yang digolongkan miskin adalah orang yang pendapatan per kapita per tahun sama dengan atau di bawah 320 kg untuk pedesaan dan 480 kg untuk perkotaan.

Berkaitan dengan nelayan di Desa Surya Bahari, tingkat pendapatan mereka sangat rendah sehingga bisa dikategorikan sebagai nelayan miskin. Sebagian besar nelayan di Desa Surya Bahari adalah *bidak* yang tidak mempunyai modal dan perahu. Mereka menangkap ikan dengan perahu yang disewa dari *juragan*.

Perlu diketahui bahwa sebagian besar nelayan di Desa Surya Bahari tidak melaut setiap hari, tetapi tiap dua hari sekali. Hal ini disebabkan nelayan perlu beristirahat untuk memulihkan tenaga setelah bekerja keras. Selain itu, mereka perlu waktu untuk memperbaiki jaring, perahu atau mesin yang biasanya sering mengalami kerusakan setelah melaut. Juga, mereka pun perlu berkumpul dengan keluarga setelah seharian melaut meninggalkan anak istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hari kerja mereka untuk melaut hanya 15 kali/hari dalam sebulan.

Menyimak pendapatan nelayan pada uraian terdahulu, bahwa nelayan Desa Surya Bahari bisa dikategorikan penduduk miskin karena pendapatan mereka rata-rata hanya Rp. 129.250,- sebulan. Bisa dibayangkan dengan pendapatan Rp. 129.250,- per bulan menghidupi keluarga yang rata-rata memiliki anggota keluarga 5 - 7 orang. Tentu pendapatan ini sangat minim (rendah) bahkan kurang, sehingga tidak terpenuhinya kebutuhan minimal oleh seseorang atau keluarga untuk hidup layak. Layak yang dimaksud di sini adalah cukup sandang, papan, pangan, pendidikan dan kesehatan.



Photo 3.16 Mengolah hasil tangkapan nelayan untuk dijadikan ikan asin

Namun demikian, penghasilan pokok ini biasanya ditunjang dengan penghasilan tambahan yang dilakukan oleh istri nelayan. Tidak semua istri nelayan mempunyai pekerjaan tambahan, hanya beberapa saja yang membuat ikan asin, membuat jaring, dan menjadi bakul ikan. Pendapatan tambahan dari mereka ini rata-rata bisa mencapai Rp. 50.000,- atau Rp. 100.000,- dalam sebulan. Dengan demikian pendapatan tambahan ini diharapkan mampu untuk menutup kebutuhan sehari-hari keluarga.

Untuk nelayan *juragan*, tingkat pendapatannya sedikit lebih baik dibandingkan dengan nelayan *bidak*. Namun demikian, setelah memperhitungkan resiko untuk perbaikan perahu, jaring dan mesin, maka tingkat pendapatan per kapita per tahunnya tidak jauh berbeda dengan nelayan *pandega* yaitu sekitari 310 kg per kapita per tahun.

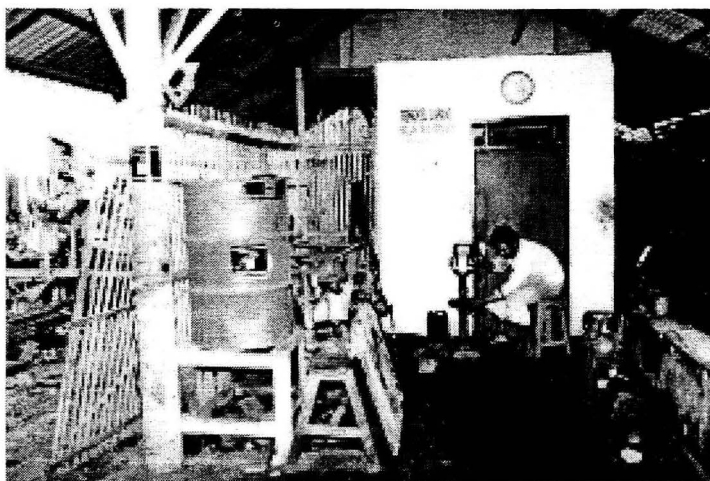


Photo 3.17 Salah satu bengkel untuk memperbaiki mesin perahu

Menurut seorang informan, setelah melaut perahu yang digunakan sering mengalami kerusakan mesin sehingga perlu diperbaiki. Biaya yang diperlukan untuk perbaikan mesin tidaklah sedikit, terkadang bisa mencapai Rp. 1.000.000,- sampai Rp 2.000.000,-. Demikian pula jaring ikan sering mengalami kerusakan (terkoyak), karena tersangkut batu-batu karang atau sirip ikan. Beban yang terlalu berat juga bisa mengakibatkan kerusakan pada jaring ikan. Untuk membuat jaring diperlukan biaya kurang lebih Rp 750.000,- sedangkan untuk perbaikan jaring diperlukan dana Rp. 75.000,-. Dengan memperhitungkan resiko tersebut, maka tingkat pendapatan nelayan *juragan* per kapita per tahunnya tidak jauh berbeda dengan nelayan *bidak* yaitu sekitar 310 kg setara dengan beras di pedesaan.

Demikianlah, secara umum nelayan di Surya Bahari dikategorikan sebagai nelayan miskin karena tingkat pendapatannya sangat rendah tidak mencukupi kebutuhan minimal keluarganya.

2. Produktivitas Tenaga Kerja rendah

Rendahnya produktivitas tenaga kerja nelayan Desa Surya Bahari berhubungan erat dengan adanya faktor musim. Pada musim kemarau (musim timur) merupakan musim ikan berlimpah, tetapi harga rendah sehingga pendapatan nelayan tetap rendah. Sebaliknya pada musim barat atau musim penghujan, ikan sulit ditangkap karena jarang muncul di permukaan. Oleh karena hasil tangkapan pada musim barat sangat minim, banyak nelayan yang semakin terpuruk. Oleh para nelayan, musim barat disebut juga musim "paila" atau musim paceklik yaitu musim serba kesulitan.

Pada musim timur, yaitu antara bulan April sampai Oktober di mana ikan berlimpah, angin tidak terlalu kencang dan ombak mengalun tenang sehingga nelayan bisa melaut dengan tenang tanpa rasa khawatir; mereka turun ke laut dini hari (jam 4-5 pagi) saat angin darat berhembus dan air pasang. Mereka berlayar sejauh 4-5 mil dari pantai, dan akan tiba di suatu tempat untuk menebarkan jaring sekitar 6-10 kali selama 5-6 jam. Sore hari sekitar jam 3 nelayan kembali ke darat dan langsung menjual hasil tangkapannya. Pada musim timur, ikan mudah ditangkap dalam jumlah besar sehingga nelayan bisa pulang lebih awal. Mereka bisa beristirahat untuk membetulkan jaring atau berkumpul bersama dengan keluarga.

Lain halnya bila musim barat tiba, yaitu antara bulan November sampai Maret, hujan turun hampir tiap hari disertai angin kencang dan ombak besar; sampai malam hari terkadang hasil tangkapannya sangat sedikit. Walaupun demikian, mereka tidak pernah menginap (bermalam di laut) jika menggunakan perahu kecil karena tidak dilengkapi dengan peralatan yang memadai.

Demikian juga yang menggunakan perahu besar seperti perahu jenis *gardan* / *dogol*. Walaupun berukuran besar, akan tetapi apabila musim barat para awak kapal juga enggan untuk melaut karena resikonya tinggi.

Secara keseluruhan, nelayan Desa Surya Bahari mengatakan bahwa masalah utama yang mereka hadapi adalah musim yakni musim barat dan timur. Adanya dua musim itu menyebabkan adanya masa-masa lowong di mana nelayan tidak dapat turun ke laut atau jika ada yang mencoba turun ke laut akan pulang dengan tangan hampa. Musim paceklik ini berlangsung hampir 6 bulan dalam setahun, sehingga membuat nelayan semakin terpuruk.



Photo 3.18 Membetulkan jaring di perahu selepas melaut

Pada musim barat, kebanyakan nelayan Desa Surya Bahari duduk diam di rumah atau memperbaiki peralatan yang rusak. Biasanya pada musim barat ada hari-hari di mana cuaca teduh sebentar. Pada saat demikian, nelayan berusaha melaut karena cukup banyak ikan yang bisa ditangkap. Penghasilan ini lumayan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Adanya saat teduh/lowong seperti ini menyebabkan para nelayan enggan meninggalkan rumahnya untuk beralih ke sektor lain karena enggan melepas rejeki yang datang. Kondisi ini merupakan satu penyebab rendahnya pendapatan nelayan dan juga merupakan satu sumber kemiskinan pada masyarakat nelayan. Urbanisasi musiman atau perpindahan penduduk dari desa ke kota pada saat *paceklik* tidak dikenal pada masyarakat nelayan. Ikatan kedaerahan pada masyarakat nelayan begitu kuat sehingga mereka bertahan dalam kemiskinan.

3. Modal Relatif Kecil atau Tidak Ada

Dengan pendapatan rendah, maka simpanan modal yang dimiliki oleh nelayan sangat rendah bahkan tidak ada, sehingga kesempatan untuk memperluas usaha menjadi sangat terbatas. Demikian pula kesempatan untuk memiliki perahu, jaring atau alat-alat yang lain juga tidak ada. Jangankan untuk membeli perahu atau perlengkapan lain, untuk makan saja sangat susah. Pendapatan mereka pas-pasan bahkan kurang, walaupun mereka mempunyai perahu tentu dikumpulkan dengan segenap keprihatinan dan perjuangan. Untuk menutupi kekurangan dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, biasanya mereka berhutang (kredit) pada *juragan*

atau bakul ikan. Hutang tersebut akan dibayar setelah menjual hasil tangkapan ikan pada bakul yang meminjam uang tersebut. Adanya ikatan sosial semacam ini, tentu saja akan merugikan nelayan *bidak* karena harga jual ikan sedikit lebih rendah dari pasaran. Artinya nelayan tidak diberi kesempatan untuk mematok harga, dalam hal ini *bakul* yang lebih berkuasa untuk menentukan harga. Akibatnya nelayan sering dirugikan karena harga lebih rendah, mereka tidak bisa berbuat apa-apa kecuali bersikap pasrah. Seorang informan mengatakan :

“Pada saat membutuhkan uang yang sifatnya mendadak misalnya anak sakit, maka segera pinjam pada bakul ikan yang kemudian akan dibayar setelah pulang dari melaut. Meski harganya lebih rendah, tetapi saya harus menjual pada bakul tersebut. Tidak enak rasanya kalau menjual ke bakul lain....”.

Dari kasus itu terlihat bahwa nelayan yang sudah terikat kepada seorang *bakul* (karena diberi pinjaman), maka dia mempunyai tanggung jawab secara moral untuk menjual hasil tangkapan kepada *bakul* tersebut meski harga lebih murah. Selain dengan *bakul*, nelayan juga sering meminjam uang pada seorang *juragan*. Seperti halnya dengan *bakul*, para nelayan *bidak* juga berhutang budi pada *juragan* yang pada akhirnya mereka selalu menjual hasil tangkapannya dengan harga lebih rendah.

Keadaan seperti itu menjadikan status sosial-ekonomi nelayan di Desa Surya Bahari tidak dapat meningkat. Hasil kerja mereka tidak pernah terkumpul sebagai aset modal yang memadai. Pendapatan mereka hanya pas-pasan cukup untuk makan sehari-hari, bahkan jika ada kebutuhan mendadak mereka berhutang ke sana-sini. Kondisi perekonomian semacam ini semakin menyulitkan nelayan sehingga dari tahun ke tahun keadaan nelayan semakin terpuruk dalam kemiskinan.

Menyimak uraian di atas, pada intinya menyiratkan bahwa pendapatan dan pengeluaran keluarga nelayan berada pada posisi yang tidak seimbang. Sebagian besar responden berpendapat bahwa walau pengeluaran telah ditekan serendah mungkin, tetap saja seringkali tidak seimbang dengan pendapatan. Untuk menanggulangi kekurangan biaya hidup itu, mereka melakukan beberapa cara seperti meminta bantuan kepada tetangga, meminta bantuan kerabat di luar rumah tangga, memanfaatkan tenaga anak untuk membantu dalam pekerjaan, dan berhutang.

Dari data yang tercantum pada tabel 3.14, dapat diketahui bahwa 12 % responden menyatakan hidup seadanya, tidak menuntut banyak hal dalam arti asal hidupnya bisa berlanjut. 20 % responden menyatakan memanfaatkan tenaga anak dalam pekerjaan agar hasil yang didapat menjadi lebih banyak karena mendapat bagian yang berlipat sesuai dengan anggota umah tangga yang ikut. Sisi negatif dari cara ini adalah apabila anak yang bersangkutan masih berstatus siswa sebuah

sekolah, maka praktis belajarnya terganggu bahkan disuruh keluar dari sekolah oleh orang tuanya karena tuntutan keadaan.

Tabel 3.14
Cara Menutupi Kekurangan Biaya Hidup

No.	Alternatif Jawaban	F	%
1.	Dibiarkan seadanya	6	12,00
2.	Meminta bantuan tetangga	3	6,00
3.	Meminta bantuan kerabat di luar rumah tangga	2	4,00
4.	Memanfaatkan tenaga anak dalam pekerjaan	10	20,00
5.	Meminjam ke bank	1	2,00
6.	Berhutang (ke rentenir atau orang yang kaya atau juragan)	28	56,00
J u m l a h		50	100,00

Sumber : Data Primer Penelitian 2003

Dua responden menyatakan meminjam ke bank untuk menutupi kekurangan biaya hidup. Nampaknya, berhutang ke rentenir, orang kaya atau *juragan* merupakan alternatif yang banyak ditempuh (56 %), walaupun kadang-kadang bunganya tinggi. Hutang pada masyarakat nelayan merupakan suatu ikatan antara buruh dan majikan, di mana buruh yang berhutang akan terus bekerja pada majikannya dan biasanya hutang ini oleh pihak *juragan* tidak pernah diharapkan untuk dilunasi karena merupakan suatu jaminan tersedianya tenaga kerja bagi *juragan*. Selain itu, nelayan juga banyak yang meminjam uang ke *bakul*, dan konsekuensinya adalah hasil tangkapan harus dijual ke *bakul* yang bersangkutan. Tentu saja, akibat langsung yang dirasakan nelayan adalah permainan harga yang seenaknya oleh *bakul* tersebut.

Banyaknya nelayan yang terlibat hutang disebabkan sebagian besar kerabatnya pun termasuk kelompok keluarga miskin sehingga tidak memungkinkan untuk saling membantu keuangan. Demikian pula halnya dengan bantuan dari tetangga yang sama-sama merupakan keluarga miskin, sangat sulit diharapkan. Apabila penghasilan keluarga hanya digunakan untuk keperluan makan dan sebagian kecil untuk sandang, memang kebanyakan keluarga responden merasa cukup sesuai dengan tingkat kebutuhan mereka. Namun apabila penghasilan keluarga dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan pokok lain terutama kebutuhan akan papan yaitu rumah tempat tinggal, akan terasa kurang. Oleh karena itu, mereka harus bisa

memilih kebutuhan apa saja yang sebaiknya didahulukan, agar sesuai dengan pendapatan dan hidup mereka tetap berlanjut.

Selain uraian di atas, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sikap dan perilaku nelayan dan secara tidak langsung berpengaruh pula terhadap usaha peningkatan kesejahteraannya adalah pengaruh dari nelayan pendatang, pendidikan dan mental kemiskinan, KUD, dan tokoh-tokoh masyarakat. Berikut ini akan diuraikan faktor pengaruh tersebut.

1. Peranan dan Pengaruh Nelayan Pendatang

Pada saat pelelangan, yaitu mulai jam 12.00 sampai tutup jam 17.00, di dermaga atau tempat perahu berlabuh dekat Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sepanjang 500 meter, tampak terlambat beberapa perahu besar di samping perahu-perahu berukuran kecil milik penduduk. Perahu tersebut berukuran lebar antara 3 - 6 meter, panjang 15 - 25 meter dengan awak kapal antara 10 - 20 orang dan motor penggeraknya bertenaga 50 PK. Perahu-perahu berukuran besar itu merupakan perahu nelayan pendatang karena belum ada seorangpun nelayan Desa Surya Bahari yang memilikinya.

Mereka berlabuh karena beberapa hal, antara lain : ikut menjual sebagian/ seluruh hasil tangkapannya sebelum melanjutkan perjalanan atau kembali ke tempat asal; ada kerusakan pada perahu dan mereka singgah untuk memperbaikinya; perahu berukuran besar tersebut milik orang luar Desa Surya Bahari tetapi pekerjaannya/ awak kapalnya penduduk setempat sehingga lebih baik mereka berlabuh dan menjual hasil tangkapannya di desa sendiri sambil beristirahat (perahu berukuran besar umumnya melaut antara 3 - 7 hari); atau terpaksa berlabuh karena ada badai.

Untuk memperbaiki perahu, umumnya dipergunakan waktu sekitar satu minggu atau lebih dan selama itu para awak kapal menginap di Desa Surya Bahari, menumpang di rumah kenalan/kerabat maupun mondok di rumah orang dengan memberi imbalan (sewa). Adapun yang hanya singgah, umumnya hanya menginap semalam karena keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan/melaut. Nelayan yang datang dengan perahu berukuran besar tersebut umumnya berasal dari Indramayu. Sebagian lainnya datang dari Karawang, Blanakan, dan Pusanagara.

Adanya pendatang ke daerah nelayan, khususnya Desa Surya Bahari, menimbulkan dampak untung rugi dalam pandangan sosial ekonomi dan budaya. Di sisi lain pendatang memberikan kontribusi yang cukup besar bagi peningkatan ekonomi masyarakat setempat, tetapi di sisi lain pun kerawanan sosial dan perbedaan kebiasaan kerap menimbulkan masalah tersendiri.

Pendatang banyak yang berasal dari daerah nelayan : seperti Indramayu, Karawang dan sebagian lagi dari daerah pantura. Namun demikian beberapa informan mengatakan ada juga yang berasal dari daerah Parahyangan, seperti Bandung, Cililin (Kabupaten Bandung) dan Garut. Mereka datang ke desa yang dimaksud tentunya dengan satu atau berbagai tujuan yakni mencari penghidupan yang lebih baik.

Adanya kontak, temu muka, baik individu maupun kelompok, antara warga setempat dengan pendatang, tidak urung menimbulkan ikatan yang lebih khusus lagi, yakni ikatan perkawinan. Demikianlah, ikatan perkawinan telah menarik pendatang untuk menetap menjadi warga setempat.

Masalah kemudian muncul manakala berhadapan dengan pendatang musiman yang hanya bertujuan untuk sekedar berniaga saja. Artinya, mereka tidak termasuk warga yang tercatat dalam administrasi desa. Ketidaktetapan tempat tinggal yang diiringi kesemrawutan tempat usahanya kerap memusingkan pengurus desa. Adapun jenis dagangannya adalah kebutuhan nelayan seperti : pakaian, kelontong, dan sembako.

Sementara itu, pendatang yang berprofesi sebagai pembeli di tempat pelelangan ikan sering menentukan harga seenaknya. Kendati harga lelang ditentukan oleh juru tawar, namun “adanya persekongkolan” dengan pembeli menyebabkan kerugian di pihak nelayan.

Kehadiran nelayan pendatang, seperti disinggung di atas, banyak berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Desa Surya Bahari. Misalnya, apabila hasil tangkapan nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Surya Bahari dihitung secara keseluruhan, hasil dari nelayan setempat mungkin tidak lebih dari 25 %. Kenyataan ini disebabkan antara lain masih terhitung sederhananya peralatan produksi milik nelayan setempat, antara lain ukuran perahu yang lebih kecil dan waktu operasinya maksimal 5 hari.

Keuntungan atau dampak positif dari adanya nelayan pendatang antara lain : hasil retribusi yang cukup besar untuk kas desa, dan TPI selalu ramai dengan pelelangan hasil tangkapan nelayan. Raminya pelelangan, juga telah memberikan nafkah bagi para pedagang kecil, pedagang ikan eceran, maupun para *bakul*. Pada masa-masa *paila* (paceklik), Saat nelayan setempat dengan perahu berukuran kecil tidak bisa melaut, nelayan pendatang dengan perahu berukuran besar masih bisa beroperasi dan kedatangannya telah menghidupkan desa yang dihinggap kelesuan karena hasil tangkapan yang terus menerus turun. Selain itu, para nelayan pendatang yang ikut mondok atau menginap dengan memberi imbalan, membantu ekonomi penduduk yang ditumpanggi.

Keuntungan yang diperoleh nelayan setempat yang ikut beroperasi dengan perahu berukuran besar milik nelayan luar adalah walaupun pendapatannya hampir sama dengan apabila menjadi awak perahu kecil, tetapi mendapat keuntungan secara psikologis antara lain : jumlah awak yang cukup banyak membuat mereka tidak kesepian saat berada di tengah lautan yang demikian luas selama sehari-hari, dan karena jenis jaring atau alat penangkap ikan yang digunakan jauh lebih kuat keadaannya, maka tidak diperlukan perawatan yang terus menerus setiap hari seperti pada jaring-jaring kecil. Perawatan jaring tersebut umumnya dilakukan oleh orang yang telah ditentukan dengan diberi imbalan khusus sehingga mereka bisa menikmati waktu istirahat antara 2 hari sampai satu minggu.

Di lain fihak, nelayan pendatang juga mendapat keuntungan yang tidak sedikit. Oleh karena mereka seringkali melaut sampai jauh dari daerah asalnya yang berarti ikan hasil tangkapannya sudah cukup lama serta bisa busuk atau tidak terlalu segar kalau dijual di daerah asal, maka mereka menjualnya di tempat persinggahan (misalnya di TPI di Desa Surya Bahari) dalam keadaan segar yang sudah tentu harganya masih bisa dipertahankan. Mereka mendapat harga penjualan yang cukup tinggi dibandingkan apabila dijual di daerah asalnya. Selain itu, sambil pulang, mereka bisa melakukan kegiatan menangkap ikan lagi. Dengan demikian, mereka memperoleh keuntungan ganda yang sudah tentu berpengaruh besar terhadap tingkat ekonomi nelayan awak perahu yang bersangkutan.

Beberapa nelayan pendatang kadang-kadang menggunakan sebagian penghasilannya untuk berfoya-foya karena beranggapan penghasilan atau jatah untuk keluarga akan didapat lagi melalui penangkapan ikan saat pulang ke daerah asal. Mereka menghamburkan uang untuk minum-minuman keras dan untuk WTS sehingga kadang-kadang tidak ada sisa lagi bagi keluarga di rumah. Foya-foya semacam ini tidak terbatas pada nelayan pendatang, nelayan setempat pun sering melakukannya terutama apabila mereka merasa pendapatannya lebih tinggi dari pendapatan yang bisa mereka terima sehari-hari. Ada anggapan yang beredar di kalangan nelayan bahwa laut selalu siap memproduksi dan ikan-ikan tidak mungkin habis walaupun ditangkap terus-menerus. Sebagian besar responden menyatakan bahwa *"... penghasilan hari ini merupakan bekal untuk hidup hari ini ..."*, esok menangkap ikan lagi dan penghasilan yang didapat digunakan untuk bekal saat itu, demikian seterusnya. Oleh karena mereka beranggapan sumber produksi selalu siap dipanen asal mau bekerja, maka penyisihan penghasilan untuk ditabung hampir tidak pernah mereka lakukan.

Dari uraian di atas, dalam hubungannya dengan peranan dan pengaruh nelayan pendatang bagi nelayan Desa Surya Bahari, dapat dinyatakan bahwa di samping keuntungan-keuntungan yang bisa dinikmati oleh kedua fihak, ada juga beberapa eksek yang merugikan masyarakat setempat. Bagi sementara penduduk asli desa,

kehadiran mereka dianggap merusak atau berpengaruh negatif. Kebiasaan minum-minuman keras meningkat sejak hadirnya nelayan pendatang dalam jumlah yang semakin bertambah sehingga banyak mempengaruhi pemuda setempat. Demikian juga pelacuran menjadi masalah cukup penting di Desa Surya Bahari karena ia semakin berkembang, apalagi sejak berdatangannya WTS dari luar daerah dan melakukannya secara terselubung, membuat suasana yang kurang menyenangkan bagi masyarakat setempat.

Masalah yang terjadi pada adanya pendatang tidaklah luput dari perhatian aparat desa. Beberapa cara untuk menanggulangi keadaan tersebut pernah dicoba seperti : pendataan dan tindakan tegas. Namun semuanya gagal, bahkan menjadikan bumerang kepada aparat desa. Tindakan pembenahan kepada pendatang mendapat perlawanan dari masyarakat sendiri dengan tidak lagi mencalonkan kepala desanya. Sekurang-kurangnya anggapan miring ditimpakan kepada aparat desa. Misalnya, sentimen kepada anggota masyarakat yang kebanjiran rejeki. Di samping itu, pihak warga pun takut kehilangan langganan akibat adanya penertiban dan dianggap mengganggu sumber nafkah orang lain.

2. Pendidikan dan Kemiskinan

Profil nelayan yang menjadi obyek penelitian ini digambarkan sebagai profil yang sukar dibenahi. Beberapa informan cenderung memberi keterangan mengenai kehidupannya dengan menunjukkan kepada hal-hal yang bersifat negatif. Kekumuhan tempat tinggal, kesemrawutan tata ruang pemukiman yang bercampur dengan tempat “parkir” perahu nelayan adalah sekedar contoh pembenaran informasi yang dimaksud.

Masalahnya adalah apa penyebabnya ?

Penelusuran atas pencarian sebab akibat “profil” nelayan sebagaimana dikemukakan, seolah-olah dihadapkan pada lingkaran setan yang tidak berujung pangkal. Namun demikian penulis mencatat ada dua hal penting yang merupakan kunci timbulnya permasalahan ini, yaitu pendidikan dan kemiskinan. Permasalahannya : apakah kemiskinan merupakan faktor penyebab rendahnya pendidikan atau sebaliknya, yakni faktor pendidikan yang rendah melahirkan kemiskinan. Demikian eratnya masalah pendidikan dan kemiskinan pada masyarakat nelayan, nyaris menjadi sebuah *câp* atau identitasnya. Seorang nelayan diidentikan dengan kebodohan dan kemiskinan.

Pendidikan yang dianggap kunci permasalahan yang timbul pada diri seorang nelayan memang tidak menjadi tumpuan harapan sebuah keluarga. Seorang informan mengakui bahwa putra-putranya, yang berjumlah sepuluh orang, tidak ada yang tamat sekolah dasar. Ia beralasan faktor ekonomi yang tidak mendukungnya.

Ketidakmampuan meningkatkan perolehan hasil melaut dan ketiadaan modal yang cukup guna menghasilkan sebuah hasil yang layak untuk keluarganya, sukar sekali diperolehnya. Dalam benak pikirannya ia berandai-andai hasil tangkapan ikannya yang berlimpah ruah akan dapat menyelesaikan masalah yang menderanya.

Ketidakmampuan meningkatkan perolehan hasil melaut sangat bergantung pada keahlian dan keterampilan dalam menggunakan peralatan teknologi (moderen). Sebaliknya, penggunaan peralatan teknologi sangat terkait dengan ilmu pengetahuan yang notabenehnya merupakan hasil dari sebuah proses pendidikan.

Dunia pendidikan di desa nelayan, khususnya Surya Bahari, yang berada pada tahap rendah, diperburuk lagi dengan sarana dan prasarana yang tidak menunjang. Keberadaan lokasi sekolah lanjutan yang berada di luar desa Surya Bahari merupakan salah satu sebab keengganan nelayan menyekolahkan putra-putrinya. Mereka berfikir ke arah pertambahan beban keluarga berupa biaya transportasi dan keperluan sarana pendidikan lainnya (buku, tas, dan sebagainya) yang harus disediakan. Itu artinya, seorang nelayan harus meningkatkan hasil tangkapan ikannya. Artinya lagi seorang nelayan harus meningkatkan lagi keahlian, keterampilan dan teknologinya. Di samping itu, fasilitas transportasi jalan belum memadai. Jalannya yang rusak juga sarana angkutan umum masih kurang serta tidak beroperasi penuh. Menurut informan, angkutan umum beroperasi hanya sampai sore hari, selebihnya diganti dengan ojek yang ongkosnya cukup mahal untuk ukuran masyarakat setempat.

Akibat langsung ketidakmampuan nelayan menyekolahkan putra-putrinya adalah mencetaknya menjadi nelayan muda (anak-anak). Anak-anak usia sekolah “dipaksa” bekerja kepada orang tuanya. Tujuannya adalah membantu keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Siklus seperti ini terus berlangsung hingga sekarang. Dengan kalimat lain terjadi siklus “pemindahkan” status dan jabatan nelayan, orang tua kepada anaknya.

Kondisi yang serba kurang bagi nelayan diperburuk lagi dengan sikapnya yang berfikir sesaat serta sikap “manja” terhadap perhatian orang lain. Hal yang pertama dipacu oleh pandangan bahwa laut menyediakan kebutuhan (ikan) yang tidak akan habis. Setiap saat ia dapat saja melaut untuk menghasilkan uang. Oleh karena itu, ketika ia memperoleh ikan tangkapan yang melimpah yang berarti meningkatnya pendapatan uang; maka yang pertama kali dipikirkannya adalah bagaimana memanjakan diri dan keluarganya. Mereka tidak berpikir untuk menabungkan uangnya yang sewaktu-waktu dapat digunakan manakala terjerit kebutuhan. Itulah sebabnya, menurut Kepala Desa, nelayan di Surya Bahari tidak banyak yang mempunyai tabungan.

Kondisi yang kedua adalah “manja” terhadap pemberian orang lain. Sebuah kasus yang baru-baru ini terjadi adalah pembagian sembako saat krisis moneter. Program pemerintah yang memberi bantuan kepada kalangan miskin, termasuk kalangan nelayan, dianggapnya sebagai santunan yang menyebabkan “kemalasan” bekerja. “Keenakan” diberi bantuan telah melahirkan jiwa-jiwa pengemis yang sama sekali tidak menunjang kemandirian para nelayan. Tampaknya bantuan kepada para nelayan harus melalui format yang benar-benar teruji dan sekaligus bermanfaat untuk masa yang akan datang.

3. Peranan dan Pengaruh Koperasi Unit Desa (KUD)

Koperasi yang semula diharapkan menjadi penopang atau pilar perekonomian nelayan pada kenyataannya masih jauh panggang dari api. Adanya pertentangan dan sejumlah permasalahan interen antara anggota dan pengurus telah menyebabkan koperasi, yang bernama Mina Samudera, berjalan di tempat. Tidak ada perubahan yang signifikan terhadap para anggotanya, bahkan belakangan perselisihan semakin meruncing. Hal ini dipicu oleh pengerjaan proyek pengerukan yang dilakukan atas nama koperasi yang bersangkutan, tidak sesuai dengan pemanfaatannya. Proyek tersebut telah banyak mengandaskan kapal atau perahu para nelayan.



Photo 3.19 Kantor KUD Mina Samudra. Latar depan, Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Hal terpenting yang menjadi salah satu penyebab kemandegan koperasi adalah peran desa dibalkan oleh para pengurus KUD. Ketika KUD masih berbentuk koperasi kecil (Koperasi Perikanan), belum menjadi sebuah koperasi yang mandiri, peran desa cukup besar. Misalnya, dalam hubungan kerja, hubungannya lebih personal (pribadi) sehingga berbagai masalah dapat ditanggulangi dengan kekeluargaan.

Masalah timbul manakala KUD Mina Samudera menjadi koperasi mandiri yang tentunya akan berdampak pada pergantian kepengurusan. Menurut salah seorang informan, sejak diganti kepengurusan, Desa Surya Bahari tidak lagi memperoleh pemasukan yang sesuai dengan hasil musyawarah desa. Alasannya, menurut pihak KUD, tidak ada undang-undang atau peraturan yang mengatur kewajiban KUD “menyetor” kepada desa. Pertentangan semakin meruncing saat terjadi perayaan ulang tahun KUD Mina Samudera yang melibatkan petinggi di Jakarta. Pada perayaan tersebut pengurus desa sangat tersinggung, dalam bahasa setempat merasa tidak dihormati oleh pihak panitia yang menempatkan peran desa sebatas seremonial belaka. Mereka, KUD Mina Samudera, cenderung mengatur peran desa.

Ketidakharmonisan hubungan pengurus KUD Mina Samudera dengan aparat desa setempat secara tidak langsung berpengaruh kepada para anggota koperasi. Dalam hal ini terjadi pembelahan kelompok menjadi dua kubu yang bertentangan. Mereka yang tidak puas dengan kepengurusan KUD dan mereka, pengurus, yang mempertahankan kebijakannya. Namun demikian beberapa anggota koperasi yang bersuara vokal tidak berani menyuarakan kepentingannya disebabkan adanya efek psikologis. Ia merasa takut akan adanya tanggapan negatif dari anggota lain karena kevakalannya itu. Sementara anggota lain, yang umumnya para nelayan, merasa rendah diri disebabkan dirinya bukan lulusan perguruan tinggi.

Menurut informan, tidak ada kemajuan berarti yang dilakukan KUD selama ini bahkan beberapa informan menyatakan ketidakpuasannya atas cara kerja pengurus KUD. Ketidakpuasan itu antara lain karena para pengurus menganut *family system*, yaitu mendahulukan pelayanan terhadap nelayan yang mempunyai hubungan keluarga dengan pengurus. Bahkan para pengurus pun merupakan orang-orang yang mempunyai hubungan dengan para pengurus yang lebih tinggi dan yang dianggap dapat berkerjasama dengan mereka. Di samping itu, pernah terjadi kucuran dana dari pemerintah berupa bantuan pinjaman permodalan sebesar Rp. 5.000.000 - 6.000.000; tetapi pinjaman tersebut tidak sampai ke tangan yang berhak. Padahal pengajuan bantuan tersebut mengatasnamakan nelayan. Kalaupun ada nelayan yang menerima, penerimaannya tidak sesuai dengan angka yang ditandatangani. Menurut tuturan informan, ia hanya menerima Rp. 500.000, itu pun setelah didahului dengan unjuk rasa (protes).

Penggantian pengurus KUD sebagai salah satu cara solusi pembenahan KUD merupakan hal yang sukar dilakukan para anggotanya yang kebanyakan nelayan miskin. Hal ini disebabkan adanya “ketentuan” yang mengharuskan calon Ketua Koperasi menyimpan jaminan uang sebesar Rp. 10.000.000.

KUD memotong penghasilan nelayan pada saat menjual di TPI sebesar 11 % yang diperuntukkan 6 % untuk kepentingan TPI, 1 % untuk keperluan Pesta Nadrans, dan 5 % untuk nelayan berupa tabungan. Potongan tersebut digunakan untuk simpanan wajib, tabungan yang diambil pertahun, dan *saving* (tabungan yang boleh diambil kapan saja). Kenyataannya, tabungan-tabungan tersebut seringkali berkurang jumlahnya pada saat diambil, atau bahkan hilang sama sekali.

Di luar KUD juga tidak ada sumber bantuan atau kredit lain seperti kredit candak kulak atau semacamnya yang bisa menolong kepentingan para nelayan. Kredit atau bank gelap, responden menyebutnya *bank keliling*, yang mudah didapat, terpaksa mereka memanfaatkan meskipun harus membayar bunga sebesar 10 sampai 25 % setiap bulannya. Apabila dilihat siklus kehidupan mereka selama satu tahun, jelas tampak bahwa uang yang mereka gunakan untuk membeli alat-alat rumah tangga dengan cara demikian banyak kehilangan arti. Banyak di antara mereka harus menjual barang-barang itu kembali dengan setengah harga beli sewaktu tekanan ekonomi menjadi demikian berat pada musim hujan. Ada juga yang menggadaikan beberapa barang berharga miliknya. Hal tersebut mengandung arti bahwa mereka tidak mampu membebaskan diri dari pola hidup yang berat seperti itu.

Pada saat Hari Raya Idul Fitri, para nelayan anggota KUD mendapat pembagian THR (Tunjangan Hari Raya) berupa gula pasir 1/2 kg, susu 1 kaleng, dan biskuit 1 plastik kecil. Adanya THR, membuat SHU yang seharusnya dibayarkan tiap tutup tahun buku menjadi tidak ada. Ketidakpuasan anggota KUD terletak pada sedikitnya THR yang mereka terima, dan menurut mereka, jumlahnya tidak seimbang dengan keuntungan yang diperoleh KUD dari kegiatan yang dilakukannya.

Satu-satunya keuntungan yang dirasakan nelayan dengan adanya KUD adalah disediakannya TPI (Tempat Pelelangan Ikan) yang memegang peranan penting didalam membantu pemasaran hasil tangkapan nelayan maupun hasil perikanan lainnya. Pelelangan telah memungkinkan seluruh jenis hasil tangkapan mereka bisa terjual habis, tanpa menunggu, walaupun tangkapan mereka tidak seluruhnya baik. Salah satu caranya adalah pada saat pelelangan mereka meletakkannya dengan cara menumpuk ikan segar di atas ikan-ikan yang kurang segar sehingga lebih menarik pembeli.

Kerugian nelayan dengan adanya TPI antara lain tidak bisa menentukan harga sendiri. Harga pelelangan tergantung dari harga pasar dan kerugian juga bisa

terjadi bila ada permainan di antara juru lelang dengan para pedagang. Sebagian informan mengeluh dan menyatakan bahwa KUD/TPI terlalu menguasai, para nelayan harus menjual hasil tangkapannya ke TPI, tidak boleh ke tempat lain misalnya ke pedagang atau *bakul*. Pernah suatu kali, mereka menjual langsung ke pedagang tetapi diketahui pejabat TPI, mereka didatangi dan dimintakan wajib pajak penjualan sebagaimana layaknya apabila mereka menjual melalui TPI. Mereka mengeluh tangkapannya pada saat itu terlalu sedikit sehingga keuntungannya sangat kecil setelah dipotong retribusi. Para pejabat TPI kadang-kadang menakut-nakuti mereka dengan mengatakan, apabila menjual ke *bakul* atau tempat selain TPI, para nelayan akan didatangi petugas dari KORAMIL (Komando Rayon Militer) atau pihak berwajib lainnya.

Walaupun keluhan banyak diungkapkan seperti terurai di atas, umumnya mereka menyatakan bahwa KUD dan TPI penting peranan dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat nelayan. Yang penting untuk diperhatikan demi kemajuan KUD dan TPI di masa mendatang adalah memperbaiki cara kerja KUD dan TPI serta menambah jumlah permodalannya. Demikian juga, penyuluhan-penyuluhan perlu lebih digiatkan agar masyarakat menjadi lebih faham mengenai pentingnya KUD dan TPI dalam meningkatkan taraf hidup mereka. Tentu saja waktu pelaksanaannya harus disesuaikan dengan pola kerja nelayan yang sebagian besar waktunya dihabiskan di tengah laut.

4. Peranan Pemimpin Desa dan Tokoh Masyarakat

Kepemimpinan di Desa Surya Bahari dapat digolongkan atas kepemimpinan formal dan nonformal. Kepemimpinan formal berada di tangan aparat pemerintahan, seperti aparat desa. Sementara kepemimpinan nonformal terletak pada orang-orang yang ditokohkan oleh warga masyarakat, seperti ulama dan tokoh masyarakat. Penghargaan masyarakat terhadap kedua golongan pemimpin tersebut tidak berbeda karena keduanya berperan aktif dalam kegiatan masyarakat.

Para nelayan sangat jarang memenuhi undangan pertemuan yang diadakan di balai / kantor desa, karena pelaksanaannya sering bentrok dengan waktu kerja nelayan yang sebagian waktunya dihabiskan di laut. Mereka sering mewakilkan pada isterinya, anaknya yang sudah cukup dewasa, atau kerabatnya.

Kepala desa dan aparat pemerintah desa serta tokoh-tokoh masyarakat, tidak henti-hentinya memotivasi para ibu nelayan dan membantu agar mau berusaha untuk menambah penghasilan keluarga, dengan cara berdagang ikan hasil tangkapan suaminya ataupun mengolah ikan asin dan ikan pindang sebagai *home industri*, yang pemasarannya dilakukan secara mandiri dengan sistem asongan. Artinya,

dipasarkan langsung oleh ibu-ibu nelayan di pinggir jalan.

Kerja keras kepala desa dan aparatnya serta tokoh-tokoh masyarakat telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Keberhasilan program ini tidak hanya dipandang dari adanya penambahan pendapatan, tetapi pada perubahan sikap dan kemauan ibu-ibu nelayan dalam berusaha. Sikap ini lebih penting karena dapat mendorong terciptanya kemauan berusaha di bidang lain.

Keberhasilan pelaksanaan sejumlah program pembangunan desa, selain karena sikap proaktif masyarakat nelayan, juga karena peranan dari tokoh-tokoh formal dan nonformal. Mereka dengan sabar memberi motivasi dan bantuan moral bagi nelayan miskin untuk berusaha memperbaiki kehidupan keluarganya.

Para tokoh masyarakat sering mendatangi rumah-rumah penduduk dan membimbing mereka dalam berbagai hal untuk memperbaiki hidup yang sehat dan teratur. Kehadiran tokoh masyarakat lebih dapat diterima oleh masyarakat, karena umumnya termasuk orang tua di desa, yang dianggap bijaksana dan mempunyai pengetahuan luas. Para tokoh masyarakat melakukan kegiatan secara sukarela dengan menggunakan pendekatan kekeluargaan, sehingga masyarakat tidak merasa digurui atau diperintah untuk melakukan suatu kegiatan. Mereka berupaya menanamkan kesadaran pentingnya hidup sehat dan terencana, serta mengajak untuk bertakwa terhadap Tuhan dengan menjalankan perintah agama dan menjauhi perbuatan yang dapat merusak fisik dan mental, seperti minum minuman keras dan hidup berfoya-foya.

G. Pentahapan Kesejahteraan Keluarga Nelayan Berdasarkan Instrumen Pendataan dari BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional)

Instrumen Pemetaan dan pendataan Keluarga Sejahtera merupakan produk kesepakatan para pakar sosiologi (tergabung dalam Ikatan Sosiolog Indonesia) di bawah pimpinan Prof. DR. Selo Soemardjan bersama unit terkait, yang pada tahun 1992 telah berhasil menjabarkan kriteria Keluarga Sejahtera. Konsep "sejahtera" dirumuskan lebih luas daripada sekadar definisi kemakmuran ataupun kebahagiaan, artinya tidak hanya mengacu pada pemenuhan kebutuhan fisik orang ataupun keluarga sebagai entitas, tetapi juga kebutuhan psikologis mereka. Tiga kelompok kebutuhan yang harus terpenuhi adalah kebutuhan dasar, kebutuhan sosial dan kebutuhan pengembangan.

Pembangunan program keluarga sejahtera mencakup 13 variabel seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, agama, keluarga berencana, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan, transportasi, tabungan,

informasi, dan peranan dalam masyarakat. Berdasarkan variabel-variabel tersebut dan dikaitkan dengan tingkat pemenuhannya, BKKBN menetapkan 5 tahapan Keluarga Sejahtera : Pra Sejahtera, Sejahtera I, Sejahtera II, Sejahtera III, dan Sejahtera Plus. Rumusan yang membedakan ciri masing-masing tahapan keluarga telah diuraikan pada Bab I mengenai Pendekatan Teoritis. Berdasarkan rumusan tersebut, pendataan Keluarga Sejahtera 1994 mengetengahkan 22 indikator sederhana agar mudah dipakai untuk mencatat keadaan keluarga-keluarga di seluruh Indonesia. Tampaknya memang sepele, tetapi dalam prakteknya indikator-indikator itu dapat menunjukkan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh keluarga di daerahnya masing-masing.

Indikator pendataan Keluarga Sejahtera adalah :

1. Keluarga Pra Sejahtera : Keluarga yang tidak memenuhi syarat sebagai Keluarga Sejahtera Tahap I
2. Keluarga Sejahtera Tahap I :
 1. Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.
 2. Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah, dan bepergian.
 3. Bagian yang terluas dari lantai rumah bukan lantai tanah.
 4. Bila anak sakit dibawa ke sarana/ petugas kesehatan atau diberi pengobatan modern
3. Keluarga Sejahtera Tahap II : Kecuali harus memenuhi syarat 1 sampai 4 maka keluarga tersebut harus pula memenuhi syarat-syarat 5 sampai 12 sebagai berikut :
 5. Paling kurang sekali seminggu keluarga menyediakan daging/ ikan/ telur sebagai lauk pauk.
 6. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru setahun sekali.
 7. Luas lantai rumah paling kurang 8 m² untuk setiap penghuni rumah.
 8. Seluruh anggota keluarga yang berada di bawah 60 tahun dewasa ini bisa membaca tulisan latin.
 9. Seluruh anak yang berusia 6 - 12 tahun bersekolah pada saat ini.
 10. Paling kurang satu anggota keluarga yang berumur 15 tahun ke atas mempunyai pekerjaan tetap.

11. Seluruh anggota keluarga dalam satu bulan terakhir dalam keadaan sehat, sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing.
 12. Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur menurut agama yang dianut masing-masing.
4. Keluarga Sejahtera Tahap III : Keluarga yang memenuhi syarat-syarat 1 sampai 12 dan memenuhi syarat-syarat di bawah ini dimasukkan sebagai Keluarga Sejahtera Tahap III.
13. Anak hidup paling banyak dua orang, atau bila anak lebih dari dua orang, keluarga masih PUS memakai kontrasepsi saat ini.
 14. Sebagian penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan keluarga.
 15. Keluarga biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari.
 16. Keluarga biasanya ikut serta dalam kegiatan masyarakat dalam lingkungan tempat tinggal.
 17. Keluarga mengadakan rekreasi bersama di luar rumah paling kurang sekali dalam tiga bulan.
 18. Keluarga dapat memperoleh berita dari surat kabar/radio/majalah.
 19. Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi yang sesuai dengan kondisi daerah setempat.
 20. Upaya keluarga untuk meningkatkan pengetahuan agama.
5. Keluarga Sejahtera Tahap III Plus : Apabila kerangka-kerangka itu memenuhi syarat 1 sampai 20 dan juga syarat-syarat di bawah ini, maka keluarga itu dimasukkan dalam tingkat Keluarga Sejahtera Tahap III Plus,
21. Keluarga atau anggota keluarga secara teratur memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materi.
 22. Kepala keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan, yayasan, atau institusi masyarakat lainnya.

Berdasarkan 22 indikator tersebut di atas, keluarga nelayan di lokasi penelitian dapat dikelompokkan sebagai berikut : sebagian besar merupakan Keluarga Pra Sejahtera (94 %), 4 % bisa dikategorikan dalam Keluarga Sejahtera Tahap I, dan hanya 2 % bisa dimasukkan dalam kategori Keluarga Sejahtera Tahap II.

Dari hasil pendataan keluarga nelayan, nampaknya faktor dominan yang menyebabkan keluarga berada dalam tahapan Keluarga Pra Sejahtera adalah “bagian terluas dari lantai rumah terdiri dari tanah”. Faktor tersebut tidak bisa

memenuhi indikator no. 3 yaitu “bagian yang terluas dari rumah bukan dari tanah”. Faktor lainnya adalah pemenuhan indikator no. 4, yaitu “bila anak sakit dibawa ke sarana/petugas kesehatan atau diberi pengobatan modern.” Seperti diketahui, nelayan dan anggota keluarganya seringkali membiarkan penyakit yang dideritanya apabila dirasa tidak terlalu parah. Bahkan beberapa responden masih kerap pergi ke “orang pintar” apabila menderita sakit yang tak kunjung sembuh.

Pada beberapa keluarga nelayan, pakaian yang dimiliki kadang-kadang digunakan untuk setiap kesempatan. Dengan kata lain, mereka tidak memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah, dan bepergian. Keadaan ini tentu saja berarti tidak dapat memenuhi indikator no. 2.

Dari uraian di atas, secara umum dapat dikatakan bahwa faktor pertama yang menyebabkan masyarakat nelayan masuk dalam kategori Keluarga Pra Sejahtera adalah lantai rumahnya masih terbuat dari tanah. Penyebab kedua adalah walau sakit belum sepenuhnya memanfaatkan tenaga atau sarana kesehatan yang ada namun pergi ke dukun. Fakta itu merupakan dua faktor utama yang menjatuhkan, artinya masalah pangan dan masalah kesehatan belum begitu diperhatikan. Sedangkan masalah pangan, sudah tercukupi walaupun kadang-kadang hanya sekadar kenyang dan belum memikirkan masalah gizi. Mengenai sandang, walaupun memiliki beberapa potong pakaian, masyarakat umumnya belum bisa menggunakan sesuai fungsinya artinya sepotong pakaian bisa digunakan dalam beberapa situasi, tidak ada kekhususan fungsi pakaian : untuk tidur, bekerja, sekolah, pesta atau bepergian. Walaupun demikian, secara umum, mengenai sandang sudah terpenuhi secara layak.

BAB IV

PENUTUP

Kemiskinan, ketertinggalan, keterbelakangan, dan kesengsaraan, seolah-olah telah menjadi predikat yang erat melekat dalam kehidupan nelayan. Padahal tidak ada seorang pun yang mau hidup dalam keadaan demikian. Kalaupun banyak keluarga yang hidup menderita, penuh duka nestapa, rintangan dan hambatan serta terkungkung pula oleh belenggu kemiskinan, pasti karena berbagai faktor penyebab. Beberapa faktor bisa diajukan, antara lain karena ketidakmampuan ekonomi, ketidakperdulian lingkungan, kondisi alam yang kurang bersahabat ataupun disebabkan oleh ketidaktahuan dan masalah budaya.

Persoalan eksternal dan internal seperti telah terurai pada bab-bab terdahulu yang menyebabkan banyak keluarga nelayan berada di bawah garis kemiskinan atau sebagian besar termasuk dalam kategori tahap Keluarga Pra Sejahtera, barangkali dapat membuka cakrawala pemahaman tentang latar belakang kehidupan mereka. Pemaparan yang mudah-mudahan bisa difahami disertai pemetaan yang jelas dan akurat tentang masalah yang dihadapi, diharapkan akan memudahkan penentuan rencana intervensi program yang tepat bagi masyarakat nelayan. Penelitian yang dilakukan penulis mengenai tingkat kesejahteraan nelayan, antara lain mendapat gambaran indikasi kemiskinan yang menyebabkan tidak beranjaknya tingkat kesejahteraan keluarga nelayan sebagai berikut : jumlah anggota rumah tangga nelayan/responden cukup besar (rata-rata 5 orang); kondisi rumah tempat tinggal relatif buruk dan berukuran kecil sehingga tidak sesuai dengan jumlah anggota rumah tangga yang besar; latar belakang pendidikan relatif rendah menyebabkan produktivitas rendah sehingga pendapatannya rendah; dan rendahnya pendapatan tidak seimbang dengan pengeluaran sehari-hari walaupun telah ditekan serendah mungkin sehingga untuk menutupinya, mereka banyak berutang. Selain itu, lingkungan pemukiman mereka pun kurang memenuhi syarat-syarat kesehatan, antara lain kurangnya sumber air bersih disertai MCK (mandi, cuci dan kakus) yang kurang layak, dan saluran air kotor yang tidak tertata dalam lokasi pemukiman yang sempit sehingga rumah-rumah nelayan yang berdesakan, tampak kotor dan kumuh.

Secara umum, nelayan menganggap dirinya sebagai kelompok melarat. Mereka cenderung mendramatisasikan keadaan kemiskinan mereka dalam bentuk sukarnya penghidupan dan pekerjaan mereka, dan dalam kecilnya pendapatan yang diperoleh. Mereka mengeluh bahwa pendapatannya hanya cukup atau bahkan kurang untuk menutupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Mubyarto et. al (1987), menuturkan bahwa keluhan-keluhan kelompok miskin ini juga telah memberikan dasar pada pendapat mereka tentang konsep-konsep *kemakmuran*, *kesejahteraan*, dan *kebahagiaan*. Pada umumnya, mereka menyatakan bahwa tersedianya *pekerjaan* sepanjang waktu, *kesehatan* yang mantap dan terjamin agar tetap mampu bekerja dan *mencari nafkah* untuk hari esok, merupakan pengertian atau syarat-syarat yang harus terkandung dalam tiga konsep tersebut. Kekhawatiran akan jaminan pekerjaan dan nafkah yang kurang menentu, juga telah menjadi salah satu alasan yang mendorong anggota-anggota keluarga lain seperti isteri dan anak-anak, untuk bekerja membantu ekonomi keluarga.

Pekerjaan sebagai nelayan, tidak diragukan lagi adalah pekerjaan yang sangat berat. Mereka yang menjadi nelayan tidak dapat membayangkan pekerjaan lain yang lebih mudah, sesuai kemampuan yang mereka miliki. Keterampilan sebagai nelayan bersifat amat sederhana dan hampir sepenuhnya dapat dipelajari dari orang tua mereka sejak mereka masih kanak-kanak. Apabila orang tua mampu, mereka pasti akan berusaha menyekolahkan anak setinggi mungkin sehingga tidak harus menjadi nelayan seperti orang tua mereka. Tetapi dari kasus-kasus keluarga yang diteliti; ternyata kebanyakan mereka tidak mampu membebaskan diri dari profesi nelayan. Turun temurun, mereka adalah nelayan.

Dengan mengacu pada perhitungan Sayogyo bahwa nelayan dikatakan miskin apabila tingkat pendapatan per kapita per tahunnya kurang dari 320 kg setara beras untuk daerah pedesaan, maka nelayan di desa lokasi penelitian bisa dikategorikan penduduk miskin karena berada di bawah garis kemiskinan dengan pendapatan $\pm 199,8$ kg per kapita per tahun.

Untuk strata *juragan*, penghasilan pertahunnya sangat bervariasi. Hal tersebut disebabkan bervariasinya penghasilan tambahan yang diusahakan mereka, antara lain sebagai pedagang, buruh bangunan, dan pengusaha tambak ikan. Walaupun demikian, setelah memperhitungkan resiko (untuk perbaikan perahu/alat menangkap ikan dan modal usaha), maka tingkat pendapatan perkapita perahunya tidak begitu jauh berbeda dengan nelayan *pandega / bidak*, yaitu ± 315 kg setara beras per kapita pertahun. Hanya 3 responden yang berpenghasilan sekitar 365 kg setara beras per kapita per tahun (di atas garis kemiskinan). Dengan demikian, secara umum nelayan di desa lokasi penelitian dapat dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Apabila digunakan instrumen pemetaan dan pendataan Keluarga Sejahtera dari BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional), maka didapat data bahwa sebagian besar (94 %) masih merupakan Keluarga Pra Sejahtera, hanya sedikit yang termasuk kategori Keluarga Sejahtera Tahap I (4 %), dan Keluarga Sejahtera Tahap II (2 %). Faktor utama yang “menjatuhkan” adalah masalah papan dan kesehatan (indikator no 3 dan 4).

Kedua acuan yang digunakan, yaitu teori/pendapat Sayogyo mengenai batas garis kemiskinan dan instrumen pemetaan/pendataan Keluarga Sejahtera dari BKKBN, memiliki kekurangan dan kelebihan. Sayogyo terlalu menekankan faktor pemenuhan pangan dengan pertimbangan apabila keluarga telah memiliki pendapatan di atas batas yang telah ditentukan, dianggapnya telah lepas dari garis kemiskinan karena otomatis kebutuhan lain akan terpenuhi. Padahal kenyataan di lapangan bisa membuktikan sebaliknya, pendapatan lebih dari cukup tetapi aspek lain bisa jadi kurang diperhatikan misalnya pendidikan, kesehatan, sandang, dan papan.

Demikian juga dengan instrumen pendataan Keluarga Sejahtera dari BKKBN, nampaknya penyebab dominan sebuah keluarga tidak lulus untuk menjadi Keluarga Sejahtera Tahap I atau masih dianggap sebagai Keluarga Pra Sejahtera adalah indikator no 3 : bagian yang terluas dari lantai rumah bukan dari tanah. Masalahnya adalah bagaimana dengan pengelompokkan rumah sederhana dari masyarakat, yang karena beberapa faktor tertentu misalnya untuk menjaga kehangatan atau tanahnya labil, lebih menyukai lantai rumah bukan dari tanah seperti terbuat dari papan, bambu, atau rumah adat yang rata-rata berupa rumah panggung ? Konsep atau indikator no 3 agaknya perlu ditinjau kembali, mengingat kultur setiap masyarakat mengenai persepsi tempat hunian atau rumah sangat bervariasi. Apalagi misalnya hanya karena kondisi lantai rumah masih berupa tanah bukan lantai semen atau papan, beberapa keluarga yang lebih menekankan aspek pendidikan anak, digolongkan dalam Keluarga Pra Sejahtera.

Terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, penerapan kedua konsep tersebut di atas pada keluarga nelayan di lokasi penelitian mengungkapkan bahwa secara umum masyarakat nelayan masih berada di bawah garis kemiskinan dan masih termasuk dalam kategori Keluarga Pra Sejahtera. Karakteristik kemiskinannya dapat diungkapkan sebagai berikut : kemiskinan berkorelasi positif dengan jumlah anggota keluarga dan berkorelasi negatif dengan jumlah pekerja dalam suatu keluarga, ditandai dengan rendahnya pemilikan aset keluarga, ditandai dengan latar belakang pendidikan yang relatif rendah sehingga menyebabkan produktivitas rendah dan pendapatan rendah, serta kemiskinan berkaitan dengan masalah sosial budaya yang dinamis.

Adanya masalah-masalah seperti tersebut di atas, tentunya perlu dicari alternatif pemecahan dan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup kaum nelayan. Kepala negara sendiri seringkali menghimbau agar semua kalangan ikut serta memikirkan dan mengambil bagian yang aktif dalam pengembangan bidang perikanan umumnya, dan peningkatan kesejahteraan kaum nelayan pada khususnya.

Apabila ditelusuri lebih seksama mengenai kebijaksanaan yang sekarang dikembangkan oleh pemerintah, didapat kenyataan bahwa upaya peningkatan produksi perikanan lebih diutamakan kepada pembinaan pengusaha besar di bidang perikanan untuk mengejar ekspor nonmigas dari komoditas perikanan laut. Sejak beberapa tahun yang lalu, program modernisasi melalui fasilitas perkreditan bagi perikanan rakyat telah diadakan. Tetapi kebijaksanaan ini tidak dilanjutkan dalam program berikutnya karena terjadi kemacetan dalam pengembalian kredit. Walaupun motorisasi dengan motor tempel telah digalakan, tetapi kemudian motor tempel ini dianggap kurang efisien dan kurang produktif serta menyebabkan padat rangkap di perairan pantai.

Adanya program semacam itu rupanya belum dapat meningkatkan pendapatan kaum nelayan karena biaya eksploitasi yang cukup tinggi, terutama harga BBM yang telah meningkat dan tidak sepadan lagi dengan peningkatan kesejahteraan nelayan tradisional yang umumnya tinggal di pelosok-pelosok pedesaan. Ketidaksepadanan tersebut terjadi terutama sejak tahun 1987, yaitu ketika kebijaksanaan yang diambil hanya bertumpu pada usaha meningkatkan produksi dan modernisasi industri perikanan belaka.

Prof. Mubyarto (1987) dalam salah satu penelitiannya menyatakan bahwa adanya investor asing terutama dari Jepang ternyata bisa menghasilkan metode penangkapan yang lebih efisien dan produktif, sehingga investor di sektor ini dapat menghasilkan keuntungan yang besar serta cepat. Investor asing tentu saja tidak memikirkan masalah kelestarian sumber daya laut. Kenyataan itu semakin buruk akibat adanya kebijaksanaan pemberian kredit, pendirian Tempat Pelelangan Ikan, ataupun Pusat Pendaratan Ikan. Meskipun sarana itu sempat dinikmati oleh kaum nelayan, tetapi orientasinya lebih tertuju pada peningkatan hasil ikan. Dampak dari kebijaksanaan itu ternyata hampir semua nelayan mengeluh karena berebut ikan dengan armada penangkapan ikan luar negeri atau penanaman modal asing.

Dengan prasarana yang terbatas, nelayan tradisional cenderung menghindari apabila bertemu dengan armada-armada kapal besar milik penanam modal asing di wilayah perairan Indonesia, sehingga seringkali terlihat nelayan tradisional terpaksa menangkap ikan di laut lepas. Sedangkan kapal-kapal besar itu menangkap ikan di perairan dalam. Kondisi tersebut tentu saja menjadikan kehidupan kaum nelayan tradisional kita semakin memprihatinkan (Entang Sastraatmadja, 1994).

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa adanya modal asing tidak selamanya membawa dampak positif karena kadang-kadang juga berdampak negatif. Nelayan lokal tetap menderita dan tingkat kesejahteraan hidupnya tidak beranjak menjadi lebih baik. Walaupun perhatian pemerintah cukup besar terhadap kaum nelayan, namun perlu juga diatur mengenai kehidupan di dunia perikanan, terutama agar tidak terjadi penindasan terhadap kaum nelayan yang membuatnya semakin terpuruk dalam belenggu kemiskinan.

Senada dengan pendapat Mubyarto et. al (1987); dalam kenyataannya, masalah sosial (dan ekonomi) sebagai akibat negatif proses modernisasi, nampaknya masih dapat diatasi oleh lembaga-lembaga "*bapak-anak*" (*patron-client*) yang berlaku sesuai adat atau kebiasaan setempat. Ada semacam perasaan "wajib" bagi para *juragan* (pemilik modal dan perahu) untuk memberi pekerjaan atau bantuan pada yang miskin. Perasaan ingin menolong ini pasti diberikan kepada si miskin yang senang bekerja keras. Oleh karena jumlah nelayan tidak sebanding dengan banyaknya perahu, maka *juragan* di daerah penelitian mengambil kebijakan dengan membagi waktu *miang* (melaut) bagi setiap nelayan menjadi dua hari sekali, saling bergantian. Dengan demikian, setiap nelayan mendapat kesempatan yang sama untuk mendapatkan penghasilan. Uraian tersebut menyiratkan bahwa semangat sosial dan moral tolong menolong masih cukup menonjol di lokasi penelitian, sehingga meskipun keadaan kehidupan cukup "sumpek", tokh ia tidak cenderung *eksplosif*. Di fihak kelompok miskin, semangat untuk mengatasi kesukaran hidup dengan upaya sendiri masih tinggi. Pengerahan (tenaga) seluruh anggota keluarga (termasuk anak-anak) untuk mencukupi kebutuhan hidup merupakan ciri khas kehidupan keluarga miskin. Ini berarti bahwa anak, di samping sebagai unit konsumsi yang merupakan beban keluarga juga sekaligus merupakan unit produksi yang membantu meringankan beban tersebut.

Faktor struktural yang berupa kelembagaan merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan yang dominan pada masyarakat nelayan. Sistem bagi hasil yang berlaku sampai sekarang masih merupakan penyebab rendahnya pendapatan golongan *buruh nelayan*. Kemudian tataniaga perikanan yang tidak efisien juga merupakan salah satu penyebab nelayan terpuruk dalam kemiskinan. Tidak efisiennya tataniaga perikanan disebabkan oleh rantai tataniaga yang panjang dan sistem pemasaran yang masih tradisional dengan peranan kaum pelepas uang yang masih dominan. Distribusi pendapatan yang tidak merata juga merupakan sebab sulitnya golongan miskin melepaskan diri dari lingkaran kemiskinan, karena sebagian besar dari pendapatan dikuasai oleh sebagian kecil golongan *juragan* sehingga sulit bagi sebagian besar nelayan yang tergolong miskin untuk menabung dalam rangka pemupukan modal.

Kehadiran nelayan pendatang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, baik secara ekonomi maupun sosial. Di bidang ekonomi, mereka berpengaruh di tingkat ekonomi regional, desa atau pada ekonomi masyarakat desa. Selain desa memperoleh pendapatan dari hasil retribusi, ramainya pelelangan juga telah memberikan nafkah pada para pedagang kecil, pedagang eceran, maupun *bakul*. Mereka juga telah berhasil menghidupkan desa ini pada masa-masa sulit, di mana para nelayan setempat sendiri dihindangi kelesuan karena hasil yang terus menerus turun.

Selain keuntungan, eksese negatif yang timbul adalah meningkatnya kebiasaan foya-foya, yakni minum-minuman keras dan pelacuran semakin berkembang. Kebiasaan foya-foya ini erat kaitannya dengan anggapan : "*hasil hari ini untuk hidup hari ini*." Kebiasaan yang sulit untuk diubah karena telah tersosialisasi sejak kecil. Oleh karena itu, pantas apabila tokoh masyarakat dan aparat desa menyatakan pekerjaan yang sangat sulit untuk mengubah kebiasaan foya-foya pada nelayan menjadi senang menabung atau menghemat penghasilan.

Satu-satunya lapangan pekerjaan yang diandalkan nelayan adalah bidang perikanan laut sebagai kegiatan produksi ekstraktif, yakni sekedar menangkap, bukan membudidayakannya. Keadaan alam yang sulit ditaklukan sampai sekarang merupakan kendala dan problema yang sulit diatasi. Pengaruh musim dan cuaca masih sangat dominan terhadap hasil tangkapan yang diperoleh. Adanya musim barat dan musim timur menyebabkan terdapatnya tenggang waktu yang membuat nelayan tidak dapat pergi ke laut untuk menangkap ikan.

Oleh karena itu, harapan nelayan adalah dapat meningkatkan produksi perikanan dan mengawetkannya, serta memperlancar pemasaran. Prakarsa di pihak mereka sendiri tampaknya belum muncul, walaupun cara-cara mengatasi hal seperti itu mungkin telah mereka lihat dan dengar dari siaran televisi atau radio. Mereka malah menginginkan terbukanya lapangan kerja lain yang mendukung usaha perikanan.

Harapan masyarakat nelayan sehubungan dengan masalah kesempatan kerja, dapat diuraikan sebagai berikut : struktur ekonomi hendaknya diperbaiki dengan perluasan (kemajemukan) lapangan kerja yang bisa dijangkau oleh para nelayan bersama anggota keluarganya, memperbaiki dan membina mata rantai pemasaran dalam suatu sistem ekonomi dan tataniaga yang efisien yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan, ingin menguasai pengetahuan mengenai sistem pengawetan ikan dengan menggunakan teknologi modern yang tidak mengorbankan norma dan tradisi nelayan, memperbaiki cara kerja TPI sehingga keberadaannya sangat menunjang pemasaran hasil tangkapan nelayan, dan pemerintah hendaknya menyelenggarakan kursus-kursus keterampilan yang mendukung usaha perikanan.

Dari uraian di atas, inti dari harapan nelayan adalah penciptaan model tataniaga hasil produksi yang merupakan mata rantai dari produksi ke pemasaran agar para nelayan tidak jatuh pada tengkulak yang suka mempermainkan harga seenaknya, serta pemerintah hendaknya menciptakan diversifikasi lapangan kerja agar nelayan dapat menggunakan waktu luangnya untuk memperoleh penghasilan tambahan.

Penataan lingkungan pemukiman dan reboisasi pesisir pantai, sangat diharapkan oleh masyarakat untuk menjamin kelestarian pemukiman di masa datang. Reboisasi penting artinya, karena di samping membendung erosi pantai dari kikisan ombak, turut pula mengembangkan daya hayati laut. Menurut nelayan, masalah-masalah yang sebaiknya diperhatikan pemerintah untuk penataan lingkungan pemukiman antara lain dibangunnya sarana jalan desa secara lebih baik agar pada musim hujan tidak becek dan dengan demikian mendukung pemasaran hasil produksi, membantu penyediaan dana untuk perbaikan perumahan, membangun sarana air bersih dalam jumlah yang seimbang dengan jumlah penduduk dan dilengkapi dengan MCK yang layak, memperbaiki saluran air kotor, dan melengkapi sarana pemukiman seperti tempat peribadatan, lapangan olah raga, serta balai musyawarah.

Masyarakat juga sangat mengharapkan pemerintah menata lebih mantap program pengembangan KUD (Koperasi Unit Desa) sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu aturan atau sistem manajemen perkoperasian. KUD sebagai soko guru perekonomian desa, belum bisa berperan secara aktif. Kehadirannya baru berperan sebagai "pemotong" sebagian penghasilan nelayan, belum bisa menjadi pemasok modal. Padahal, nelayan sangat mengharapkan bantuan dana untuk membantu meningkatkan produktivitas usahanya. Demikian juga dengan TPI, nelayan tidak diberi kesempatan untuk menjual sendiri hasil tangkapannya langsung kepada pembeli / *bakul* walaupun jumlahnya sedikit. Nelayan mengemukakan bahwa apabila hasil tangkapannya banyak, mereka tidak keberatan dan memang sebaiknya dijual di TPI. Akan tetapi kalau hasil tangkapannya sedikit, mereka merasa lebih baik langsung ke pembeli karena kalau ke TPI, keuntungan akan semakin kecil setelah dipotong retribusi dan KUD.

Dengan memperhatikan tingkat kesejahteraan keluarga nelayan dan permasalahannya seperti terurai di atas, dapat dikatakan bahwa kemiskinan nelayan merupakan masalah yang kronis dan kompleks. Permasalahan yang dihadapi dalam menanggulangi kemiskinan nelayan tersebut, bukan hanya terbatas pada hal-hal yang menyangkut pemahaman hubungan sebab-akibat timbulnya kemiskinan, melainkan juga melibatkan preferensi, nilai, dan politik, serta harus terwujud dalam program nyata. Oleh karena itu, langkah lanjut dari penelitian ini diharapkan tampak dalam kebijakan-kebijakan pemerintah untuk berusaha memperbaiki tingkat kesejahteraan keluarga nelayan.

Mengingat kemiskinan selalu berada dalam konteks sosial, maka interdependensi antar individu atau antar golongan masyarakat merupakan karakteristik inheren. Karena itu pula, untuk menanggulangi kemiskinan bukan hanya akan menyangkut permasalahan perubahan dalam *entitlement*, akan tetapi menyangkut pula sumber daya dalam arti fisik maupun dalam arti kesempatan memperoleh *share* dari timbulnya manfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hamid, et. al., **Pertumbuhan Pemukiman di Lingkungan Perairan Daerah Sulawesi Selatan**, Jakarta : Proyek IDKD Depdikbud, 1986.
- Agus Pakpahan, dan Hermanto, *A Pragmatic Approach to Knowledge Generation for Supporting Poverty Alleviation Programs*, dalam **Poverty Alleviation with Sustainable Agricultural and Rural Development in Indonesia, Proceeding of National Seminar and Workshops**, Bogor : CASER and CIIPAD, 1992.
- Ampang J., **Identifikasi dan Analisis Faktor Sosial Ekonomi yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Miskin di Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan : Studi Kasus di Desa Paitanan dan Desa Bintornaten Kecamatan Binamu**, Yogyakarta : Fakultas Pasca Sarjana UGM, 1984.
- Ani Rostiati, et. al., **Masyarakat Petani Garam dan Tambak Ikan di Rembang**, Yogyakarta : Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 1991/1992.
- Bagdan, R. C. & Bilken, S. R., **Qualitative Research for education and Introduction to Theory and Method**, London :Allyn & Bacon Inc., 1986.
- Biro Pusat Statistik, **Kemiskinan dan Pendapatan di Indonesia 1996 - 2000**.
_____, **Statistik Indonesia 2000**.
- Brotomoeljono, et. al., **Sosialisasi pada Perkampungan Miskin Daerah Kalimantan Selatan**, Jakarta : Proyek IDKD Depdikbud, 1987.
- Entang Sastraatmadja, *Nelayan Kita dan Dilema Kehidupan Mereka*, dalam **Harian Umum Pikiran Rakyat**, 5 Februari 1994.
- H.S. Dillon dan Hermanto, *Kemiskinan di Negara Berkembang*, dalam **Prisma No. 3/XII**, Jakarta : LP3ES, 1993.
- Institut Pertanian Bogor, **Studi Pengembangan Wilayah Desa Pantai di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta**, Bogor : IPB, 1985.
- Kartidjo, **Struktur Masyarakat Indonesia dan Masalah Kemiskinan Suatu Bunga Rampai**, Jakarta : Sangkala Pulsar, 1984.
- Koentjaraningrat, **Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan**, Jakarta : Gramedia, 1974.

- Mubyarto, **Pengantar Ekonomi Pertanian**, Jakarta : LP3ES, 1979.
- , et. al., **Nelayan dan Kemiskinan**, Jakarta : CV. Rajawali, 1987.
- Mulyanto Soemardi & Hans-Dieter Evers, ed., **Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok**, Jakarta : CV Rajawali, 1985.
- Mursito, *Suatu Tinjauan atas Kemiskinan Struktural di Pedesaan Indonesia, dalam Analisa No. 1981-3*, Jakarta, 1981.
- Paulus Widiyanto, *Suara si Miskin, dalam Prisma No. 3/XII*, Jakarta : LP3ES, 1993.
- Parsudi Suparlan, **Kemiskinan di Perkotaan**, Jakarta : Sinar Harapan, 1984.
- Prisma**, Majalah, Nomor 6/VIII, Jakarta : LP3ES, 1980.
- Prisma**, Majalah, Nomor 3/XII, Jakarta : LP3ES, 1993.
- Prisma**, Majalah, Nomor 6/XXIII, Jakarta : LP3ES, 1994.
- Saropie S., **Tingkat Pendapatan dan Penggunaan Tenaga Kerja Penduduk Desa Pantai : Studi Kasus di Sebuah Desa di Kabupaten Kendal Jawa Tengah**, Bogor : Fakultas Perikanan IPB, 1975.
- Sayogyo, *Pemikiran tentang Kemiskinan di Indonesia, dalam Prisma No. 3/XII*, Jakarta : LP3ES, 1993.
- Soerjono Soekanto, **Sosiologi Suatu Pengantar**, Jakarta : Rajawali Press, 1982.
- Soetatwo Hadiwigeno dan Agus Pakpahan, *Identifikasi Wilayah Miskin di Indonesia, dalam Prisma No. 3/XII*, Jakarta : LP3ES, 1993.
- S. T. Vembrianto, **Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup**, Yogyakarta : Yayasan Pendidikan Paramita, 1982.
- Teken I.G.B., **Penelitian di Bidang Ekonomi Pertanian dan Beberapa Metode Pengambilan Contoh**, Bogor : IPB, 1965.
- The Kian Wie, **Pemerataan Kemiskinan Ketimpangan**, Jakarta : Sinar Harapan, 1981.
- Tibe Hafid, et. al., **Sosialisasi Pada Perkampungan Miskin Daerah Sulawesi Tenggara**, Jakarta : Proyek IDKD Depdikbud, 1986.
- Toto Sucipto, **Faktor Sosial Ekonomi Penyebab Kemiskinan Pada Masyarakat Nelayan Di Jawa Barat**, Bandung : Lembaga Penelitian UNPAR, 1993.
- , **Profil Kehidupan Nelayan Di Jawa Barat**, Bandung : Lembaga Penelitian UNPAR, 1994.
- Yaumil C. Agoes Achir, *Pembangunan Keluarga Sejahtera, dalam Prisma No. 6/XXIII*, Jakarta : LP3ES, 1994.

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : **Damhuri**
Umur : 36 tahun
Pendidikan : SLA
Pekerjaan : Ka Ur Ekbang Desa Surya Bahari
Alamat : Dusun III (Kp Sugri)
2. Nama : **Malpi Sepdania**
Umur : 38 tahun
Pendidikan : Sarjana
Pekerjaan : Ka Ur UPK Tenaker & Catatan Sipil Kec. Pakuhaji
Alamat : Curug Tangerang
3. Nama : **Romli**
Umur : 36 tahun
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Ka Ur Pemerintahan
Alamat : Desa Surya Bahari
4. Nama : **Dasito**
Umur : 30 tahun
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Nelayan
Alamat : Kp Cituis
5. Nama : **Madra**
Umur : 50 tahun
Pendidikan : Tamat SMP tahun 1969
Pekerjaan : Nelayan, Juragan Kapal Dogol
Alamat : Kp Cituis
6. Nama : **Sarip**
Umur : 37 tahun
Pendidikan : Tamat SD
Pekerjaan : Nelayan, buruh
Alamat : Kp Cituis

7. Nama : **Tarmuka**
Umur : 42 tahun
Pendidikan : Tamat SD
Pekerjaan : Nelayan (Juru mudi)
Alamat : Kp Rawasabon

8. Nama : **Kodir**
Umur : 43 tahun
Pendidikan : Tamat SD
Pekerjaan : Nelayan, buruh
Alamat : Kp Cituis

9. Nama : **Jaya**
Umur : 39 tahun
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Nelayan, buruh
Alamat : Kp Cituis

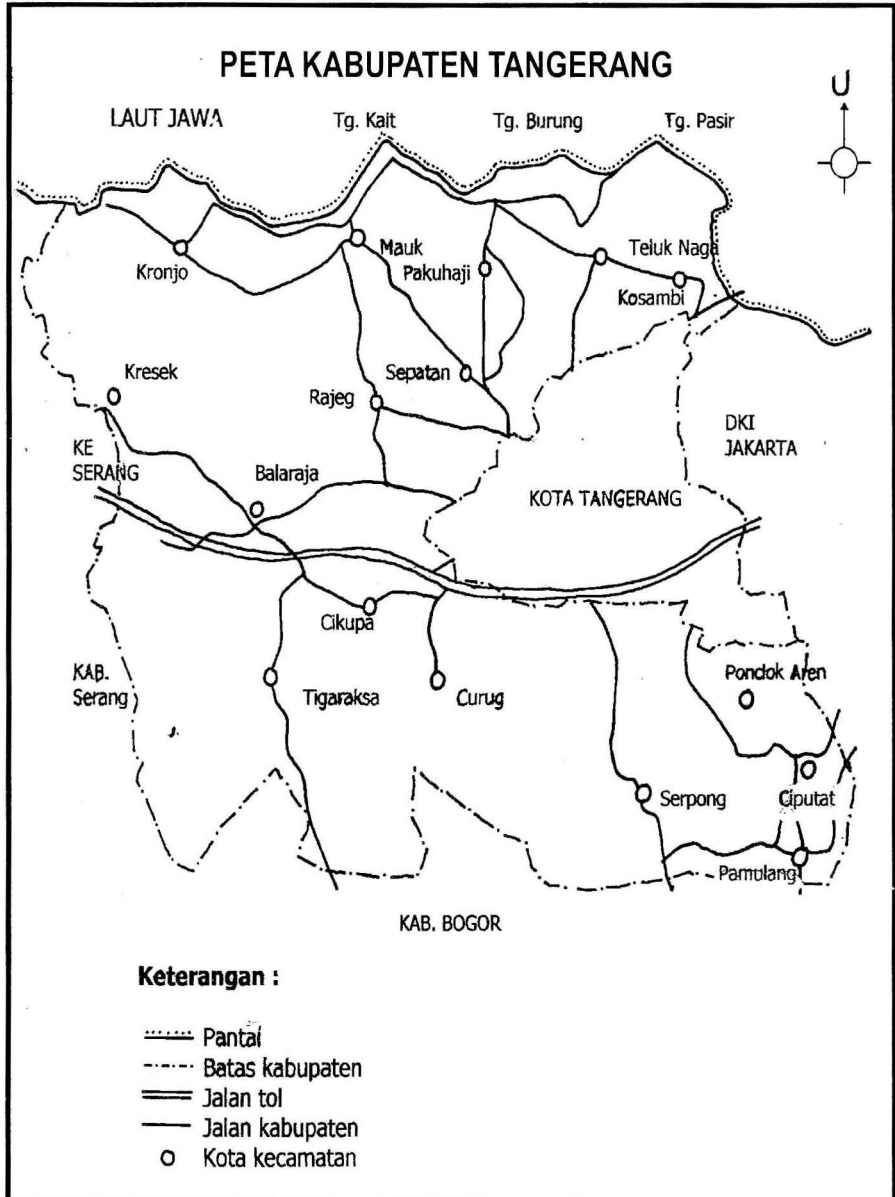
10. Nama : **Ahmad Suherman**
Umur : 46 tahun
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Buruh, Nelayan
Alamat : Desa Surya Bahari Kp Cituis

11. Nama : **Mista**
Umur : 41 tahun
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Juragan Kapal
Alamat : Desa Surya Bahari Kp Cituis

12. Nama : **A. Fendi**
Umur : 35 tahun
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Buruh, Nelayan
Alamat : Desa Surya Bahari Kp Rawasaban

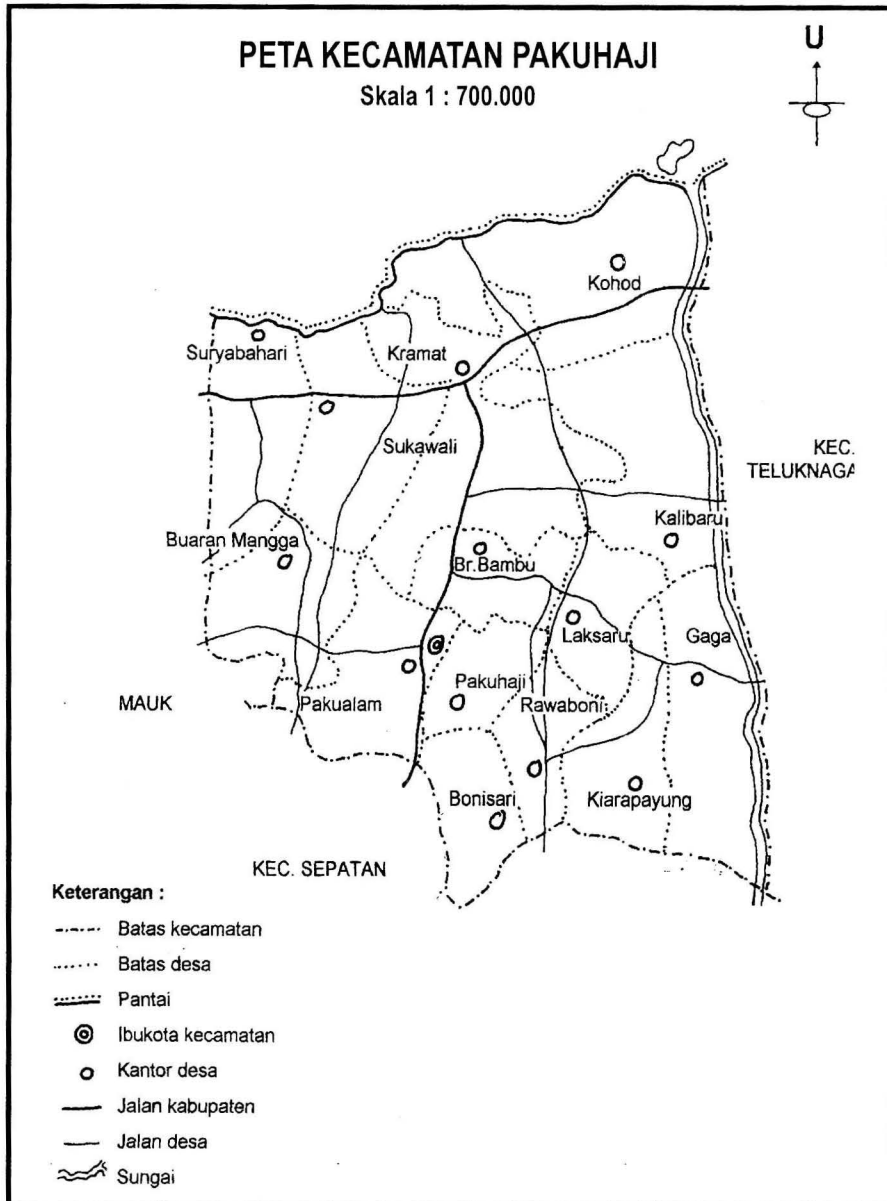
13. Nama : **Rasmun**
Umur : 40 tahun
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Buruh, Nelayan
Alamat : Desa Surya Bahari Kp Rawasaban
14. Nama : **Waud**
Umur : 40 tahun
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Buruh, Nelayan
Alamat : Desa Surya Bahari Kp Cituis
15. Nama : **Kulyubi**
Umur : 36 tahun
Pendidikan : SLA
Pekerjaan : Kepala Desa
Alamat : Desa Surya Bahari
16. Nama : **Sukardi**
Umur : 50 tahun
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Nelayan
Alamat : Desa Surya Bahari Kp Cituis
17. Nama : **Sayim**
Umur : 35 tahun
Pendidikan : Tidak Sekolah
Pekerjaan : Juragan Kapal
Alamat : Desa Surya Bahari Kp Cituis

1. Peta Kabupaten Tangerang



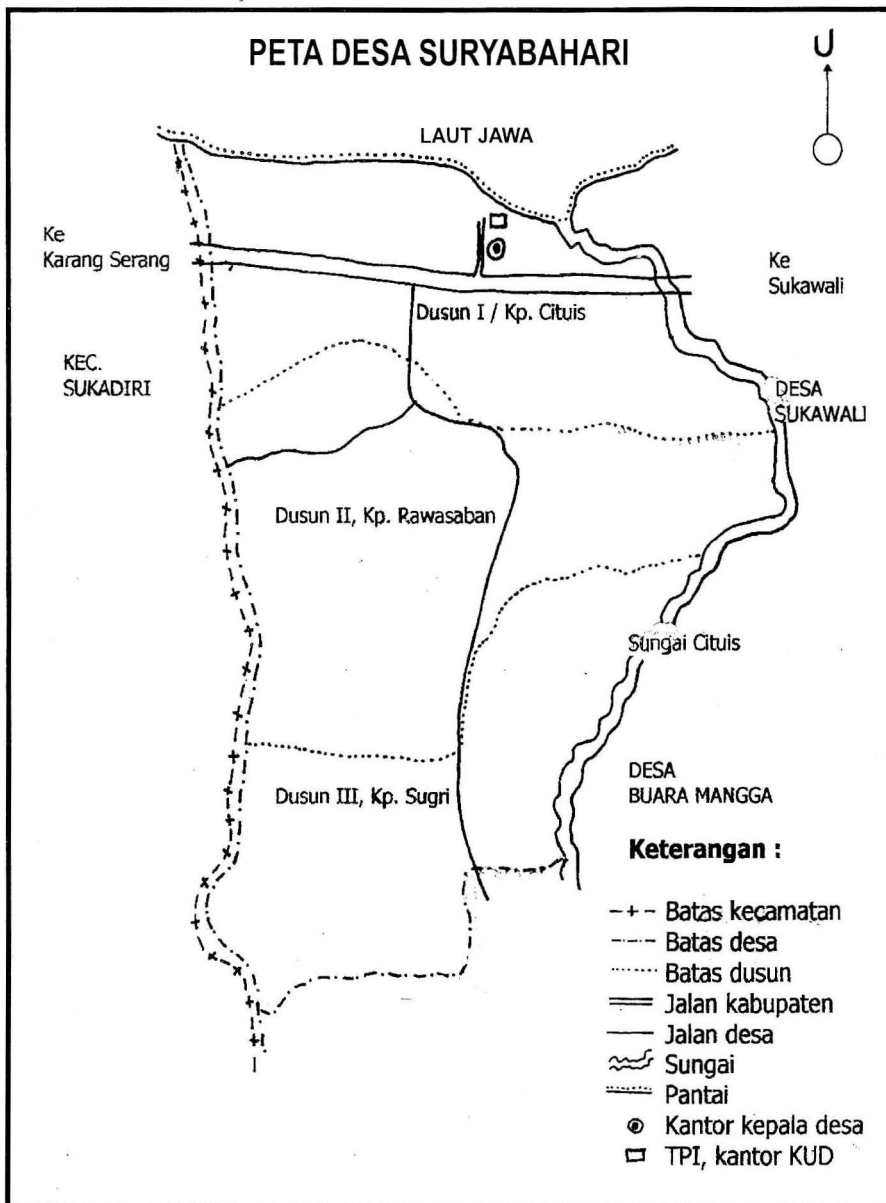
Sumber : Peta Pariwisata Jawa Barat & Banten, 2000

2. Peta Kecamatan Pakuhaji



Sumber : Monodrafi Kec. Pakuhaji, 2003

3. Peta Desa Surya Bahari



Sumber : Monodrafi Desa Surya Bahari, 2002

Perpustakaan
Jenderal K

36
TO